KH. Hasyim Asy'ari
dan RESOLUSI JIHAD
(dalam Usaha Mempertahanan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945)

Penulis: Muhammad Rijal Fadli & Bobi Hidayat, M.Pd

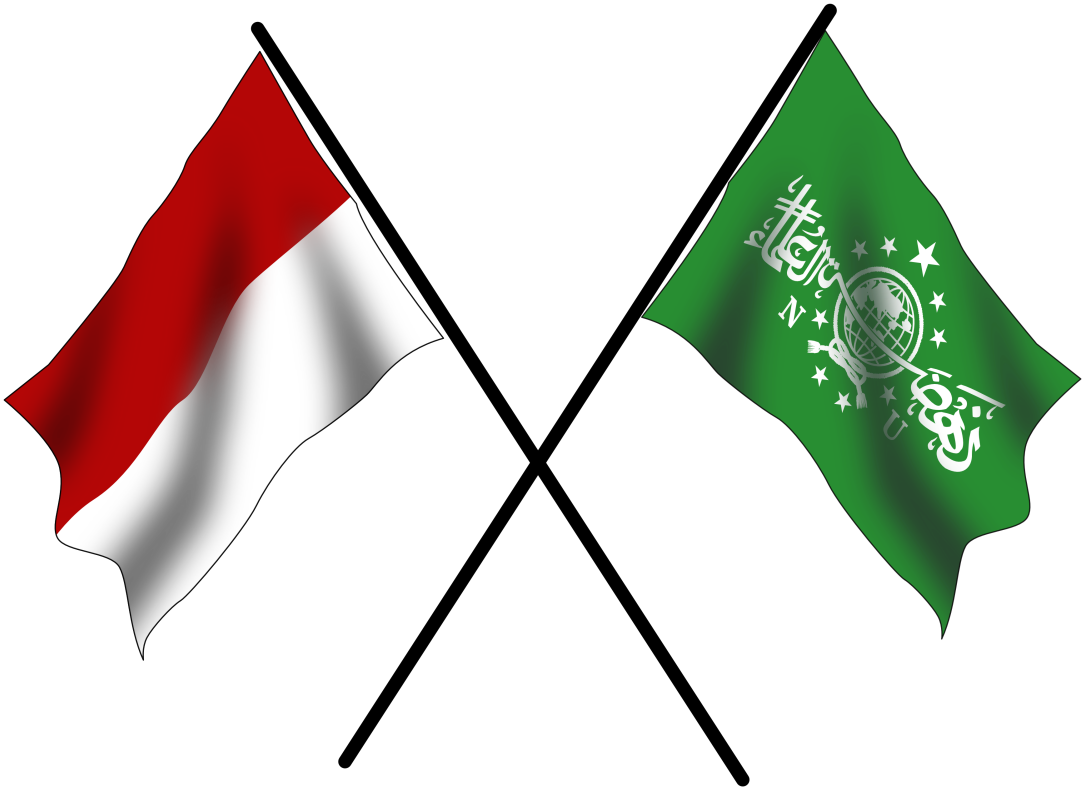

"K.H. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad"

dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945

“K.H. Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad”

dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945

Penulis:
Muhammad Rijal Fadli dan Bobi Hidayat

Penyunting:
Kian Amboro

"K.H. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad"
dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945

© Muhammad Rijal Fadli, Bobi Hidayat, Kian Amboro

Penulis :
Muhammad Rijal Fadhli
Bobi Hidayat

Penyunting :
Kian Amboro

Desain Isi dan Sampul :
Gus Hamid Asrori

Tata letak :
Team Laduny Creative

ISBN. 978-602-5825-21-7
ix + 105 hal.; 18.2 cm x 25.7 cm
Cetakan Pertama, Juni 2018

Dicetak dan diterbitkan oleh:
CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny)
Anggota IKAPI
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.
Telp. 0852 6901 2121 – 0857 6900 1000
Email: **penerbitladuny@gmail.com**

PENGANTAR PENULIS

Sejarah bukanlah mengungkap hal-hal yang fiktif, tetapi mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi, hingga hari ini sering disalah artikan oleh masyarakat awam. Sejarah mengandung makna yang sangat luar biasa karena dengan sejarah manusia mampu melihat kejadian-kejadian di masa lampau yang menjadikan manusia itu bisa menjadi manusia seutuhnya. Melihat dari berbagai peristiwa yang berada di Indonesia, seperti peristiwa 10 November 1945 yang diawali dengan adanya peran penting tokoh KH. Hasyim Asy'ari yang mendeklarasikan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Dengan diawalinya Resolusi Jihad ini masyarakat Indonesia tergugah hatimya untuk melawan penjajah yang telah lama, bangsa Indonesia seolah-olah begitu rela bertahun-tahun dijajah oleh bangsa asing, akan tetapi belum ada perlawanan yang heroik untuk mengusirnya pada zaman dulu. Disini hadir seorang ulama K.H. Hasyim Asy'ari bahkan telah menjadi tokoh nasional, beliau mampu memimpin, mengarahkan rakyat Indonesia untuk bangkit dari kezhaliman yang telah dilakukan oleh kolonial.

Resolusi jihad yang menjadi cikal bakal peristiwa 10 November 1945 harus disampaikan ke generasi muda agar mereka bisa mengetahui fakta sejarah yang sebenarnya dan juga agar bisa digunakan sebagai teladan anak cucu kita di masa depan. fakta bahwa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dilepaskan dari perjuangan dahsyat dan peran besar para ulama dan kaum santri, tapi ternyata dalam fase tertentu sejarah pernah tidak berkata jujur tentang peran laskar santri yang terhimpun dalam Hizbullah maupun laskar kiai yang tergabung dalam Sabilillah, dalam berperang melawan bangsa penjajah.

Berdasarkan sejarah, Laskar Hizbullah berada di bawah komando spiritual K.H. Hasyim Asy'ari dan secara militer dipimpin oleh K.H. Zainul Arifin. Adapun laskar Sabilillah dipimpin oleh K.H. Masykur. Konon, pemuda pesantren dan anggota Ansor NU (ANU) adalah pemasok paling besar dalam keanggotaan Hizbullah. Peran kiai dalam perang kemerdekaan ternyata tidak hanya dalam laskar Hizbullah-Sabilillah saja, tetapi banyak diantara mereka yang menjadi anggota tentara PETA (Pembela Tanah Air).

Peran kaum santri sangatlah besar dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri ini namun sangat disayangkan mengapa sejarah peran kaum santri dalam melawan penjajah masih tidak banyak

diketahui generasi muda bangsa, dan salah satu penyebabnya adalah karena sekolah tidak pernah mengajarkan sejarah secara utuh.

Buku "K.H. Hasyim Asy'ari dan Resolusi Jihad dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indoneisa Tahun 1945" hadir untuk tujuan memberikan pencerahan dan wawasan kepada masyarakat umum untuk mendokumentasi fakta sejarah yang dimiliki, menuliskan, dan menerbitkan sehingga pesantren, santri, dan ulama memiliki sejarah. Semoga dengan adanya buku ini kita semua akan mampu belajar, bagaimana pentingnya kepedulian umat Islam terhadap nasib bangsa Indonesia. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam harus tampil terdepan untuk berjuang dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Jika umat Islam tidak mengisi peran tersebut, maka dikhawatirkan peran tersebut diambil alih oleh kelompok lain yang belum tentu memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Metro, Juni 2018

Penulis

PENGANTAR PENYUNTING

Historia samper reformanda, sejarah selalu memperbaharui diri, dapat juga dimaknai bahwa selalu hadir narasi-narasi sejarah dengan interpretasi baru. Seperti halnya tema penulisan sejarah yang ditulis oleh penulis dalam buku ini, yang bermaksud mengetengahkan peran penting kaum santri atau tokoh ulama dalam melawan penjajah kolonial. Sebuah fakta sejarah yang sebelumnya di*marginal*kan oleh penguasa sehingga historiografi Indonesia pada masa sebelumnya sangat bernuansa politik dan istanasentris. Padahal peran masyarakat bawah (non-elit politik) dalam sejarah tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Selain sebagai buku referensi secara umum, secara khusus buku ini juga dapat digunakan dalam rangka memperkaya khasanah materi pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Dapat dikatakan bahwa sampai dengan saat ini kajian atau materi sejarah di sekolah masih didominasi oleh sejarah politik. Sehingga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan peserta didik untuk memahami sejarah perjuangan kemerdekaan dari sudut pandang berbeda, tidak selalu dari sudut pandang elit politik, seperti banyak tertulis dalam buku-buku ajar sejarah saat ini.

Selain mengusung tema sejarah yang menarik, buku ini juga diterbitkan sebagai bentuk menyebarluaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh civitas akademika di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. Dikarenakan buku ini merupakan hasil penelitian, tentunya proses pengumpulan data-data hingga tahap akhir historiografi telah melalui proses yang cukup ketat. Meski demikian bukan berarti tulisan sejarah dalam buku ini bersifat final. Sebagaimana kalimat pembuka dalam pengantar ini, masukan, kritik, dan saran yang membangun diharapkan kehadirannya agar sejarah dapat selalu memperbaharui diri. Berharap pesan dan pelajaran dari sejarah dalam buku ini dapat tersampaikan, kami ucapkan selamat membaca dan menggali kearifan dari sejarah.

Metro, Juli 2018

Penyunting

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PENGANTAR PENULIS v
PENGANTAR PENYUNTING vii
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pendekatan Penelitian 7
C. Kerangka Berpikir dan Konsep-konsep Dasar 8
1. Kerangka Berpikir 8
2. Konsep-konsep Dasar 8
D. Metode Kajian 13
1. Heuristik 13
2. Kritik 14
3. Interpretasi 16
4. Historiografi 17

BAB II SITUASI DAN KONDISI SEBELUM KEMERDEKAAN 18
A. Kebangkitan Nasional 18
1. Masa Awal Kebangkitan Nasional 18
2. Tokoh-tokoh Kebangkitan Nasional 20
3. Dampak Kebangkitan Nasional 24
B. Penjajahan Jepang 26
1. Awal Penjajahan Jepang 26
2. Kebijakan Pemerintah Jepang 28
3. Sikap Umat Islam terhadap Penjajahan Jepang 30
C. Proklamasi Kemerdekaan 33
1. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan 33
2. Pembacaan Teks Proklamasi 36
3. Dampak Proklamasi Kemerdekaan 37
D. Segi Pedagogis 39

BAB III K.H. HASYIM ASY'ARI DAN PERJUANGAN MELAWAN KOLONIALISME 42
A. Biografi K.H. Hasyim Asy'ari 42
1. Latar Belakang Keluarga 42
2. Riwayat Pendidikan 47
3. Perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari dalam Organisasi

Nahdlatul Ulama 52
B. Perlawanan K.H. Hasyim Asy`ari terhadap Belanda 57
C. Perlawanan K.H. Hasyim Asy`ari terhadap Jepang 61
D. Segi Pedagogis 65

BAB IV RESOLUSI JIHAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP USAHA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN 67
A. Resolusi Jihad 67
1. Pengertian Resolusi Jihad 67
2. Dasar Resolusi Jihad 71
3. Sebab-sebab Munculnya Resolusi Jihad 1945 74
B. Fatwa Jihad K.H. Hasyim Asy'ari 79
C. Implikasi Resolusi Jihad K.H. Hasyim Asy'ari 83
D. Segi Pedagogis 95

BAB V PENUTUP 97
A. Simpulan 97
1. Simpulan Historis 97
2. Simpulan Pedagogis 98
B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 100
DAFTAR INDEKS 104

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan momentum paling bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan kolonial dan mengatur nasib bangsa sendiri. Proklamasi menjadi garis waktu bersejarah yang memisahkan masa kolonial dengan masa kemerdekaan, sekaligus menimbulkan tanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan. Penderitaan pada masa kolonial selama tiga abad lebih menjadi alasan utama untuk mempertahankan kemerdekaan dengan seluruh sumber daya yang ada, baik pemikiran, tenaga, dan jiwa. Seluruh anak bangsa tergerak untuk berjuang bersama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah membuka harapan rakyat Indonesia untuk dapat hidup sejajar dengan bangsa lain. Harapan tersebut membuat bangsa Indonesia yang baru tumbuh untuk menata sumber daya yang dimiliki agar dapat mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita perjuangan. Pasca proklamasi kemerdekaan, muncul kesadaran tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan dengan segenap kekuatan yang ada. Kesadaran tersebut didorong pula oleh semangat jihad umat Islam yang diwujudkan dengan mobilisasi laskar jihad dan pertahanan rakyat.

Usaha untuk mempertahankan kemerdekaan terlihat dari proses mobilisasi pemuda yang secara cepat dan spontan telah terjadi pada 1945, dan memberikan sumbangan penting bagi dorongan revolusioner perjuangan. Barisan-barisan Hizbullah yang telah terlatih dan berdisiplin terbukti secara militer Iebih unggul dan pasukan-pasukan gerilya non-regular. NU dan para pendukungnya memainkan peranan aktif dan radikal pada masa perjuangan, yang mungkin sulit dicocokkan dengan reputasi NU sebagai organisasi yang moderat dan kompromistis (Bruinessen: 1999, 57).

Usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan telah memunculkan banyak tokoh dan pahlawan dari berbagai daerah dan golongan. Dari kalangan umat Islam dan organisasi keagamaan,

muncul nama K.H. M. Hasyim Asy'ari sebagai salah satu ulama besar yang memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui basis pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama. K.H. M. Hasyim Asy'ari berperan penting dalam lahirnya resolusi jihad menjelang pertempuran 10 November di Surabaya.

Resolusi Jihad meminta pemerintah republik mendeklarasikan Perang Suci. Resolusi ini nampaknya merupakan pengakuan legitimasi bagi pemerintah dan sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya (Bruinessen: 1999, 60).

Resolusi jihad tidak dapat dipisahkan dari serangkaian peristiwa sejarah sebelumnya. Setelah melihat kemenangan Sekutu atas Jepang yang ditandai menyerahnya Jepang tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945, maka dapat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan secara *de facto* tanggal l7 Agustus 1945. Keesokan harinya, Indonesia menetapkan Undang-Undang dan Pemerintahan Indonesia serta Lembaga Legislatif pada waktu itu PPKI, sehingga dinyatakan merdeka secara *de jure*. Sementara, kesepakatan Sekutu dengan Jepang adalah selama Sekutu belum berada di Indonesia kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada Jepang. Semangat kemerdekaan menguat sehingga terjadi perjuangan rakyat hidup mati dalam mempertahankan kemerdekaan (Bustami: 2015, 138).

Pada 21-22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad (perang suci). Deklarasi ini, kemudian terkenal sebagai "Resolusi Jihad". Resolusi ini dipertegas kembali dalam Muktamar NU di Purwokerto 26-29 Maret 1946 Resolusi ini disebarkan ke seluruh Jawa melalui jaringan pesantren, langgar, dan kiai. Para pemuda santri mengalir deras memasuki Laskar Hizbullah, sementara para kiai membentuk Laskar Sabilillah, karena dibakar oleh semangat jihad. Diyakini bahwa resolusi ini mempunyai peran yang besar dalam pemberontakan 10 Nopember 1945 yang pecah di Surabaya (Salim: 2004, 156).

Resolusi jihad merupakan respon K.H. M. Hasyirn Asy'ari dan tokoh-tokoh NU terhadap perlunya mobilisasi dan persiapan rakyat untuk menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam *Netherlands Indies Civil Administration*

(NICA). Kondisi penduduk Surabaya semakin menuju kepada kesatuan semangat juang pada akhir bulan September dan Oktober 1945. Para pejuang di Srabaya memiliki kesamaan pandang bahwa kemerdekaan yang batu saja diperoleh mendapat ancaman oleh Belanda yang membonceng Sekutu. Kesamaan tekad ini yang membuat mereka terkondisikan daIam satu sikap bulat yakni akan menernpuh cara apapun untuk mempertahankan kemerdekaan, walaupun secara militer kalah dari kekuatan Inggris dan Sekutu.

Resolusi jihad kemudian tersebar luas dikumandangkan. oleh Bung Tomo dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar melalui Radio ketika memberi wejangan kepada para pejuang di Markas Kiai Blauran. Para Kiai dan utusannya terus membanjiri Surabaya dengan mendirikan markas di rumah K.H. Yasin di Blauran Gang IV/No. 2 Surabaya sehingga dikenal dengan sebutan Markas Kiai. Para santri dan umat Islam berjuang dengan dukungan fatwa K.H. Hasyim Asy'ari (Tebuireng) yaitu: Bagi sekalian orang Islam, yang dewasa untuk berjuang melawan musuh yang akan menjajah Indonesia kembali, hukumnya adalah *fardhu 'ain*. Fatwa selanjutnya adaIah mati di medan perang dalam rangka memerangi musuh umat Islam adalah mati syahid dan orang yang mati seperti itu akan masuk surga (Bustami 2015: 178).

Resolusi Jihad menjadi pegangan bagi kalangan Islam dalam melakukan perjuangan menghadapi NICA-Belanda dan pasukan Inggris. Konsul-konsul yang hadir dalam pertemuan di Bubutan Surabaya memiliki tugas dan amanah untuk menyebarkan resolusi ini kepada umat Islam di daerahnya masing-masing. Salinan keputusan Resolusi Jihad ini juga dikirimkan kepada Presiden Sukarno, pimpinan Angkatan Perang Indonesia, dan kepada Markas Tinggi Hizbullah dan Fisabilillah (Bizawie: 2014, 208).

Studi mengenai K.H. Hasyim Asy'ari dan resolusi jihad penting untuk menempatkan K.H. Hasyim Asy'ari pada saat sekarang adalah menemukan segi pedagogis peran dan kontribusinya dalam bidang dakwah dan perjuangan melawan kolonial. Hal itu dilakukan tidak lain untuk mengetahui semangat hidup di zamannya, sehingga dapat melihat dan mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di zamannya.

Menurut peneliti setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi alasan pentingnya penelitian tentang K.H. Hasyim Asy`ari dan resolusi jihad. Aspek pertama melihat kedahsyatan pertempuran 10 November 1945 sebagai fakta sejarah yang mencakup beberapa peristiwa penting, seperti kecepatan mobilisasi rakyat, terbentuknya laskar-laskar jihad, ketidak seimbangan meliter Sekutu dan Indonesia, banyaknya jumlah korban di pihak rakyat, dan semangat heroik rakyat Surabaya.

Aspek kedua yang penting menurut peneliti adalah dalam setiap perlawanan besar, terlebih dengan ketimpangan secara militer, membutuhkan simbol pemersatu, baik berupa ide, dan gagasan, maupun tokoh representatif yang mewakili pihak pejuang. Dalam hal ini K.H. Hasyim Asy`ari tampil sebagai tokoh yang mewakili mayoritas umat Islam, dengan gagasan resolusi jihad yang menyatukan semua unsur umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dampak dari Resolusi Jihad luar biasa. Pertempuran 10 November di Surabaya berlangsung dengan begitu heroik dan sengit, sehìngga membuat pasukan Inggris kewalahan. Selain itu kekuatan para pejuang yang sudah sangat solid dan padu kemudian mendapatkan tambahan dengan hadirnya badan-badan perjuangan baik dari kalangan Islam dari luar kota Surabaya yang datang ke kota ini untuk bersama-sama menghadapi Inggris.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam upaya mempertahankan kemerdekaan diperlukan simbol pemersatu, baik berupa ide, dan gagasan, maupun tokoh representatif yang mewakili pihak pejuangan. Dalam hal ini K.H. Hasyim Asy`ari tampil sebagai tokoh yang mewakili mayoritas umat Islam, dengan gagasan resolusi jihad yang menyatukan semua unsur umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Namun, demikian konsep resolusi jihad kurang dikenal dan kurang mendapat porsi pembahasan terkait peristiwa 10 November 1945 di dalam penulisan sejarah Indonesia.

Permasalahan peneliti ini akan fokus pada pembahasan latar belakang munculnya resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari 1945, konsep resolusi jihad yang difatwakan oleh K.H. Hasyim Asy`ari, implikasi resolusi jihad terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari 1945, mendeskripsikan isi resolusi jihad yang difatwakan oleh K.H. Hasyim Asy`ari, mendeskripsikan implikasi resolusi jihad dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dengan adanya buku ini semoga mampu membantu dan memberikan informasi tentang fatwa resolusi jihad, implikasinya terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan kontribusi di lapangan bagi peneliti lain, instansi serta organisasi masyarakat dalam rangka menggali kembali semangat jihad umat Islam dalam mengisi kemerdekaan.

Penelitian tentang K.H. Hasyim Asy`ari dan resolusi jihad telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan beberapa penelitian relevan terdahulu, dan persamaannya dengan penelitian ini, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Yuliah (2012) melakukan penelitian berjudul "*Resolusi Jihad Kyai Haji Hasyim Asy'ari (Fatwa Jihad Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Implikasinya dalam Perang 10 November 1945 di Surabaya*) Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon" Penelitian tersebut menjelaskan K.H. Hasyim Asy`ari sebagai tokoh utama pencetus resolusi jihad, sebagai reaksi terhadap pendaratan Sekutu di Surabaya yang membonceng NICA. Selain itu K.H. Hasyim Asy`ari menilai sikap pemerintah RI kurang tegas dalam menghadapi pendaratan Sekutu yang membonceng NICA, mengingat proklamasi kemerdekaan secara *de jure* telah memberi kedaulatan wilayah Indonesia. Penelitian tersebut dengan penelitian ini mempunyai persamaan yang terletak dari tiga aspek yaitu: pembahasan tentang K.H. Hasyim Asy`ari dalam penelitian di atas kurang mendalam dalam membahas pemikiran jihad K.H. Hasyim Asy`ari yang sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial, baik pada masa penjajahan Belanda, maupun Jepang. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk membahas lebih mendalam jejak pemikiran jihad K.H. Hasyim Asy`ari sejak masih muda ketika menuntut ilmu di Mekkah.

Yusrianto (2014), melakukan penelitian dengan judul "*Pemikiran Politik dan Perjuangan KH. M. Hasyim Asy'ari Melawan Kolonialisme*",

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian tentang K.H. Hasyim Asy`ari dan perlawanan melawan kolonialisme. Penelitian di atas cukup mendalam dalam membahas tentang peran Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam perjuangan melawan kolonial. K.H. Hasyim Asy`ari dalam penelitian di atas disebut tokoh yang mewakili kalangan Islam tradisional berbasis pesantren dengan pemikiran pemikiran jihad yang berdasarkan literatur *fiqih* pesantren. Dalam penelitian di atas juga disebutkan pemikiran politik K.H. Hasyim Asy`ari yang diwujudkan dengan membentuk organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama.

Gugun El-Guyanie (2010), melakukan penelitian dengan judul "*Resolusi Jihad Paling Syar'i*". Di dalam kajiannya pembahasan tentang resolusi jihad mempunyai persamaan dengan penelitian ini, yang terletak pada kajian tentang implikasi resolusi jihad terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa resolusi jihad berimplikasi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia, ada dua dampak yaitu dampak dampak politik dan dampak militer. Sedangkan dalam penelitian ini implikasi resolusi jihad itu berdampak terhadap semangat jihad yang telah difatwakan oleh KH. Hasyim Asy'ari bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yang puncak pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

B. Pendekatan Kajian

Upaya mengungkap peristiwa dalam penulisan sejarah, memerlukan pendekatan multidimensional agar permasalahan yang diteliti dapat diungkapkan secara komprehensif.

Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan dalam meninjau serta mengupas suatu permasalahan. Dari segi mana peneliti memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur apa

mana yang diungkapkan. Hasil pelukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai (Kartodirdjo, 1993: 4). Untuk memperjelas analisis, dalam proses penulisan sejarah, aplikasi metode dan teori sejarah perlu ditunjang oleh teori atau konsep ilmu-ilmu sosial yang relevan. Dengan kata lain, perlu dilakukan penulisan sejarah yang dituntut memberikan eksplanasi mengenai masalah yang terbatas, perlu dilakukan secara interdisipliner dengan menggunakan pendekatan multidimensional (*multidimensional approach*).

Pendekatan politik menurut Noer (1955:6) "adalah segala usaha, tindakan atas suatu kejadian manusia yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara dengan bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah dan mempertahankan suatu bentuk sususan masyarakat." Pendekatan politik digunakan untuk memperoleh gambaran tentang peranan dan kedudukan K.H. Hasyim Asy`ari dalam pandangan politik kolonial.

Pendekatan antropologi menggambarkan suatu bagian sejarah daerah manusia itu. Lingkungan hidup, cara kehidupan keluarga, pola pemukiman, sistem politik dan ekonomi,agama, gaya kesenian dan berpakaian, segi-segi umum hahasa, dan sebagainya (Ihromi: 2010, 3). Pendekatan antropologis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui biografi, silsilah dan keterunan K.H. Hasyim Asy`ari sebagai tokoh utama dalam penelitian ini.

Pendekatan sosiologi mengkaji segi-segi sosial dan budaya dalam suatu peristiwa yang dikaji, misalnya golongan sosial yang berperan, nilai yang berlaku, konflik yang berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain-lain. (Kartodirjo: 1993, 5). Pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi sosial rakyat Indonesia, khususnya umat Islam pasca kemerdekaan dan menjelang meletusnya perang 10 November 1945.

C. Kerangka Berpikir dan Konsep-konsep Dasar

1. Kerangka Berpikir

Kerangka kajian disusun berdasarkan pokok pembahasan dalam penelitian yang dimulai dari pendudukan Sekutu yang membonceng NICA di Surabaya, yang menimbulkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Hal ini mendorong proses lahirnya resolusi

jihad yang digagas oleh K.H. Hasyim Asy`ari. Dalam prosesnya resolusi jihad berdampak pada mobilisasi masif kekuatan rakyat dan laskar jihad, seperti Sabilillah dan Hizbullah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, yang terwujud dalam semangat heroik rakyat dalam mempertahankan kemerdekan di Surabaya pada peristiwa 10 November 1945.

2. Konsep-Konsep Dasar

Konsep-konsep dasar dalam kajian ini diperlukan untuk memperoleh gambaran secara tepat dalam kajian.

a. Konsep Resolusi Jihad

Resolusi Jihad meminta pemerintah republik mendeklarasikan Perang Suci (*Fisabilillah*). Resolusi ini nampaknya merupakan pengakuan legitimasi bagi pemerintah dan sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya (Bruinessen: 1999, 60).

Resolusi jihad dikumandangkan pada tangal 22 Oktober 1945. dan dikukuhkan dalam Muktamar XVI NU di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946. Resolusi jihad melawan penjajah hukumnya adalah *fardhu ain*. Hal tersebut menegaskan sikap NU untuk membela kernerdekaan dan upaya kolonial yang akan merebut kembali kemerdekaan Indonesia (Ghofar: 2016, 155).

Resolusi jihad menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (jihad). Berjuang menentang kembalinya Tentara Sekutu termasuk Belanda dinyatakan sebagai kewajiban setiap muslim Resolusi itu, berarti penolakan terhadap kembalinya kekuatan kolonial dan mengakui kekuasaan suatu pemerintah Republik baru (Hasyim dan Ridwan: 2004, 21).

Berdasarkan uraian di atas resolusi jihad adalah sebuah keputusan atau deklarasi para ulama NU sebagai bagian dari usaha atau perjuangan dalam mempertahankan kemedekaan Indonesia, dimana dikeluarkan dengan maksud menentukan/mengukuhkan kesatuan sikap dan tindakan nyata dan sepadan tehadap setiap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara, berkaitan dengan kolonialisme

di Indonesia. Dengan Resolusi ini diharapakan perjuangan yang bersifat *fii sabilillah* tetap dilanjutkan untuk tegaknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), kemerdekaan dan agama Islam.

b. Konsep Kyai

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak terlepas dari peran kyai sebagai pemimpin agama di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan.

Kyai hakikatnya adalah seseorang yang diakui oleh masyarakat karena keahlian keagamaan, kepemimpinan dan daya pesonanya atau karismanya. Melalui kelebihan-kelebihan itu kyai dapat mengarahkan perubahan-perubahan sosial di lingkungannya, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan bermutu (Halim: 2005, 79).

Kyai merupakan figur utama di dalam pesantren. Di dalam dirinya terdapat beberapa kemampuan; sebagai perancang (arsitektur), pendiri dan pengembang (*developer*), dan sebagai pimpinan dan pengelola (*leader* dan *manager*) Pesantren (Dacholfany :2015, 49).

Menurut (Ali: 2011, 170) bahwasannya "Kyai juga digunakan untuk memberikan gelar kehormatan kepada para ulama oleh karena itu sering dijumpai di masyarakat panggilan untuk orang-orang terhormat seperti Ki Ageng dan kyai haji. Berdasarkan uraian di atas, penyebutan kyai mengandung pengertian penghormatan kepada orang-orang yang terhormat. Gelar kyai diperoleh karena kelebihan yang dimiliki, seperti kelebihan moral dan intelektual di lingkungan pesantren. Kelebihan kyai terletak pada keluasan ilmu agama Islam dan standar moralitas yang tinggi. Kyai pesantren mampu menggerakkan semangat jihad umat Islam dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam perjuangan.

c. Konsep Santri

Selain kyai sebagai tokoh utama perjuangan umat Islam, peran santri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga tidak dapat diabaikan. Di bawah pengaruh Kyai, santri

menjadi kader-kader perjuangan yang militan yang tergabung dalam berbagai wadah perjuangan, seperti *sabilillah* dan laskar jihad lainnya.

Pengertian santri diturunkan dari kata Sansekerta "*shastri*" yang dalam pemakaian bahasa modern memiliki arti sempit dan luas. Arti sempit ialah seorang pelajar sekolah agama di pesantren, sedangkan arti luas dan lebih umum kata santri mengacu pada seorang anggota bagian penduduk Jawa yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh (Tafsir: 2015, 30).

Menurut C. Berg dalam Umar (Umar: 2014, 3) kata santri berasal dari bahasa India (Sansekerta) sasthri yang berarti orang yang tahu kitab-kitab suci, atau seorang ulama dalam pengertian Islam Indonesia. kata sasthri merupakan turunan dari kata sasthra yang berarti kitab suci karya keagamaan atau ilmiah.

d. Konsep Kolonialisme

Kolonialisme adalah praktek sosial yang diizinkan (dilegalkan) negara di wilayah-wilayah asing dieksploitasi bahan-bahan mentahnya, diciduk budaknya, dan tenaga kerjanya dipakai oleh pemerintah kolonial atau kepentingan komersial. Dalam pengertian tertentu, kolonialisme berfungsi sebagai bagian dari ekspansi kapitalis global pada tahap awalnya, di mana pada saat bersamaan dunia non-Barat berfungsi pertama-tama sebagai sumber material dan tenaga kerja. Jika kolonisasi dirumuskan sebagai bentuk eksploitasi secara sistematik atas wilayah-wilayah asing, dekolonisasi adalah proses di mana si terjajah mulai mengusir keluar si penjajah dan kemudian si terjajah ini mengorganisasikan hasrat kebebasan mereka menjadi gerakan kemerdekaan nasional (Sutrisno dan Putranto: 2004,178).

Kolonialisme ditinjau dan kepentingan negara induk adalah nasionalisme yang diterapkan di negara orang lain demi kepentingan/keagungan negara induk. Akibat penghisapan kolonialisme terhadap rakyat jajahan, dapat timbul kemerosotan moral sedemikian rupa sehingga rakyat jajahan itu merasakan ketidakmampuan untuk bangkit sebagai bangsa yang merdeka, bahkan karenanya malah mencintai kolonialisme itu sendiri,

merasa senang hidup di bawah pimpinan kolonialis dan takut mengurusi negaranya sendiri (Muljana: 2008, 8).

Batasan konsep kolonialisme diperlukan dalam penelitian sebagai landasan dalam rangkaian pembahasan tentang resolusi jihad. Hal ini karena resolusi jihad merupakan respon terhadap upaya Belanda kembali menjajah Indonesia.

e. Konsep Nasionalisme

Nasionalisme adalah manifestasi kesadaran bernegara atau semangat bernegara (Muljana: 2008, 3). Menurut Moesa (2007: 29) Nasionalisme adalah *supreme loyality* terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan itu muncul karena adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Pada kebanyakan kasus, hal itu terjadi karena kesamaan keturunan, bahasa atau kebudayaan. Akan tetapi, ini semua bukanlah unsur yang subtansial sebab yang paling penting dalam nasionalisme adalah adanya "kemauan untuk bersatu" (*a living and active coorporate will*).

Konsep nasionalisme merupakan salah satu pijakan teori dalam penelitian dalam menganalisis upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme berbaur dengan semangat jihad dalam upaya mempertahankan kemerdekaan.

f. Konsep Kebangkitan Nasional

Kebangkitan nasional merupakan masa bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa itu diawali peristiwa penting, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggai 20 Mei 1908. Momen kebangkitan nasional dapat dimanfaatkan untuk refleksi terhadap perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan yang telah dilakukan oleh para pendahulu yang telah mengorbankan diri untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kedaulatan negeri (Handayani: 2008, 125).

Pembahasan tentang kebangkitan nasional diperlukan dalam memperluas kajian tentang resolusi jihad. Masa kebangkitan nasional merupakan rentang waktu dalam sejarah perjuangan melawan kolonial yang berkaitan dengan upaya memperjuangkan kemerdekaan.

g. Konsep Kemerdekaan

Secara etimologis kata kemerdekaan terdiri dan suku kata dasar merdeka, yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an. Merdeka mempunyai arti bebas (dan penghambaan, penjajahan, dan lain sebagainya) berdiri sendiri, tidak terkena, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu, dan leluasa. Kemerdekaan (kata keadaan) yang berarti: (hal) berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan lain sebagainya), dan kebebasan adalah hak segala bangsa (Hamidi dan Lutfi: 2010, 6).

Sanit dalam Hamidi dan Lutfi (2010: 8) mengartikan kemerdekaan sebagai kebebasan dan kedaulatan rakyat. Secara internal berarti hak suatu bangsa untuk menyatakan berdirinya sebuah negara bagi segenap rakyatnya dan secara eksternal berarti mulai berlakunya hukum untas batas negara. Menurut Nurcholis Madjid, dalam Hamidi dan Lutfi (2010: 8) secara transendental, kemerdekaan Indonesia juga dapat ditarik dalam semangat tauhid, Ketuhanan YME, sebab manusia memperoleh kemerdekaan secara hakiki karena terbebas dan segala bentuk penghambaan oleh sesama makhluk.

Kemerdekaan merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia yang memiliki keterkaitan erat dengan resolusi jihad. Hal ini karena resolusi jihad bertujuan untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.

C. Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah (historis), "Metode sejarah sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematik didesain untuk membantu secara efektif agar dapat mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis-sintesis hasil-hasil yang telah dicapainya

dan ditampilkan dalam bentuk tertulis" (Garragan dalam Daliman, 2012: 27).

Berdasarkan pendapat di atas, metode sejarah merupakan desain penelitian yang menekankan pada sumber–sumber sejarah, untuk melakukan kajian dan analisa secara kritis mengenai sumber–sumber sejarah yang diteliti sehingga hasil yang diperoleh dapat disampaikan secara tertulis dengan penuh ketelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan melakukan studi kepustakaan. Metode sejarah adalah deskripsi yang terpadu dari keadaan-keadaan atau fakta-fakta masa lampau yang ditulis berdasarkan penelitian serta studi yang kritis untuk mencari kebenaran.

Metode penelitian sejarah dapat diartikan sebagai metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Metode sejarah dapat digunakan sebagai metode penelitian yang pada prinsipnya bertujuan untuk menjawab enam pertanyaan atau *5W* dan *1H*.

Dalam metode sejarah ada empat tahapan yang harus dilakukan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1. Heuristik

Tahapan heuristik adalah tahapan pengumpulan sumber, peneliti harus menjelaskan sumber-sumber apa yang dibutuhkan. Tahapan ini merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani dan memerinci Bibliografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan (Abdurahman: 2007, 63). Heuristik, maksudnya adalah tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan topik/judul penelitian.

Untuk melacak sumber tersebut, sejarawan harus dapat mencari di berbagai dokumen baik melalui metode kepustakaan atau arsip nasional. Sejarawan dapat juga mengunjungi situs sejarah atau melakukan wawancara untuk melengkapi data sehingga diperoleh data yang baik dan lengkap, serta dapat menunjang terwujudnya sejarah yang mendekati kebenaran. Masa lampau yang begitu banyak periode dan banyak bagian-bagiannya

(seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya) memiliki sumber data yang juga beraneka ragam sehingga perlu adanya klasifikasi data dari banyaknya sumber tersebut.

Langkah-langkah dalam menemukan sumber data tersebut adalah:

a. Mencari buku-buku literatur, surat resmi, diktat hasil penelitian atau makalah, dokumentasi-dokumentasi, dan catatan-catatn lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Membaca buku artikel atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

2. Kritik

Suatu penelitian agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka harus didukung oleh data-data yang tepat. Oleh karena itu, untuk menguji kebenaran suatu data maka akan dilakukan dengan mengkritik sumber data. Di dalam penelitian ini kritik yang digunakan yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kedua kritik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern berkenaan dengan proses pengujian keaslian bahan atau material (asli atau palsu atau merupakan salinan atau *copy*) (Zed: 2004, 72).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kritik ekstern adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memastikan kebenaran sumber data yang digunakan, dimana kritik ekstern berfungsi untuk mengecek tentang kebenaran suatu data yang memang akan kita kehendaki, dan kritik ektern dimaksudkan untuk mengetahui apa sumber data tersebut asli apa sudah tiruan, mungkin juga bentuknya masih utuh atau sudah berubah sehingga dari hal tersebut peneliti memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Adapun langkah-langkah kritik ekstern adalah sebagai berikut:

1. Mengecek kecocokan antara judul penelitian dengan judul sumber data.
2. Mengecek kesamaan secara kronologi antara judul penelitian dengan peristiwa yang ditulis dalam sumber data.

b. Kritik Intern

Keabsahan sumber data ditingkat validitasnya tidak hanya menggunakan kritik ekstern, akan tetapi harus dilanjutkan dengan kritik intern sebagai langkah mengetahui kebenaran isi sumber data yang digunakan.

Menurut Zed (2004: 27) Kritik intern berkenaan dengan proses pegujian kebenaran isi (*content*), yaitu menguji kesahihan pernyataan-pernyataan dalam teks.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan kritik intern adalah mengevaluasi kebenaran fakta dan konsep sejarah yang ditulis dalam sumber. Dalam kegiatan penelitian ini kritik intern dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Membaca dan mempelajari secara cermat suatu sumber data untuk memastikan kesesuain dan kebenaran suatu peristiwa yang tertuang dalam buku dengan sumber data yang dipilih
2) Memastikan kesesuaian tentang kurun waktu dari suatu peristiwa yang diuraikan dalam buku sumber dengan judul dan tahun penelitian.
3) Berusaha untuk mempeoleh data yang benar-benar valid sebagai acuan dalam melakukan penelitian.
4) Berusaha menemukan konsep-konsep yang dapat mendukung tentang teori variabel yang ada berdasarkan kronologis yang ada.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan usaha menentukan/menetapkan makna dan fakta-fakta yang diperoleh. Hal ini dikemukakan oleh Notosusanto (1984:38) bahwa "Interpretasi merupakan langkah penetapan makna yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh".

Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa, fakta sejarah, dan merangkai suatu fakta dalam kesatuan yang masuk akal. Penafsiran fakta harus bersifat logis terhadap keseluruhan konteks peristiwa sehingga berbagai fakta yang lepas satu sama lainnya dapat disusun dan dihu-bungkan menjadi satu kesatuan yang masuk akal.

Bagi kalangan akademis, agar dapat menginterpretasi fakta dengan kejelasan yang objektif, harus dihindari penafsiran yang semena-mena karena biasanya cenderung bersifat subjektif. Selain itu, interpretasi harus bersifat deskriptif sehingga para akademisi juga dituntut untuk mencari landasan interpretasi yang mereka gunakan. Proses interpretasi juga harus bersifat selektif sebab tidak mungkin semua fakta dimasukkan ke dalam cerita sejarah, sehingga harus dipilih yang relevan dengan topik yang ada dan mendukung kebenaran sejarah.

Interpretasi sering disebut juga dengan analisis data dalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, lapangan atau dokumentasi (Saebani: 2008, 199). Dalam hal ini ada dua metode yang digunakan, yaitu *pertama*, analisis (menguraikan). Menguraikan data yang berasal dari beberapa sumber contohnya silsilah keturunan K.H. Hasyim Asy`ari, pendidikan beliau dan juga kehidupan politik yang dijalaninya selama beliau hidup. *Kedua,* sintesis (menyatukan) data yang sudah ada sehingga data yang sudah didapat sinkron dengan fakta sebenarnya (Abdurahman: 2007,73).

Dalam penelitian ini proses interpretasi sejarah "peran K.H. Hasyim Asy`ari dalam resolusi jihad, sebab-sebab terjadinya resolusi jihad dan implikasinya terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

4. Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan sejarah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal sampai akhir (Abdurahman: 2007, 77).

Historiografi merupakan metode pengembangan sejarah sebagai disiplin akademis, dan secara luas merupakan setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Sesudah menentukan judul, mengumpulkan bahan-bahan/sumber serta melakukan kritik dan seleksi, maka peneliti memulai penulisan tentang peran K.H. Hasyim Asy`ari dalam resolusi jihad, sebab-sebab terjadinya resolusi jihad dan implikasinya terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

BAB II
SITUASI DAN KONDISI SEBELUM KEMERDEKAAN PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

A. Kebangkitan Nasional

1. Masa Awal Kebangkitan Nasional

Kebangkitan nasional mencerminkan bangkitnya kesadaran, semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama masa penjajahan. Dalam masa ini muncul sekelompok masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan karena penindasan dan penjajahan.

Kekuasan bagi penjajah adalah kemegahan yang lahir dari kekuatan dan akal. Kekuasaan ini membawa kenikmatan. Oleh karena itu, penjajah ingin mengabadikan ikatan rantai kekuasaan. Akan tetapi, bagi rakyat yang dijajah, rantai pengikat itu merupakan paksaan yang menyerimpungi kebebasan bertindak dan membawa kesengsaraan. Ini adalah bukti kelemahan tenaga dan sekaligus hinaan sebagai makhluk. OIeh karena itu, rakyat jajahan akan berusaha secepatnya mematahkan rantai kekuasaan itu. Rantai kekuasaan makin hari makin kuat mengikat rakyat ikatan itu tidak akan lepas jika tidak dipatahkan dengan paksa. Untuk mematahkannya, diperlukan banyak tenaga. Tenaga itu hanya diperoleh dari kekuatanya sendiri karena tidak ada kekuatan yang dapat diharapkan dari luar.

Pada masa peralihan dari abad ke-19 ke abad ke-20, politik etis berkembang hampir bersamaan dengan arah baru dalam politik kolonial partai-partai Belanda. Arah baru itu lebih pantas disebut dengan politik kolonial daripada pendidikan moral. Politik etis disebut juga dengan politik paternalisasi atau perlindungan, karena rakyat Indonesia lebih dianggap sebagai objek daripada sebagai partisipan yang aktif dalam pemerintahan. Dalam hal ini peranan bangsa indonesia tetap pasif dan seperti yang dikatakan oleh Boeke, sebuah

pemerintahan "*Chez vous, sur vous, sans vous*"' (Muttaqin, dkk: 2011 6).

Kontrol Belanda atas Nusantara tidaklah mudah. Selama tiga setengah abad keberadaannva, Belanda menghadapi ratusan pemberontakan dan puluhan lusin konflik sosial dan perang. Resistensi terhadap pemerintahan kolonial datang dan beragam etnis, suku, dan agama (Vlekke: 2011, x). Sifat perlawanan terhadap kolonial bersifat kedaerahan, kesukuan dan belum mencerminkan perlawanan kebangsaan yang didorong semangat kesatuan nasional.

Reaksi pada masa-masa sebelum tahun 1905 dicetuskan dengan perlawanan senjata dan dilakukan oleh berbagai pahlawan nasional, seperti Sultan Agung Mataram, pangeran di Ponogoro, Teuku Cik Ditiro, dan lain-lainnya, tetapi perlawanan mereka gagal. Hal ini telah membuktikan nyata bahwa semangat nasional telah lama bergejolak pada dada bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap penderitaan lahir dan batin akibat kolonialisme ini. Kegagalan perlawanan bersenjata oleh beberapa pejuang telah menyadarkan para pemimpin bangsa untuk mengubah taktik dan cara-cara perlawanan. Salah satunya adalah yang disebut dengan gerakan emansipasi. Gerakan ini pada hakikatnya merupakan penjelmaan kebangkitan suatu bangsa dan cita-cita (Muttaqin, dkk: 2011).

Kepulauan Indonesia seluruhnya sebagai suatu bentuk kesatuan-politik yang disebut Hindia Belanda atau *Nederlands-Indie* dijajah sejak 1915 sampai 17 Agustus 1945. Sebelum 1915 penjajahan Belanda belum merupakan suatu bentuk kesatuan politik, tetapi terpencar-pencar di daerah-daerah (Ali: 2005, 194).

Kebangkitan nasional merupakan upaya sadar dan terencana masyarakat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Barat pada saat itu. Kebangkitan nasional juga bisa diartikan sebagai suatu fase permulaan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan tanpa adu senjata, yang dimotori oleh organisasi Budi Utomo.

Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan dr. Wahidin Sudirohusodo. Walaupun Budi Utomo masih dengan corak kesadaran lokal yang tercermin dan tujuannya, yaitu memajukan dan membangkitkan masyarakat dan kebudayaan Jawa, terutama melalui pendidikan, Budi Utomo membawa peran penting bagi pemuda waktu itu. Organisasi ini mencoba membantu orang-orang muda yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang lebih tinggi (Muttaqin, dkk: 2011, 18).

Berdasarkan uraian diatas, bahwa sebelum tahun 1908 perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda berlangsung secara sporadis atau individual dan tidak serentak karena belum adanya organisasi-organisasi untuk menyatukan para rakyat. Perlawanan dipimpin oleh pimpinan kharismatik sehingga tidak ada yang melanjutkan, dan sebagian elemen bangsa Indonisia berhasil di adu-domba oleh Belanda. Perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908 lebih menekankan saluran organisasi, bukan lagi menggunakan kekerasan. Rasa persatuan dan kebangsaan sudah mulai tumbuh, sehingga perjuangan tidak bersifat kedaerahan lagi. Selain itu, tampil tokoh-tokoh inetelektual dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, yang memiliki ide dan wawasan kebangsaan.

2. Tokoh-tokoh Kebangkitan Nasional

Gerakan kebagkitan nasional digerakkan oleh beberapa tokoh melalui organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, politik, dakwah dan kebudayaan. Tokoh-tokoh tersebut mewakili masyarakat terpelajar, dan Islamis yang memiliki wawasan perjuangan berdasarkan keilmuan dan kesadaran nasional. Tokoh-tokoh yang muncul pada masa awal kebangkitan nasional seperti Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohusodo, Douwes Dekker, dan R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara).

Kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya beberapa wadah perjuangan dan organisasi yang bergerak di bidang

pendidikan, penyadaran masyarakat terhadap nasionalisme kebangsaan dan gerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi-organisasi tersebut seperti Budi Utomo, Syarekat Islam, dan *Indische Partij*.

Budi Utomo, adalah organisasi pergerakan nasional pertama yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti, Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Cipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo tidak mengadakan kegiatan politik. Kegiatan Budi Utomo ditujukan pada bidang pendidikan dan budaya. Pusat kegiatan organisasi BU di Jogjakarta (Iramdhan: 2017, 81).

Pada tanggal 20 Mei 1908, berlangsung rapat sejumlah warga anak jajahan, (Hindia Belanda) yang terdidik-tercerahkan di Sekolah Dokter Jawa (STOVIA). Hasil rapat itu ialah dibentuknya sebuah organisasi (modern) dengan nama: Boedi Oetomo. Maka dimulailah sebuah proses perjuangan yang baru, dengan cara baru. Bentuk perlawanan baru itu menggunakan strategi otak. Berbeda dengan abad ke-17, 18, dan 19 yang melakukan perjuangan perlawanan berperang dengan menggunakan senjata seadanya, termasuk senjata-senja tradisional seperti parang, kelewang, pedang, dan meriam butut, dalam menghadapi tentara pemerintah kolonial cara ini yang disebut strategi otot (Sularto dan Yunarti: 2010, xii).

Organisasi lain yang muncul pada masa kebangkitan nasional adalah *Sarekat Islam* (SI). *Organisasi tersebut* pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911, dengan tujuan untuk membela kepentingan para pedagang Indonesia dari ancaman saingan para pedagang Cina. Namun atas usulan H.O.S. Cokroaminoto, SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada 18 September 1912, hal ini dilakukan agar mendapatkan anggota banyak dan menjadi organisasi yang tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, namun bergerak dalam bidang lainnya seperti politik. Pada awal perkembangannya, SI bukanlah partai politik dan tidak melawan pemerintah Hindia Belanda, kemudian dalam perkembangannya

SI menjelma menjadi sebuah partai politik yang besar dan dianggap sebagai sebuah ancaman bagi pemerintah kolonial. Memasuki tahun 1920 SI mengalami perpecahan karena disusupi oleh paham komunis. SI Putih (SI Sayap Kanan), berpusat di Jogjakarta, pemimpinnya adalah H. Agus Salim, H.O.S. Cokroaminoto, Abdul Muis. SI Merah (SI Sayap Kiri), berpusat di Semarang, pemimpinnya adalah Soemaun, Alimin dan Darsono.

Pada tahun 1921 Haji Agus Salim melalui Partai Sarekat Islam melancarkan gerakan Pan-Islamisme. Maksudnya adalah untuk mencari hubungan dan menghimpun segala kekuatan Islam yang ada di Indonesia. Dengan pelancaran gerakan itu, Partai Sarekat Islam mempunyai watak internasional. Kongres Al-Islam yang pertama diadakan di kota Cirebon di bawah pimpinan Cokroaminoto dan Agus Salim. Kongres Al-Islam yang pertama membahas soal *furu`* (cabang) dan *khilafiyah* (perbedaan) yang maksudnya untuk mengurangi perselisihan tentang soal-soal *furu`* 'dan *khilafiyah*. Kongres Al-Islam yang pertama itu berusaha untuk mencari jalan, bagaimana akan mewujudkan kerja sama yang baik antara kaum muslimin. Kongres Al-Islam yang kedua bersama dengan pengurus besar Muhammadiyah. Dalam kongres itu, Agus Salim membahas fungsi agama dan ilmu pengetahuan serta hubungan Islam dengan sosialisme. Tidak lupa juga ia mengecam kapitalisme. la menyerukan betapa penting persatuan Islam dan fungsi Majelis Ulama. Kongres Al-Islam luar biasa diselenggarakan di Surabaya yang dihadiri Oleh orang-orang Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan golongan Islam lainnya. Agus Salim menguraikan nasionalisme berdasarkan Islam: memajukan nusa dan bangsa berdasarkan cita-cita Islam (Muljana: 2008, 131).

Organisasi lain yang muncul pada masa kebangkitan nasional adalah *Indische Partij (IP),* didirikan oleh *Tiga Serangkai*, yaitu Douwes Dekker, RM Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Cipto Mangunkusumo pada 25 Desember 1912. IP merupakan partai politik pertama di Indonesia yang bercita-cita mencapai Indonesia merdeka (Iramdhan: 2017, 81). Dalam perkembangannya, tahun 1913 Indische Partij mengusungkan

kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk mendapatkan pengesahan supaya menjadikan IP berbadan hukum. Akan tetapi ketika pemerintah Hindia-Belanda mengetahui pergerakan IP ini, kemudian Gubernur Jenderal Idenburg menolak Anggaran Dasar IP dengan surat keputusan tanggal 4 Maret 1913. Dengan alasan, IP merupakan perkumpulan partai politik dan hendak merusak keamanan umum serta mampu membangkitkan nasionalisme rakyat yang bergerak dalam kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Setelah itu semua, pemimpin IP atau yang dikenal Tiga Serangkai diasingkan di Belanda tanggal 6 September 1913. Dengan diasingkannya ketiga pemimpin tersebut, maka IP tidak berperan kembali.

Dalam periode sejarah kebangkitan nasional, medan sejarah daerah Jawa Timur ternyata telah menghasilkan tokoh-tokoh pejuang dan peristiwa-peristiwa sejarah yang menentukan jalannya sejarah perjuangan bangsa Indonesia terhadap imperialisme Belanda. dr. Sutomo (lahir di desa Ngepeh-Nganjuk), H.O.S. Tjokroaminoto (lahir di kawedanan Kleco-Madiun), E.F.E. Douwes Dekker (lahir di Kabupaten Pasuruan), Ir. Sukarno (lahir di kota Surabaya) adalah tokoh-tokoh Jawa Timur yang mempunyai peranan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme Belanda (Depdikbud: tt, 2).

Berdasarkan uraian di atas, kelahiran Budi Utomo menjadi tonggak tumbuhnya semangat perjuangan, sekaligus menjadi inspirasi berdirinya berbagai organisasi di seluruh pelosok tanah air, baik yang bersifat kedaerahan, politik, keagamaan, serikat pekerja, kewanitaan maupun kepemudaan. Pada kurun selanjutnya muncul sejumlah organisasi seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan berbagai organisasi lainnya. Hal ini mewarnai awal kebangkitan nasional yang mencapai puncaknya pada tahun 1928. Kebangkitan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, sedangkan kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda.

3. Dampak Kebangkitan Nasional

Dampak kebangkitan nasional mulai dirasakan oleh semua rakyat Indonesia pada saat itu, dimana ditandai Munculnya kesadaran tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, perasaan senasib sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat lepas dari cengkeraman imperialisme di seluruh negara-negara jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Fase tumbuhnya anti imperialisme tersebut berkembang bersamaan dengan dipengaruhi oleh lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan internasional serta mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru dalam kehidupan bernegara yang lahir di Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme melalui pendidikan formal dari negara-negara Barat.

Gerakan kebangkitan nasional, mendapat respon dari kalangan umat Islam. Pimpinan Islam semakin menyadari tentang keterkucilannya dan perkembangan-perkembangan politik maupun budaya, dan menghadapi rezim kolonial yang semakin bersikap memusuhi, akhirnya meredalah pertikaian-pertikaian sengit antara golongan tradisional dan modernis. Kaum modernis menyadari bahwa pemurnian yang mereka inginkan akan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan kaum tradisional menyadari bahwa kaum modernis tidak akan hilang dan lingkungannya. Pihak tradisional juga mulai menerima banyak dan pembaharuan yang disodorkan oleh kaum modernis yang tidak mengancam dominasi mazhab Syafi'i atau pemahaman keimanan mereka yang agak lebih fleksibel (Muttaqin, dkk: 2011 39).

Nadlatul Ulama dan Muhamadiyah sebagai perwakilan kaum tradisional dan modernis telah menyadari pertikaian-pertikaian tersebut yang tidak ada ujungnya. Pada bulan September 1937, para pemimpin Nadlatul Ulama dan Muhamadiyah memprakarsai pembentukan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang merupakan dewan Islam tertinggi Indonesia. Persatuan Islam, al-Irsyad, dan hampir semua organisasi Islam lain di seluruh Indonesia segera bergabung ke

dalam MIAI. MIAI tidak bertujuan untuk menjadi lembaga politik, tetapi lebih sebagai forum untuk melakukan diskusi (Muttaqin, dkk: 2011, 31).

Kebangkitan nasional memberi dampak pada tumbuhnya solidiritas antara rakyat jajahan. Perasaan anti penjajah bangsa-bangsa yang terjajah di Asia dan Afrika makin lama makin subur. Demikian pula Indonesia yang dijajah oleh bangsa Belanda. Rakyat Indonesia menantang serta melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum penjajah Belanda dengan sewenag-wenang. Untuk mencapai Indonesia Merdeka para pemimpin kebangsaaan Indonesia semakin berpengalaman dalam menghadapi kaum penjajah Belanda.

Belanda memandang kebangkitan nasional sebagai ancaman serius terhadap kelangsungan kolonilal di Indonesia. Semangat nasionalisme yang tumbuh menggerakkan sumber daya pribumi dalam perjuangan yang diikat dengan kesadaran sebagai satu bangsa. "Nasionalisme Indonesia merupakan antitesis mutlak dari kolonialisme Belanda. Antitesis pada dasarnya tidak dapat dipersatukan. Oleh karena itu, dalam usaha memerjuangkan kepentingan masing-masing selalu timbul bentrok antara pihak nasionalis dan pihak yang berkuasa" (Muljana: 2008, 4).

Sikap keras dan reaksioner pemerintah Belanda tidak membuat bangsa Indonesia dan para pemimpinnya takut, bahkan sebaliknya, mereka makin tegas dan militan. Gerakan kebangsaan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tanah air merupakan perwujudan dan perlawanan yang reaktif terhadap sistem kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, yang menyebabkan rakyat Indonesia terjerumus ke dalam lembah kemiskinan dan kehinaan.

Kebangkitan nasional memberi arah baru dalam perjuangan bangsa Indonesia yang didasarkan pada kesadaran nasional dan kesatuan tujuan, untuk mencapai kemerdekaan. Proses perjuangan pergerakan nasional Indonesia, tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka, dijiwai oleh semangat persatuan dan kesatuan, sehingga melahirkan beberapa

momentum sejarah yang penting yaitu *Pertama* kebangkitan nasional yang diawali oleh lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 telah membuka jalan ke arah kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai kehendak dan hak-hak sebagai manusia merdeka. *Kedua* sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan formalitas konkret dari kenyataan kesadaran nasional terwujud nyata melalui kongres pemuda yang mengeluarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketiga peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sebagai klimaks total yang bersifat kebangsaan.

B. Penjajahan Jepang

1. Awal Penjajahan Jepang

Peralihan masa kolonial Belanda ke masa kolonial Jepang merupakan lembaran sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia terus berlanjut. Walaupun terdapat perbedaan corak perlakuan antara Belanda dan Jepang, tetapi keduanya meninggalkan kegetiran dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.

Rontoknya pertahanan laut Inggris di Laut China Selatan, dan jatuhnya Singapura, membuat posisi Hindia Belanda di ujung tanduk karena sebelumnya pihak Hindia Belanda mengharapkan pertahanan Angkatan Laut Inggris di Laut China Selatan bisa berperan sebagai payung pertahanannya dan serangan Jepang. Bagi Jepang, jalan penguasaan Hindia-Belanda terbentang pintu yang terbuka lebar. Pada bulan Februari tahun 1942 kesatuan Tentara ke-25 Jepang di bawah komando Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita dengan mudah merebut Sumatera. Jepang juga menduduki Kalimantan setelah mereka melakukan pemboman terhadap pusat kilang minyak di Tarakan dan Balikpapan. Tentara ke-25 Jepang menghentikan serangannya karena lingkup operasinya meliputí Semenanjung Malaya, Singapura, dan Sumatera (Bizawie: 2014, 110).

Pada awal Februari 1942, Tentara ke-XVI Jepang mendarat di Banten dan dengan cepat bergerak ke timur untuk menduduki

Batavia/Jakarta. Batavia saat itu dalam keadaan kosong karena pemerintah Hindia Belanda telah mengungsikan seluruh perangkat pemerintahan kolonialnya ke Bandung. Untuk makin menekan posisi Hindia Belanda di Jawa, Jepang mendaratkan pasukannya di Fretan, Indramayu, Jawa Barat. Di Jawa Tengah pasukannya didaratkan ke Kragan, Rembang (Bizawie: 2014, 111).

Kedatangan Jepang menggantikan pemerintahan Hindia Belanda pada awalnya memberikan harapan akan kehidupan yang Iebih baik, mengingat Indonesia dan Jepang sama-sama bangsa Asia. Belanda mendekonstruksi Islam menggantikannya dengan hukum adat, ulama dikontrol ketat sampai dengan kehilangan basis kekuasaannya sehingga perjuangan yang terjadi anti BeIanda. Jepang berusaha belajar dan kebijakan Belanda sehingga relatif berdamai dengan Islam (Bustami: 2015, 130). Tentara Jepang menduduki Indonesia setelah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Namun kedudukan Jepang di Indonesia tidak terlalu lama. Mulai tahun 1944, Jepang telah kelabakan melawan tentara sekutu. Kondisi Jepang yang kelabakan melawan sekutu. Membuat Jepang membutuhkan simpati dan rakyat Indonesia kala itu (Ghofar: 2016, 49).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Jepang dengan cepat dapat mengalahkan Sekutu di Asia Tenggara dan mengalahkan Belanda di Indonesia. Penjajahan Jepang tidak berlangsung lama di Indonesia, namun demikian telah memberikan penderitaan yang berat bagi rakyat Indonesia. Jepang mulai merasa kewalahan saat menghadapi Sekutu dan pada akhirnya menyerah kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hirosima dan Nagasaki yang dikenal sebagai pusat ibukota Jepang.

2. Kebijakan Pemerintah Jepang

Pada saat kedatangan Jepang yang menggantikan pemerintahan Hindia Belanda pada awalnya memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik, mengingat Indonesia dari Jepang sama-sama bangsa Asia. Belanda mendekonstruksi Islam menggantikannya dengan hukurn adat, ulama dikontrol ketat sampai dengan kehilangan basis kekuasaannya sehingga

perjuangan yang terjadi anti Belanda. Jepang berusaha belajar dari kebijakan Belanda sehingga relatif berdamai dengan Islam.

Jepang berusaha menarik keterlibatan tokoh-tokoh umat Islam untuk meredam gerakan perlawanan umat Islam. Ricklefs (2012: 119), mengemukakan bahwa salah satu perbedaan paling penting yang dapat dilacak pada periode Jepang adalah pendidikan politik dan keterlibatan para kiai NU. Sebelum masa pendudukan Jepang, kalangan Modernis yang berbasis di perkotaan yang paling dirnungkinkan untuk aktif secara politik, walaupun Muhammadiyah sendiri senantiasa mencoba rnenghindari politik anti-kolonial dan tetap menjalin kerja sama dengan rezim kolonial dalam karya pendidikan dan kesejahteraan yang dilaksanakannya.

Kebijakan Jepang kepada Islam Indonesia menciptakan pesona dengan *Nippon's Islamic Grass-root policy*. Bahkan, Jepang Iebih dekat memenuhi aspirasi Islam daripada nasionalis sekuler dengan tujuan untuk memobilisasi Islam dalam rangka mendukung tujuan-tujuan perang yang cepat dan mendesak (Bustami: 2015, 132).

Jepang mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat dan para pemimpin Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a. Jepang menyatakan diri sebagai saudara tua, sedangkan Indonesia sebagal saudara muda. Jepang menyatakan bahwa kedatangan- nya untuk membebaskan bangsa Indonesia dan belenggu penjajah asing. Selain itu, Jepang bermaksud mencapai kemakmuran bersama seluruh bangsa di bawah pimpinan Jepang sehingga sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Untuk tujuan tersebut bangsa Indonesia diharuskan memberikan bantuan berupa tenaga dan hash kekayaan alam kepada Jepang.
b. Jepang mendirikan Gerakan Tiga A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dijadikan semboyan oleh bangsa Jepang dalam usaha membujuk bangsa Indonesia untuk membantu Jepang. Untuk memimpin Gerakan Tiga A ditunjuk Mr.

Syamsudin, bekas anggota Parindra yang kurang dikenal. Melalui Gerakan Tiga A ini, Jepang memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia, terutama para pemuda dalam menghadapi bangsa asing, khususnya tentara Sekutu yang sedang berperang dengan Jepang. Para pemuda itu diberi berbagai pendidikan dan latihan militer dengan maksud agar tertanam semangat mendukung Jepang.

c. Jepang membebaskan para pemimpin bangsa Indonesia yang ditawan masa penjajahan Belanda, seperti Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta.
d. Pemerintah Jepang memberi kesempatan bagi para pemimpin bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting yang sebelumnya hanya dikuasai orang Belanda (Al-Anshori: 2010, 120).

Golongan Islam secara lebih leluasa bergerak daripada zaman Hindia Belanda. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa golongan Islam selalu mematuhi kebijakan Jepang karena banyak kebijakan Jepang yang ditentang oleh golongan Islam. Perjuangan melawan Jepang dilatarbelakangi oleh pemaksaan teerhadap keyakinan Islam yang prinsip masalah akidah, sehingga menimbulkan perlawanan di berbagai daerah.

Pada 3 Oktober 1943 *Saiko Sikikan* Jepang mengeluarkan *Osamu Seirei* No.44 tentang pembentukan tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang terdiri atas 65 Batalyon di Jawa dan Bali. Dalam penjelasan yang disampaikan *Gunsereikan*, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, disebutkan bahwa Perang Asia Timur Raya/Perang Pasifik adalah perang bagi seluruh bangsa Asia dan kemenangan dalam peperangan ini berarti juga akan menjadi kemenangan Asia, dan untuk itu telah menjadi kewajiban bersama bagi bangsa Asia untuk turut serta dalam usaha mencapai kemenangan akhir tersebut. Jenderal Harada juga menghubungkan pembentukan kesatuan PETA dengan janji Perdana Menteri Tojo yang memiliki rencana untuk memberikan hak dalam pemerintahan kepada orang Indonesia di Jawa (Bizawie: 2014, 119).

Berdasarkan uraian di atas, Jepang berupaya menarik simpati rakyat Indonesia, khususnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas dan memanfaatkan simpati tersebut untuk kepentingan melawan Sekutu. Jepang belajar dari akibat kontrol ketat Belanda terhadap agama dan budaya, telah menyebabkan timbulnya perlawanan menggunakan simbol agama yang sulit dipadamkan. Hal ini mendorong Jepang menggunakan pendekatan yang berbeda, walaupun pada dasarnya hanya sebagai bentuk pengalihan dan menarik simpati.

3. Sikap Umat Islam terhadap Penjajahan Jepang

Dalam hubungannya dengan posisi politik Islam, Jepang memunculkan fenomena yang sama sekali berlainan dengan fenomena zaman penjajahan Belanda. Jika penjajahan Belanda lebih menanamkan sikap anti Islam, Jepang justru memperlihatkan sikap bersahabat terhadap umat Islam. Mereka mengakui betapa pentingnya kedudukan umat Islam dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Walaupun sikap kedua penjajah tersebut terhadap umat Islam berbeda, tujuan dari kedua sikap itu adalah sama, melanggengkan kekuasaan mereka. Kamulfase kebijakan tersebut disadari umat Islam dengan menentang kebijakan Jepang, seperti kewajiban menghormat kepada bendera Jepang yang dinilai umat Islam bertentangan dengan akidah Islam.

Kebijakan Jepang kepada Islam Indonesia menciptakan pesona dengan *Nippon's Islamic Grass-root policy*. Bahkan, Jepang lebih dekat memenuhi aspirasi Islam daripada nasionalis sekuler dengan tujuan untuk memobilisasi Islam dalam rangka mendukung tujuan-tujuan perang yang cepat dan mendesak. Golongan Islam secara lebih leluasa bergerak daripada jaman Hindia Belanda. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa golongan Islam selalu mematuhi kebijakan/perintah Jepang karena banyak kebijakan Jepang yang ditentang oleh golongan Islam. Perjuangan melawan Jepang dilatarbelakangi oleh pemaksaan terhadap keyakinan Islam yang prinsip masalah ketauhidan sebagaimana yang terjadi di Pesantren Tebuireng, Singaparna, Indramayu, dan Aceh. Akan tetapi ternyata penjajahan Jepang lebih buruk bagi

bangsa Indonesia daripada Hindia Belanda akibat kekejaman dan keberutalan yang tidak segan-segan untuk menghukum orang Indonesia yang dianggap membangkang perintah atau menentang kebijakannya (Bustami: 2015, 132).

Jepang mensponsori pembentukan lembaga Muslim yang mencakup semua kalangan Muslim yang kemudian menjadi bagian dari Gerakan Tiga-A. Motif di balik kebijakan ini tampaknya ialah untuk menggantikan federasi Islam yang telah ada sebelum invasi, yaitu MIAI karena catatan anti-kolonialnya yang terang-terangan dengan yang lebih kooperatif. Maka, pihak Jepang segera membentuk Panitia Persiapan bagi Penyatuan Umat Islam, yang diketuai oleh Ketua PSII Abikusno Tjokrosujoso (adik dari Tjokroaminoto), dan mengadakan rapat tiga hari yang diikuti oleh semua pemimpin Muslim di Jakarta pada 21-23 Agustus 1942. Meskipun rapat itu menghasilkan sikap kooperasi dalam tingkatan tertentu dengan pihak Jepang, yang mengejutkan, organisasi baru yang diharapkan Jepang tak berhasil dibentuk. Alih-alih membentuk sebuah persatuan yang monolitik, rapat itu memutuskan untuk mempertahankan federasi MIAI yang diketuai oleh seorang pemimpin PSII berpendidikan Barat, yaitu Wondoamiseno. Pada akhir 1942, ketika versi baru MIAI telah dibentuk, pihak pemerintah Jepang telah meninggalkan Gerakan Tiga-A. Hal ini berarti bahwa MIAI hingga akhir hayatnya nanti terus menjadi sebuah organisasi yang independen (Latif: 2013, 292).

Di samping berusaha mereorganisasi sekolah-sekolah publik, pemerintah Jepang melakukan kontrol yang ketat terhadap seluruh bidang pendidikan Islam. Di mata mereka, pendidikan Islam patut mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap perilaku politik masyarakat akar rumput. Karena alasan inilah, pelajaran bahasa Arab pada mulanya dilarang. Namun, ketika muncul kebutuhan mendesak untuk mendapatkan dukungan aktif dari umat Islam guna mempertahankan Jawa dalam menghadapi sekutu, pelajaran bahasa Arab diperbolehkan dan sekolah-sekolah Islam secara berangsur-angsur dibuka kembali. Kendati begitu, para pelajar dan

guru Islam masih tetap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kewajiban untuk melakukan *Saikeirei*, yaitu menunduk ke arah Tokyo (bukannya ke Mekkah) yang menyerupai sikap menundukkan diri dalam shalat, yang ditetapkan oleh pihak Jepang, sangat bertentangan dengan keyakinan Islam. Hal ini melahirkan sikap-sikap anti-Jepang dan menguatkan hasrat untuk merdeka (Latif: 2013, 299).

Memahami uraian di atas, sikap Jepang terhadap bangsa Indonesia, khususnya umat Islam pada hakikatnya tidak berbeda dengan penjajah Belanda. Jepang berupaya menarik simpati umat Islam tetapi dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam upaya perang melawan Sekutu. Rangkaian kebijakan palsu Jepang terhadap umat Islam, pada akhirnya mendorong perlawanan bersenjata dari rakyat Indonesia, diantaranya digerakkan oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA) sebagai kesatuan yang dibentuk oleh Jepang sendiri.

Perlawanan terhadap Jepang yang dianggap membahayakan, selain pemberontakan rakyat Aceh yang dipimpin Tengku Abdul Jalil, adalah perlawanan rakyat Jawa Barat yang dipimpin in K.H. Zainal Mustafa seorang pemimpin pesantren di Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya. K.H. Zainal Mustafa bertekad untuk melawan Jepang karena tidak tahan lagi melihat kehidupan rakyat yang sengsara. Peristiwa pemberontakan itu pecah pada 25 Februari 1944 setelah sholat Jum'at. Dalam pertempuran antara pasukan Zainal Mustafa dengan tentara Jepang banyak tentara Jepang yang terluka dan tewas. Namun banyak juga rakyat yang gugur setelah mengadakan perlawanan dengan gigih melawan Jepang. K.H. Zainal Mustafa ditangkap selanjutnya dimasukkan tahanan, kemudian di pindahkan ke Jakarta. Pesantren Sukamanah dibakar habis. K.H. Zainal Mustafa dihukum mati dan dimakamkan di Ancol (Sunyoto: 2017, 91).

Pemberontakan PETA Blitar terjadi di bulan Februari 1945, jauh sebelum menyerahnya Jerman di Eropa dan 6 bulan sebelum menyerahnya Jepang di Asia. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa rasa tidak suka terhadap Jepang telah ada di Jawa Timur. Pemberontakan ini dipicu oleh tekanan Jepang kepada rakyat

untuk menyerahkan hasil ternak, beras dan hasil bumi mereka yang lain. Pedagang-pedagang kecil sangat membenci Jepang dan selalu berusaha mengakali perintah mereka. Mereka adalah kelompok masyarakat yang pertama merasakan sengsaranya di bawah Jepang. Perampasan hasil ternak dan cocok tanam dari desa oleh tentara Jepang mengakibatkan mereka tidak bisa menjual barang hasil desa seperti minyak kelapa, telur bebek dan lainnya ke kota seperti sebelumnya (Palmos: 2016, 108).

Timbulnya perlawanan kepada Jepang di berbagai daerah di Indonesia seperti perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna Jawa Barat, perlawanan PETA bahwa perlawanan tersebut menunjukkan kekejaman dan kesewenangan pemerintah Jepang terhadap rakyat terlebih kepada *romusha*, dari sini terlihat ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap kebijakan Jepang yang menindas rakyat. Bagi umat Islam penindasan yang dilakukan Jepang bukan hanya dalam masalah ekonomi, tetapi juga dalam aspek keyakinan yang berkaitan dengan akidah agama Islam, seperti kewajiban membungkuk dan hormat ke Tokyo (bukannya ke Mekkah) sehingga menimbulkan perlawanan.

C. Proklamasi Kemerdekaan

1. Kronologi Proklamasi Kemerdekaan

Memasuki tahun 1945 posisi Jepang semakin tersudut. Di berbagai wilayah Pasifik, pasukan Amerika Serikat telah merebut satu persatu wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki Jepang. Sejak 1942 ketika Jepang merebut Indonesia maka saat itulah titik balik di mana posisi Jepang yang sebelumnya ofensif kemudian berbalik menjadi defensif. Setelah itu tidak ada lagi berita dan catatan mengenai keberhasilan dalam merebut wilayah baru dan pasukan-pasukan Jepang.

Pengorbanan rakyat Indonesia terhadap Jepang cukup besar, selain turut menentang pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Jepang dianggap sebagai sang pembebas dan telah mengerahkan sebagian besar potensi yang dimiliki guna mendukung kampanye Jepang, menjalankan program *romusha* yang telah membunuh puluhan ribu nyawa dan program *Kumiai*

yang mendatangkan bencana kelaparan yang tidak diperhatikan, telah menjadi kesadaran bersama baik pada kalangan tokoh-tokoh di Indonesia hingga pada kalangan rakyat. Inilah yang mendasari, desakan rakyat Indonesia untuk segera menagih janji kemerdekaan.

Berbagai pengorbanan rakyat Indonesia terhadap Jepang cukup besar, selain turut menentang pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Jepang dianggap sebagai sang pembebas dan telah mengerahkan sebagian besar potensi yang dimiliki guna mendukung kampanye Jepang, menjalankann program *romusha* yang telah membunuh puluhan ribu nyawa dan program *Kumiai* yang mendatangkan bencana kelaparan yang tidak terperikan, telah menjadi kesadaran bersama baik pada kalangan tokoh-tokoh di Indonesia hingga pada kalangan rakyat. Inilah yang mendasari, desakan rakyat Indonesia untuk segera menagih janji kemerdekaan. Desakan itu membuahkan hasil dengan terbentuknya *Dokuritsu Junbi Coosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945, yang diumumkan oleh Seiko Shikikan Letjen Kumakichi Harada. Pembentukan badan merupakan langkah pertama Jepang untuk rnerealisasikan apa yang menjadi janji PM Koiso mengenai pemberian kemerdekaan kepada Indonesia (Bizawie: 2014, 157).

Dari kelompok Islam, dalam stuktur BPUPKI terdapat 15 orang untuk duduk sebagai anggotanya. Jumlah ini sebenarnya tidak seimbang dengan jumlah populasi penduduk yang mayoritas Muslim serta kedudukan mereka yang semakin menguat sepanjang tahun 1944 dan awal tahun 1945. Bahkan untuk perwakilan kalangan Islam dan pesantren (NU) hanya menempatkan sosok K.H. Wahid Hasyim saja. Sikap yang diambil oleh Jepang terkait dengan pembentukan organ BPUPKI tidak lebih sebagai tindakan tipu daya untuk meredam kemungkinan meletusnya reaksi fisik dan masyarakat Islam terkait.

Pada 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Tiga hari kernudian, 9 Agustus 1945, bom atom juga

dijatuhkan oleh Sekutu di Nagasaki. Pada waktu yang sama, Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Widyodiningrat di undang ke Dalat (Vietnam) untuk berternu Jenderal Terauchi. Pada 14 Agustus 1945, Soekarno dan kawan-kawan kembali ke Indonesia. Pada tanggal itu juga, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sehari kemudian, Indonesia berada dalam *vacuum of power* (kosong kekuasaan), artinya tidak ada satu pun pemerintahan yang berkuasa di Indonesia (El-Guyanie: 2010, 62).

Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian, antara tanggal 15 Agustus sampai 2 September 1945, terdapat *vacuum of power* di seluruh wilayah pendudukan Jepang, termasuk di bekas jajahan Belanda. Di masa *vacuum of power* tersebut, para pemimpin bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan pada 18 Agustus membentuk pemerintahan dengan pengangkatan Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, sehingga dengan demikian tiga syarat untuk pembentukan suatu negara telah terpenuhi, yaitu: adanya wilayah, adanya penduduk, dan adanya pemerintahan.

Kekosongan kekuasaan setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu dan belum adanya peralihan kekuasan dari Jepang kepada Sekutu, dimanfaatkan oleh para tokoh nasional untuk meproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang disambut dengan suka cita oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. **Pembacaan Teks Proklamasi**

Perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan yang menarik dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu telah melahirkan sebuah fenomena sejarah bagi bangsa Indonesia, proses tarik-menarik keinginan untuk merdeka lebih awal antara kaum muda dengan Soekarno-Hatta, yang kemudian melahirkan peristiwa pengasingan terhadap

kedua tokoh tersebut ke Rengasdengklok menjadi bukti rekam jejak atas keinginan kuat untuk merdeka, tidak hanya di kalangan pemimpin pergerakan tetapi juga kaum muda. Soekarno-Hatta tetap berkeinginan jika kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara matang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Anri: 2013, 5).

Tepat pukul 10.00 pagi, 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, dibacakanlah Teks Proklamasi oleh Bung Karno, dihadapan para anggota Panitia Persiapan Kernerdekaan Indonesia dan rakyat, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan upacara yang sangat sederhana, tanpa ada protokoler. Bendera Merah Putih hasil penyambungannya dengan mesin jahitnya oleh lbu Fatmawati, dan dikibarkan di tiang bambu oleh Chudancho Lotief Hendraningrat yang berseragarn Tentara Pembela Tanah Air-PETA. Kemudian, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah selesai dibacakan, Bung Karno menjelaskan ada seorang mahasiswa menggunakan radio milik Jepang, memperbanyak Teks Proklamasi. Kemudian disebarkan ke seluruh penjuru kota Jakarta. Terutama ditempelkan pada media transportasi umum kereta api, trem, dan kendaraan lainnya disebarkanlah berita proklamasi 17 Agustus 1945. Pada teks Proklamasi di atas masih menggunakan Tahun Jepang 2605 (Suryanegara: 2015, 157).

Gambar 1.
Ir. Soekarno Membaca Teks Proklamasi 17 Agustus 1945

Berdasarkan uraian di atas, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Pegangsaan Timur 56, Jakarta merupakan puncak perjuangan Bangsa Indonesia. Berita tersebut rnenyebar pada esok harinya di daerah Subang. Setelah proklamasi, banyak hal yang diputuskan di Jakarta yang menyangkut dan mempengaruhi perkembangan di daerah-daerah, seperti pembentukan Badan-badan Perjuangan sebagai akibat Maklumat tanggal 3 November 1945.

3. **Dampak Proklamasi Kemerdekaan**

Pergerakan dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah gerakan yang menarik dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu telah melahirkan sebuah fenomena sejarah bagi bangsa Indonesia, proses tarik-menarik keinginan untuk merdeka lebih awal antara kaum muda dengan Soekarno-Hatta, yang kemudian melahirkan peristiwa pengasingan terhadap kedua tokoh tersebut ke Rengasdengklok menjadi bukti rekam jejak atas keinginan kuat untuk merdeka, tidak hanya dikalangan pemimpin pergerakan tetapi juga kaum muda. Soekarno-Hatta tetap berkeinginan jika kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara matang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Begitupun saat perumusan naskah proklamasi yang berlangsung di rumah Jenderal Maeda, Jalan Imam Bonjol No.1 (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi), banyak catatan sejarah yang patut diketahui. Dalam perumusan naskah proklamasi yang semula akan diberi judul "Maklumat Kemerdekaan" akhirnya berganti menjadi "Proklamasi", dengan berbagai pertimbangan jika menggunakan kata maklumat akan berarti suatu keputusan dari suatu badan atau pemerintah. Sedangkan saat itu yang diperlukan adalah keputusan yang mencerminkan keputusan suatu bangsa yang

menyatakan kebebasan dari penindasan penjajah dan menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia yang merdeka.

Langkah selanjutnya setelah proklamasi adalah membentuk Negara Indonesia sebagai perwujudan dari "pemindahan kekuasaan" yang dilakukan pada 18 Agustus 1945 sesuai dengan ketetapan pemerintah Tokyo bahwa sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, namun kendala berat menghadang ketetapan tersebut, karena Tokyo tanggal 15 Agustus 1945 sudah menyerah kepada Sekutu dan Tokyo memberikan perintah kepada Pemerintah Pendudukan Militer Jepang di Indonesia, yaitu Angkatan Darat ke-16 yang dipimpin Jenderal Moichiro Yamamoto untuk melaksanakan syarat-syarat penyerahan, yaitu menjaga *status quo*. Bahkan Jenderal Moichiro Yamamoto sendiri secara resmi sudah menyatakan kepada Soekarno dan Moh Hatta, bahwa Jepang telah menerima deklarasi Postdam, dan berdasarkan hal itu bantuan menuju kernerdekaan adalah tidak mungkin, karena pemerintahan militer di Jawa akan diteruskan di bawah komando panglima tertinggi Angkatan Darat Jepang sesuai dengan prinsip-prinsip untuk memelihara *status quo*, sementara dengan tegas Pemerintah Pendudukan Militer jepang menjamin keamanan dan ketertiban, sampai suatu hari ketika penyerahan segala sesuatunya kepada Sekutu selesai (Sunyoto: 2017, 106).

Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang penyebarannya didukung oleh Angkatan Laut di bawah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan juga usaha bawah tanah pegawai Domei, begitu cepat menyebar ke penjuru ibukota dan kota-kota besar yang lain, di mana setelah ibukota Jakarta kota besar yang paling cepat menerima berita proklamasi adalah Surabaya dan Bandung, yang siang hari dalam hitungan jam sudah mengetahui bahwa kemerdekaan Indonesia sudah diproklamasikan, bahkan menjelang malam seluruh penduduk kota Surabaya sudah tahu tentang berita proklamasi tersebut. Ketika berita proklamasi mengalir dari pusat kota ke kampung-kampung dan pedesaan di sekitar kota, masyarakat menerima dengan sukacita tetapi juga penuh keraguan.

E. Segi Pedagogis

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa segi pedagogis sebagai berikut:

1. Upaya mencapai kemerdekaan Indonesia tidak dapat dicapai hanya dengan perlawanan bersenjata, tetapi memerlukan kesadaran nasional dan solidaritas kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perlawanan di berbagai daerah tidak dapat mengusir penjajah, karena tidak didukung oleh daerah lain, dan akibat politik memecah belah bangsa Indonesia yang dilakukan penjajah.

   Perlawanan yang bersifat kedaerahan menyebabkan Belanda mudah mengadu domba antara pemimpin di masing-masing daerah, dan menggagalkan perlawanan yang tidak terkoordinasi dengan baik akibat belum adanya semangat persatuan dan kesadaran nasional.
2. Kebangkitan nasional telah menyadarkan bangsa Indonesia tentang pentingnya pendidikan, dan gerakan politik yang didasarkan pada semangat persatuan sebagai bangsa yang memliki tanah air dan bahasa yang sama.

   Perjuangan melawan penjajah yang lebih maju di bidang militer, ekonomi dan pendidikan, harus pula diimbangi dengan kemajuan intelektual bangsa Indonesia, agar dapat mengimbangi kekuatan penjajahan. Semua ini berangkat dari gerakan di bidang pendidikan dan politik yang menyadarkan rakyat Indonesia dari keterbelakangan dan kebodohan.
3. Proklamasi kemerdekaan bukan hadiah dari pemerintahan Jepang, tetapi hasil jerih payah bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang pada dasarnya tidak tulus mendorong kemerdekaan Indonesia, dan hanya strategi untuk menarik simpati bangsa Indonesia melawan Sekutu. Kekosongan kekuasaan setelah menyerahnya Jepang kepada Sekutu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

   Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan momentum awal bagi lahirnya bangsa baru yang harus segera melakukan

konsolidasi untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan harus dipertahankan mengingat Belanda berupaya menjajah kembali bangsa Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan telah mendorong mobilisasi masa dan dengan cepat membentuk laskar-laskar perjuangan umat Islam. Proklamasi kemerdekaan sebagai momentum puncak perjuangan bangasa Indonesia, tetap menyisakan perjuangan yang belum berakhir. Jepang terikat dengan perjanjian Postdam yang mewajibkan Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu, termasuk di Indonesia. Dari sini babak baru perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dimulai yang mendorong melahirkan resolusi jihad bagi umat Islam.

Jihad merupakan respon dari umat Islam terhadap perlunya mobilisasi dan persiapan rakyat untuk menolak penjajahan kembali Belanda. Perjuangan melawan penjajah terlebih dengan ketimpangan secara militer, membutuhkan gagasan yang menyatukan segenap komponen bangsa. Dalam hal ini semangat jihad dan nasionalisme menjadi gagasan yang menyatukan untuk mempertahankan kemerdekaan.

4. Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan telah memunculkan banyak tokoh dan pahlawan dari berbagai daerah dan golongan. Dari kalangan umat Islam dan organisasi keagamaan, muncul seorang nama K.H Hasyim Asy'ari sebagai salah satu ulama besar yang memiliki peran dalarn perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui basis pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama. Umat Islam menjadi barisan utama dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bagi umat Islam mempertahankan kemerdekaan hukumnya wajib, dengan menggunakan seluruh kemampuan yang ada, baik tenaga, harta dan jiwa.

BAB III
K.H. HASYIM ASY'ARI DAN PERJUANGAN MELAWAN KOLONIALISME

A. Biografi K.H. Hasyim Asy'ari

Kehidupan K.H. Hasyim Asy'ari mungkin dapat digambarkan dengan kata-kata sederhana, Dari pesantren kembali ke pesantren. Ia dibesarkan di lingkungan pesantren, kemudian setelah tujuh tahun di Makkah melakukan ibadah haji dan belajar di lingkungan seperti pesantren, yaitu Masjid al-Haram dan Masjid an-Nabawi. K.H. Hasyim Asy'ari kembali ke Nusantara untuk mendirikan pesantren sendiri dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajar para santri di pesantren. Beliau bahkan mengatur kegiatan-kegiatan politik dari pesantren (Khuluq: 2008, 15).

Pemaparan dalam Bab ini akan menjelaskan tentang biografi K.H. Hasyim Asy'ari pemikiran dan kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

1. Latar Belakang Keluarga

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh yang mewakili umat Islam dalam perjuangan melawan kolonial Belanda dan Jepang. Kontribusi K.H. Hasyim Asy'ari, baik dalam ranah perjuangan melawan kolonial, maupun organisasi dan pendidikan Islam menjadi daya tarik untuk meneliti latar belakang kehidupannya. K.H. Hasyim Asy'ari atau nama lengkapnya Muhammad Hasyim, lahir di desa Gedang Jombang pada 24 Dzulqa'dah 1287 H/14 Februari 1871, dan wafat di Jombang pada Juli 1947 (Margono: 2011, 332).

Kyai Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dan 11 bersaudara. Ayahnya adalah Kyai Asy'ari asal Demak. Ibunya, Nyai Halimah, adalah putri Kyai Usman. Sang ibu merupakan anak pertama dan tiga laki-laki dan dua perempuan. Dari pernikahan Kyai Asy'ari dan Nyai Halimah, lahirlah Hasyim Asy'ari. Ia mempunyai 10 saudara, yaitu Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radjah, Hasan, Anis, Fathanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan (Misrawi: 2010, 36).

Gambar 2.
K.H. Hasyim Asy'ari

Menurut Khuluq (2008: 17) Hasyim Asy'ari lahir dari keluarga elit kyai Jawa pada 24 Dzulqa'dah 1287/14 Februari 1871 di desa Gedang, sekitar dua kilometer sebelah Timur Jombang. Ayahnya, Asy'ari, adalah pendiri Pesantren keras di Jombang, sementara kakeknya, Kyai Usman, adalah kyai terkenal dan pendiri Pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad ke- 19. Moyang Hasyim Asy'ari bernama Kyai Sihah, adalah pendiri Pesantren Tambakberas, Jombang.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rifa`i (2016: 17) yang menyebutkan bahwa Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah atau 14 Februari 1871 Masehi di Gedang. Nama lengkap beliau Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, yang rnempunyai gelar pangeran Bona, bin Abdul Rohman Rahman, yang dikenal dengan Jaka Tìngkir Sultan Hadiwijoyo, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatih bin Maulana Ishaq, dan Raden 'Ain Al-Yaqin yang disebut dengan Sunan Giri.

Berdasarkan pendapat di atas, secara geneologis nasab, K.H. Hasyim Asy'ari berasal dari kalangan elit ulama pesantren. K.H. Hasyim Asy'ari lahir di Jombang dari pasangan Kyai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari garis ayah, KH. Hasyim Asy'ari masih keturunan Jaka Tìngkir (Sultan Hadiwijoyo) yang silsilahnya bersambung sampai kepada Raden 'Ain Al-Yaqin (Sunan Giri) putra Sunan Bonang. Nasab tersebut menunjukkan bahwa K.H.

Hasyim Asy'ari merupakan keturunan para pendakwah Islam pertama di Indonesia yang sezaman dengan Wali Songo.

Listina (2011: 40) mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dan 11 bersaudara Kyai Asy'ari, pemimpin Pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang dan lbunya bernama Halimah. Sejak kecil hingga berusia empat belas tahun, la mendapat pendidikan langsung dan ayah dan kakeknya, Kyai Utsman. Keinginannya yang besar untuk menuntut ilmu mendorongnya belajar lebih giat dan rajin. Hasilnya, ia diberi kesempatan oleh ayahnya untuk membantu mengajar di pesantren karena kepandaian yang dimilikinya.

Syihab dalam (Fata: 2014, 321) menjelaskan silsilah KH. Hasyim Asy'ari dari keturunan garis ayah sebagai berikut:

> Silsilah K.H Hasyim Asy'ari dapat dirunut dari keluarga Syaiban berasal dari keturunan para da'i Arab Muslim yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam pada abad ke-4 H serta mendirikan pusat pendidikan agama Islam. Keluarga Syaiban adalah keturunan Imam Ja'far al-Shâdiq bin Imam Muhammad Baqir.

Menurut Margono (2011: 336-337) secara genealogi, K.H. Hasyim Asy'ari merupakan keturunan kyai, karena kakek buyutnya adalah Kyai Sihah yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, sedangkan kakeknya Kyai Usman adalah kyai terkenal pendiri pondok pesantren Gedang, sedangkan ayahnya Asy'ari adalah pengasuh pondok pesantren Keras di Jombang.

Berdasarkan silsilah di atas, dapat dilihat bahwa K.H. Hasyim Asy'ari lahir dari garis keturunan pada pejuang awal Islam di Indonesia, dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Kondisi tersebut membentuk model pendidikan bagi K.H. Hasyim Asy'ari yang sejak kecil sudah terbiasa dengan lingkungkungan keagamaan di pesantren. Kehidupan masa kecilnya di lingkungan pesantren berperan besar dalam pembentukan wataknya yang haus ilmu pengetahuan dan kepeduliannya pada pelaksanaan ajaran-ajaran agama dengan baik.

Lingkungan tersebut pada akhirnya mempengaruhi orientasi pendidikan yang diperjuangkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai sarana dakwah dan memperjuangkan umat Islam dari penjajahan.

Khuluq (2000: 18) menjelaskan silsilah nasab dan kehidupan masa kecil K.H. Hasyim Asy'ari sebagai berikut:

> Hasyim Asy'ari adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara, yaitu Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radjah, Hassan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Sampai umur lima tahun, beliau dalam asuhan orang tua dan kakeknya di Pesantren Gedang. Di pesantren ini, para santri mengamalkan ajaran agama Islam dan belajar berbagai cabang ilmu agama Islam. Suasana ini tidak diragukan lagi mempengaruhi karakter KH. Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar. Pada 1876, ketika KH. Hasyim Asy'ari berumur enam tahun, ayahnya mendirikan Pesantren Keras, sebelah Selatan Jombang, suatu pengalaman yang kemungkinan besar mempengaruhi beliau untuk kemudian mendirikan pesantren sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, secara genealogi, KH. Hasyim Asy'ari merupakan keturunan kyai, karena kakek buyutnya adalah Kyai Sihah yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, sedangkan kakeknya Kyai Usman adalah kyai terkenal pendiri pondok pesantren Gedang, sedangkan ayahnya Asy'ari adalah pengasuh pondok pesantren Keras di Jombang. Silsilah K.H. Hasyim Asy'ari berasal dari da`i Islam yang pertama datang di Pulau Jawa, karena berasal dari keluarga Syaiban, dari para da'i Arab Muslim yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam pada abad ke-4 H serta mendirikan pusat pendidikan agama Islam. Keluarga Syaiban adalah keturunan Imam Ja'far al-Shâdiq bin Imam Muhammad Baqir. Dari garis keturunan ayah, kakek buyut K.H. Hasyim Asy'ari juga merupakan tokoh pejuang Islam di tanah Jawa sebelum masuknya penjajah Belanda, seperti Joko Tingkir, Maulana Ishaq (Sunan Giri). Nasab tersebut menunjukkan bahwa dari segi geneologis, K.H. Hasyim Asy'ari berasal dari keuturunan elit penyebar Islam di Indonesia.

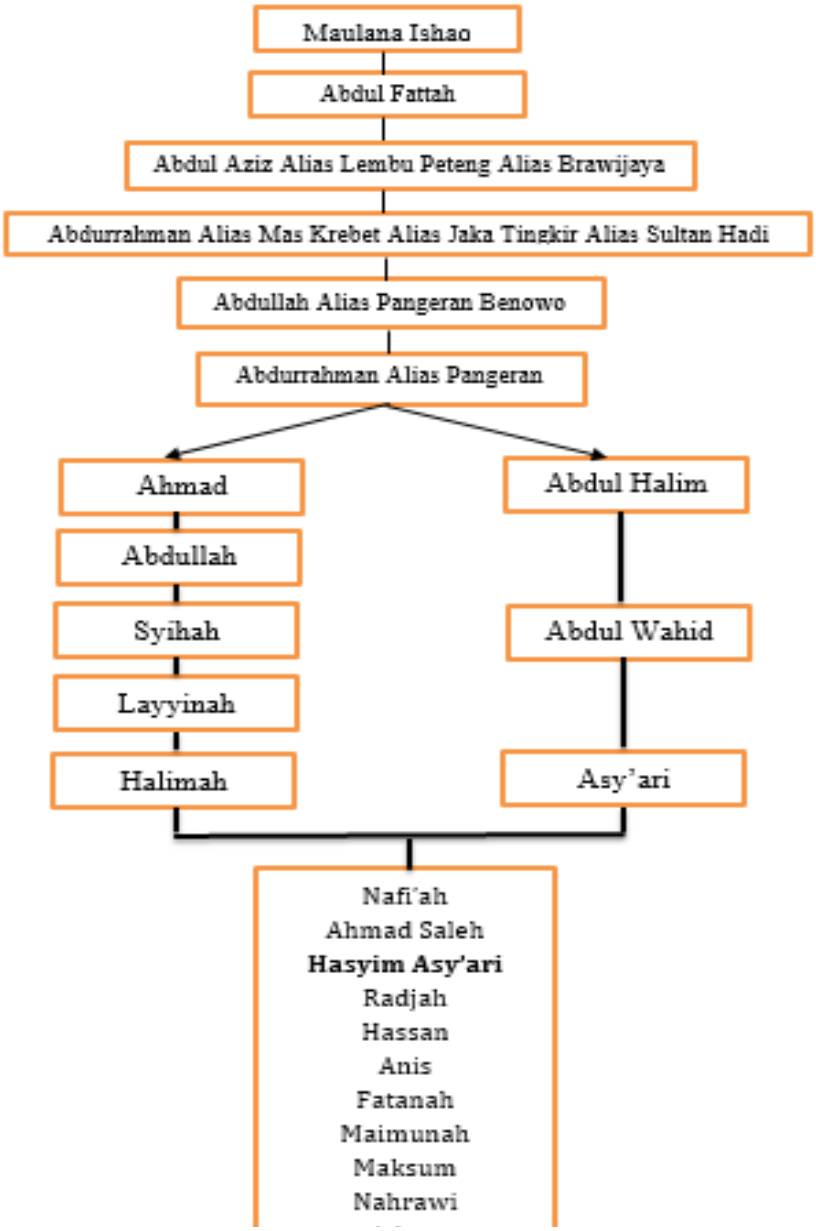

Gambar 3.
Silsilah Nasab Keluarga K.H. Hasyim Asy'ari

2. Riwayat Pendidikan

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh perjuangan dan pendidikan yang berjasa dalam meyumbangkan pemikiran tentang pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari lebih banyak diperoleh dari lingkungan pesantren, khususnya dari

lingkungan keluarganya yang dikenal sebagai pendidik di pesantren.

> Sampai umur lima tahun, Hasyim Asy'ari dalam asuhan orang tua dan kakeknya di Pesantren Gedang. Di pesantren ini, para santri mengamalkan ajaran agama Islam dan belajar berbagai cabang ilmu agama Islam. Suasana tersebut mempengaruhi karakter Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar. Pada 1876, ketika Hasyim Asy'ari berumur enam tahun, ayahnya mendirikan Pesantren Keras, sebelah Selatan Jombang, suatu pengalaman yang kemungkinan besar memepngaruhi beliau untuk kemudian mendirikan pesantren sendiri. Kehidupan masa kecilnya di lingkungan pesantren berperan besar dalam pembentukan wataknya yang tekun mencari ilmu pengetahuan dan kepeduliannya pada pelaksanaan ajaran-ajaran agama dengan baik (Khuluq: 2008, 18).

Margono (2011: 337) mengatakan pada usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari mulai mengembara ke berbagai pesantren di pulau Jawa untuk memperdalam ilmu agama, seperti di Pesantren Wonocolo Jombang, Pesantren Purbolinggo, Pesantren Langitan, Pesantern Tranggilis, dan berguru kepada Kyai Kholil di Bangkalan Madura.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Rifa`i (2016: 21) yang menyebutkan sejak kecil sampai berusia 14 tahun, Hasyim Asy'ari mendapat pendidikan langsung dan ayah dan kakeknya, Kyai Usman. Hasratnya yang besar untuk menuntut ilmu rnendorongnya belajar lebih giat dan rajin. Beliau termasuk anak yang mudah menyerap dan menghafal ilmu yang diberikan. Keistimewaan beliau dalam menyerap dan menghafal ilmu, menjadikannya diberi kesernpatan oleh ayahnya pada usia masih remaja, 13-14 tahun, untuk membantu mengajar di pesantren.

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang pendidikan K.H. Hasyim Asy'ari sejak kecil diperoleh dari lingkungan keluarganya yang bercorak pendidikan pesantren. Hal ini dapat dipahami karena secara geneologis K.H. Hasyim Asy'ari adalah keturunan kyai atau pengasuh pesantren, sehingga sejak kecil akrab dengan model pendidikan pesantren. K.H Hasyim Asy'ari memperoleh pendidikan pesantren sejak masih kecil. Hingga usia 6 tahun, K.H. Hasyim Asy'ari di bawah asuhan kakeknya, Kyai Usman. Pada

tahun 1876, K.H Hasyim Asy'ari pindah ke desa Keras (kira-kira 6 kilometer selatan kota Jombang) mengikuti orangtuanya yang mendirikan pesantren di desa tersebut. Masa kecil K.H. Hasyim Asy'ari sebagaimana layaknya anak-anak lain tumbuh, yang membedakan hanya lingkungan dimana ia tumbuh yaitu pesantren Gedang yang diasuh kakeknya (kyai Usman), ia di pesantren tersebut berkisar antara umur 1-5 tahun. Pada tahun 1876 M bertepatan pada umur 6 tahun, ia ikut ayahnya (kyai Asy'ari) hijrah ke keras (daerah sebelah selatan Jombang), dan mendirikan pesantren di tempat tersebut.

Setelah memperoleh bekal pendidikan di lingkungan pesantren, K.H. Hasyim Asy'ari melanjutkan pendidikannya di kota suci Makkah, bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji. Misrawi (2010: 44) mengatakan setelah menunaikan ibadah haji, Kyai Hasyim tidak langsung kembali ke Tanah Air. ia menetap beberapa bulan untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan, terutama ilmu hadis yang merupakan salah satu bidang ilmu yang paling digemarinya. Hal itu bisa dilihat, buku-buku yang ditulis K.H. Hasyim Asy'ari selama hidupnya merupakan pembahasan yang berisi hadis-hadis.

Menurut Margono (2011:337) pada 1893, K.H. Hasyim Asy'ari berangkat ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama dan berguru kepada Syekh Mahfudh At-Tarmisi yang berasal dari Tremas, Jawa Timur. Syekh Mahfudh At-Tarmisi menjadi pengajar di Masjidil Haram dan merupakan ulama ahli hadits di Makkah, beliau adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantany yang menjadi murid Syekh Ahmad Khatib Syambasi (tokoh tasawuf yang berhasil menggabungkan tarikat Qadariah dan tarikat Naqsabandiah). Untuk melengkapi pengetahuannya di bidang agama, K.H. Hasyim Asy'ari kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Namun dari sekian banyak gurunya itu, yang paling mempengaruhi jalan pikiran K.H. Hasyim Asy'ari adalah Syekh Mahfudh At-Tarmisi. Dari gurunya inilah dia memperoleh ijazah tarikat Qadariah dan Naqsabandiah.

Makkah telah memberi K.H. Hasyim Asy'ari kenangan dan pengalaman yang sangat berharga, terutama gudang ilmu yang diraihnya selama berada di kota suci tersebut dan tentu saja

nikmatnya beribadah setiap saat di depan Ka'bah. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1893, Kyai Hasyim memutuskan berangkat kembali ke tanah suci Makkah untuk melanjutkan petualangannya menuntut ilmu (Misrawi: 2010, 45).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pendidikan K.H. Hasyim Asy'ari terbagi menjadi dua periode yaitu periode Indonesia (Pesantren) dan periode Makkah. Pendidikannya dimulai sejak berada di pesantren milik kakeknya yaitu kyai Usman. Pada masa kecil K.H. Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama Islam kepada ayahnya (kyai Asy'ari) di pondok pesantren yang di dirikan oleh ayahnya sendiri hingga sampai usia 15 tahun. Hasyim Asy'ari merupakan santri yang cerdas, ia selalu menguasai apapun yang di ajarkan ayahnya dan membaca sendiri kitab-kitab yang belum pernah diajarkan oleh guru dan ayahnya.

Perpindahan K.H. Hasyim Asy'ari dari satu pesantren ke pesantren lain di latar belakangi banyaknya berbagai disiplin ilmu yang menjadi karakteristik pesantren tertentu, setiap pesantren memiliki spesialis ilmu tersendiri. Setelah lima tahun belajar di Bangkalan Madura, K.H. Hasyim Asy'ari kembali ke Jawa Timur dan melanjutkan belajar ke pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo di bawah bimbingan kyai Ya'qub, untuk belajar fiqh. Setelah itu, ia melanjutkan belajar ke Makkah, tempat sumber ilmu keislaman.

> Setelah menikah, pada 1891 ketika berumur 21 tahun, K.H. Hasyim Asy'ari dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Makah atas biaya mertuanya Mereka tinggal di Makah selama tujuh bulan. K.H. Hasyim Asy'ari harus kembali ke tanah air sendiri karena istrinya meninggal setelah melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Perjalanan ini sangat mengharukan karena sang anak juga meninggal dalam umur dua bulan. Pada tahun 1893, K.H. Hasyim Asy'ari kembali Iagi ke Makkah ditemani saudaranya, Anis, yang kemudian meninggal di sana. Pada kesempatan ini, ia tinggal di Makah selama tujuh tahun, menjalankan ibadah haji, belajar berbagai ilmu agama Islam, dan bahkan bertapa di Gua Hira. Dilaporkan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari juga sempar mengajar di Makah, sebuah awal karir pengajaran yang kemudian diteruskan ketika kembali ke tanah air pada 1900. Di rumah, ia pertama mengajar di pesantren ayah dan kakeknya, kemudian, antara tahun 1903-

> 1906, mengajar di kediaman mertuanya, Kemuning (Kediri) (Khuluq: 2000, 19-20).

Memahami kutipan di atas, pendidikan Hasyim Asy'ari tidak berhenti di bumi kelahirannya, ia melanjutkan belajar ke negara sumber ilmu keislaman, yaitu Makkah. Menuntut ilmu ke Makkah merupakan dambaan setiap santri pada waktu itu. Hal itu karena Makkah merupakan tempat lahirnya agama Islam dan pertemuan kaum muslimin disaat musim haji, Di Makkah banyak terdapat sejumlah ulama internasional, sebagian dari mereka ada yang berasal dari Indonesia dan memiliki geneologi keilmuan yang tidak terputus dengan kyai-kyai di pondok pesantren di Indonesia. Dalam penilaian masyarakat, bahwa seseorang yang memiliki pengalaman belajar ilmu di Makkah, mereka akan mendapatkan pengakuan dan posisi terhormat di masyarakat.

> Pada saat K.H Hasyim Asy'ari tinggal di Makkah selama tujuh tahun ini, beliau berguru kepada tokoh-tokoh ternama, yaitu Syaikh Mahfudz Termas, Syaikh Mahmud Khatib Al-Minangkabawy, Imam Nawawi Al-Bantany, Syaikh Syatha, Syaikh Dagistany, Syaikh Al-Allamah Abdul Hamid Al-Darusrany, dan Syaikh Muhammad Syuaib Al-Maghriby. Belaiu juga berguru kepada Syaikh Ahmad Amin Al-Athar, Sayyid Sultan ibn Hasyim, Sayyid Ahmad ibn Hasan Al-Athar, Syaikh Sayyid Yamani, Sayyid Alawi ibn Ahrnad As-Saqqaf, Sayyid Abbas Maliki, Sayid 'Abd Allah Az-Zawawi, Sayyid Husain Al-Habsyi, dan Syaikh Shaleh Bafadhal. Di antara sekian guru yang paling berpengaruh dalam wacana pemikiran Hasyim adalah Sayyid Alawi ibn Ahmad As-Saqqaf, Sayyid Husain Al.-Habsyi, dan Syaikh Mahfudz yang merupakan ulama pertama Indonesia yang dipercaya untuk mengajar kitab Shahih Al-Bukhari di Makkah dalam ilmu hadis. Keahlian inilah yang kemudian diwarisi oleh K.H Hasyim Asy'ari. Bahkan, beliau telah mendaparkan ijazah untuk mengajarkan kitab Shahih Al-Bukhari tersebut dan Syaikh Mahfudz tersebut yang merupakan pewaris terakhir dan pertalian sanad hadis Nabi dan 23 generasi penerima karya ini (Ni`am: 2011, 92).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Hasyim Asy'ari selama hidupnya berada dalam lingkungan pendidikan Islam, baik

selama di tanah air, maupun di tanah suci Makkah. Lingkungan tersebut berpengaruh terhadap tradisi keilmuan yang berlaku di pesantren menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran dalam pendidikan Islam. K.H. Hasyim Asy'ari mengadopsi pendidikan Islam klasik yang lebih mengedepankan aspek-aspek normatif, tradisi belajar-mengajar, dan etika dalam belajar yang dipandangnya telah mengantarkan umat Islam kepada zaman keemasan.

K.H. Hasyim Asy'ari menempuh pendidikan di kota suci Makkah dengan berguru kepada banyak tokoh dan ulama besar dalam berbagai disiplin ilmu agama. K.H. Hasyim Asy'ari berguru kepada ulama asal Indonesia di Makkah, seperti Syaikh Mahfudz Termas, Syaikh Mahmud Khatib Al-Minangkabawy, dan Imam Nawawi Al-Bantany. Dalam ilmu Hadis, K.H Hasyim Asy'ari berguru kepada Syaikh Mahfudz Termas dan memperoleh ijazah untuk mengajarkan kitab Shahih Bukhari.

Selain belajar hadits, Hasyim Asy'ari juga belajar fiqh mazhab Syafi'i di bawah bimbingan syaikh Ahmad Khatib, yang juga ahli dalam bidang astronomi (ilmu falak), matematika (ilmu hisab) dan al jabar (*al-jabr*). Hasyim Asy'ari juga berguru kepada sejumlah tokoh yang terkemuka di Makkah, seperti syaikh Abdul Hamid al-Durustani, syeikh Muhammad Syuaib al Magribi, syeikh Ahmad Amin al-Athor, sayyid Sultan bin Hasyim, sayyid Ahmad ibn Hasan al-Atthar, syaikh Sayyid Yamani, sayyid Alawi ibn Ahmad al-Saqqaf, sayyid Abbas Maliki, Sayyid Abdullah al-Zawawy, syaikh Saleh Bafadhal, dan syeikh Sultan Hasyim Dagastani.

Guru-guru K.H. Hasyim Asy'ari di atas mewarnai corak pemahaman agama. Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dalam paham keagamaan terlihat dari pembelaannya terhadap cara beragama dengan sistem bermazhab. Inilah pandangannya yang erat kaitannya dengan sikap beragama mayoritas kaum Muslimin yang disebut sebagai "*ahli sunnah wal jama'ah*". K.H. Hasyim Asy'ari dalam Pengimplementasian Aswaja dengan empat prinsip yaitu *at-Tawazun* (keseimbangan), *at-Tasamuh* (toleran), *at-Tawasuth* (moderat), *at-Ta'adul* (patuh pada hukum/adil), dan *amar*

makruf nahi mungkar. Dengan prinsip tersebut banyak umat Islam Indonesia yang menerima ajaran Aswaja.

3. Perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari dalam Organisasi Nahdlatul Ulama

Seluruh hidup Hasyim Asy'ari dihabiskan untuk mengabdi menyebarkan agama Islam, perkembangan pendidikan dan kemerdekaan Indonesia. Kehidupan kesehariannya dipenuhi dengan kegiatan dakwah dan mengajar di pondok pesantren yang ia dirikan. Sesekali ia juga disibukkan dengan organisasi perkumpulan para ulama sejawa Timur dan Jawa Tengah yang disebut organisasi keagamaan Nahdlatul ulama yang mana ia menjabat sebagai *Rais Am* dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada 1926, K.H. Hasyim Asy'ari bersama muridnya K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971), mendirikan Nahdlatul Ulama, suatu organisasi tradisionalis. K.H. Hasyim Asy'ari merupakan pemimpin pertama organisasi ini dan dianggap sebagai pemimpin agung (*Ra'is Akbar*). Kharisma dan kepemimpinan beliau sangat mendukung perkembangan organisasi ini. Dilahirkan dari keluarga elit kyai di Jombang, Jawa Timur, K.H. Hasyim Asy'ari pernah belajar di berbagai pesantren di Jawa, sebelum melanjutkan pendidikan lanjutan di tanah Hijaz. Beliau kemudian kembali ke Indonesia dan mendirikan Pesantren Tebuireng di Jombang yang terkenal dengan ilmu haditsnya. Pesantren ini kemudian menelurkan banyak kyai yang menjadi pendukung aktif NU (Khuluq: 2006, 6)

Memahami uraian di atas, Nahdlatul Ulama didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama muridnya K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama bukan semata-mata untuk mencari popularitas dan kekuasaan semata. Tetapi, organisasi Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam yang selama ini di ikuti yang sudah mulai tergerus dengan adanya pemikiran-pemikiran modern. Nilai-nilai tradisional yang di pandang oleh sejumlah kalangan merupakan ajaran dan metode yang sukses di lakukan oleh walisongo sudah mulai di usik kemapanannya. Oleh karena itu, K.H Hasyim Asy'ari

dan sejumlah ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah membuat organisasi yang berusaha melestarikan ajaran tradisional dan tetap bernafaskan ahlus sunnah wal jamaah. Hal tersebut berhasil dan sampai sekarang organisasi ini menjadi salah satu organisasi terbesar di Indenesia.

Zuhri dalam Ridwan (2008:1) menyebutkan NU didirikan pada 31 Januari 1926 (16 Radjab 1344 H.) dalam sebuah rapat di Surabaya yang dihadiri oleh K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisyri Syansuri, K.H. Ridwan, K.H. Nawawi, K.H. Doromuntaha (menantu KR. Choulil Bangkalan), dan banyak kyai lainnya. Rapat itu memutuskan dua hal: pertama, mengirim komite ke Makah untuk memperjuangkan hukum-hukum madzhab empat (kepada pemerintah baru Kerajaan Saudi yang dipegang oleh kelompok Wahabi); dan kedua, mendirikan jama'ah bernama NU (Nadlatul Ulama), dengan komitmen awal menjadi gerakan sosial-keagamaan.

Menurut Rifa`i (2009: 57) sewaktu izin pertama kali diajukan untuk mendirikan NU, K.H. Hasyim Asy'ari sepertinya ragu apakah pendirian organisasi tersendiri bagi kalangan Muslim tradisional itu dipandang perlu, karena tidak ada sejumlah organisasi Muslim. Lebih tepatnya, keraguan itu sebagai bentuk kekhawatiran beliau kalau pendirian itu direstui organisasi ini malah akan merusak persatuan dan kesatuan umat. Asumsinya, persetujuan K.H. Hasyim Asy'ari terhadap pendirian NU baru diberikan setelah beberapa lama dan setelah memandang bahwa pendirian itu tidak akan membahayakan persatuan umat. Beliau menyetujui pendirian NU juga setelah yakin akan petunjuk dan Allah Swt, terhadap pendirian organisasi ini melalui shalat istikharah dan setelah Kyai Khalil dan Bangkalan, guru beliau dan kyai yang sangat dihormati oleh para kyai di Jawa dan Madura, meyakinkan beliau bahwa pembentukan organisasi ini akan membawa manfaat bagi umat Islam. Kyai KhaIil juga memberikan beliau tasbih dan tongkat sebagai simbol tugas dan kepemimpinan beliau atas organisasi NU tersebut.

Berdasarkan usulan dan K.H. Asnawi dilakukan musyawarah ulama pada 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H,

yang secara bulat membentuk *Jam'iyyah Nahdlatul Ulama* (NU) atau "Kebangkitan Para Ulama". Pembentukan organisasi ini mendapatkan restu KH. Hasyim Asy'ari sebagai organisasi yang mewadahi aspirasi para ulama dan membela kepentingan kalangan Islam tradisional di Hindia Belanda. Adapun susunan kepengurusan NU yang baru terbentuk itu menempatkan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan K.H. Dachlan Achyat (Kebondalem, Surabaya) sebagai wakilnya. Sementara KH. Wahab Cahsbullah dipercaya menjadi Katib. Sementara untuk posisi Ketua Tanfidziyah (eksekutif) ditunjuk K.H. Hasan Gipo (Surabaya) dan H. Shaleh Syamil sebagai wakilnya (Bizawie: 2014, 92).

> Adapun peranan K.H. Hasyim Asy'ari dalam pembentukan NU ini sangat penting, karena restu dan legitimasi yang dia berikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan organisasi NU. Oleh karena itu, dia ditunjuk sebagai *rais akbar*, sementara ketua *tanfidziyah* adalah K.H Hasan Gipo. Dalam perkembangan selanjutnya, warna dan corak NU sangat dipengaruhi oleh KH. Hasyim Asy'ari. Dalam pidato *iftitah* yang disampaikannya kepada warga NU tentang faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang menganut satu dari empat mazhab yang dijadikan sebagai azas NU. Bahkan *muqaddimah* NU *Qonun Asasy* karangan beliau dijadikan sebagai satu kesatuan yang utuh dari Anggaran Dasar NU (Margono: 2011, 341).

Kelahiran NU selain sebagai upaya menjaga prinsip dan *khasanah* Islam tradisional dan penetrasi yang dilakukan oleh Islam modernis, juga mengusung motif sosial dalam melakukan Pembelaan kepentingan golongan Islam tradisi. Mereka berjuang mengembangkan ajaran Islam, menegakkan Syari'at Islam dengan melakukan berbagai kegiatan *tabligh* dan pengajian menyuarakan penyadaran bagi umat Islam di Hindia Belanda tentang kewajiban itu diberlakukan maka hal ini menyediakan potensi dan peluang yang bebas terhadap Iahirnya penyelewengan Hukum Islam.

Demikian halnya terhadap kebijakan pemerintah Kolonial mengenai hukum dan penanganan hukum terhadap pembagian waris. Dalam muktamar di Malang, NU mempersoalkan masalah penyerahan wewenang dan kekuasaan penanganan hukum urusan

pembagian waris yang semula berada di tangan *Raad Agama* dialihkan kepada Pengadilan Negeri Kolonial (*Landruad*). NU kembali menempatkan din secara kritis di hadapan pemerintah Kolonial ketika akan dibentuk Milisi Bumiputera (*Inhemsee Militia*) terkait dengan semakin memanasnya suhu politik dunia pada beberapa tahun sebelum meletusnya Perang Dunia II. Dalam inhemsee Militia disebutkan mengenai ketentuan bahwa setiap pemuda pribumi di Hindia Belanda yang berusia 18-25 tahun akan dikenakan kewajiban pembelaan tanah air dengan menjadi serdadu sukarela bagi pemerintah Kolonial. Kewajiban yang dibebankan dijadikan sebagai *Stadswachter* (pengawal Kota) dan *Landswachter* (Pengawal Negeri) (Bizawie: 2014, 97)

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan sosok penting karena menjadi salah satu pendiri NU, bersama sejumlah ulama pesantren lainnya, yaitu organisasi sosial-keagamaan terbesar di Tanah Air, bahkan di Asia Tenggara dan dunia Islam pada umumnya. Peran NU dicatat dengan tinta emas dalam sejarah republik ini karena tidak hanya mencerdaskan umat dan belenggu iliterasi keagamaan, tetapi juga mendorong akselerasi kemerdekaan bangsa ini dan belenggu penjajah, baik Belanda maupun Jepang. (Misrawi: 2010, 6)

Berdasarkan uraian di atas, K.H. Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama yang berada di garda terdepan dalam melakukan pemberdayaan umat dan menggugah kesadaran kolektif agar tidak mudah bertekuk lutut di hadapan penjajah. Semua itu dilakukannya demi kecintaannya kepada bangsa dan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam ajaran Islam. Kiprah besarnya dalam dunia pendidikan dan perjuangan adalah ketika K.H. Hasyim Asy'ari dengan K.H. Abdul Wahab Hasbullah mendirikan organisasi Nahdlatul 'Ulama pada tahun 1926. Organisasi ini bergerak di bidang dakwah dan pendidikan bahkan kemudian merambah ke dunia politik. Sejak awal pendirian organisasi ini K.H. Hasyim Asy'ari diamanahkan sebagai pemimpin organisasi yang dikenal dengan istilah *Rais Akbar*.

K.H. Hasyim Asy'ari telah membuktikan bahwa antara ke-Islaman dan ke-Indonesiaan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya berada dalam satu konsep perjuangan. Islam adalah nilai-

nilai luhur yang bersifat universal, sedangkan ke-Indonesiaan adalah realitas sosial yang harus diisi dengan nilai-nilai itu tanpa harus menafikannya. Nilai-nilai Islam harus hadir dalam kebudayaan dan kebhinekaan yang sudah mengakar kuat dalam jati diri dan memori kolektif bangsa Indonesia. Sebagaimana Islam datang ke bumi Nusantara melalui para pendakwah yang bersifat toleran dan damai. Oleh karena itu keberadaan NU harus memainkan peran tersebut. Peran tersebut adalah melindungi kebhinekaan dan membangun solidaritas kebangsaan yang kuat.

Sejarah mencatat K.H. Hasyim Asy'ari dikenal sebagai seorang ulama kharismatik dan guru pejuang. Potensi kepemimpinan yang dimiliki KH. Hasyim Asy'ari, menjadikan dirinya sangat berperan besar dalam memajukan masyarakatnya dan membangkitkan semangat perjuangan dalam menghadapi penjajahan kolonial Belanda. Dunia sosial politik dan kancah perjuangan merupakan bagian aktivitas yang mewarnai kehidupannya. Apalagi setelah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan ulama untuk menyatukan visi dan misi perjuangan. Selain itu juga mencetak kader-kader pejuang melalui pesantren yang telah berbuah manis. Banyak di antara santrinya bergabung dalam barisan perjuangan dalam membebaskan dari penjajah.

Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari sejak kelahirannya merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah-dakwahnya untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dalam wadah NKRI. Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni "Kebangkitan Para Ulama". NU pimpinan Hadhratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis.

Umat Islam di bawah komando para ulama telah memberikan warna dan sangat yang terang dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia, utamanya dalam perlawanan

menetang penjajahan Belanda, merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik saat seluruh bangsa mempertaruhkan hidup dan mati untuk tetap tegaknya kemerdekaan Indonesia. Begitu mendalamnya torehan sejarah yang dipahat umat Islam sepanjang masa Imperialisme di bumi Nusantara ini, sehingga jejak perjuangan dimasa penjajahan selalu melibatkan perjuangan umat Islam.

B. Perlawanan K.H. Hasyim Asy'ari terhadap Belanda

K.H Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh perjuangan yang mewakili umat Islam dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia dan pengekangan terhadap kebebasan menjalankan perintah agama, mendorong K.H. Hasyim Asy'ari untuk mengeluarkan fatwa tentang jihad melawan Belanda. Jihad yang dideklarasikan oleh Kyai Hasyim itu dicatat dalam sejarah sebagai jihad kebangsaan. Bangsa Indonesia yang saat itu dalam posisi terjajah mempunyai hak untuk memerdekakan diri dan berbagai penindasan yang dilakukan para penjajah. Sebagai ulama kharismatik dan tokoh umat, maka Hasyim Asy'ari menggelorakan semangat perjuangan untuk menentang penjajahan Belanda terutama dikalangan anak muda atau para santri. Beliau mengajak mereka untuk berjihad melawan penjajah dan menolak kerjasama dengan penjajah tersebut. Gerakan perlawanan ini disambut umat untuk membebaskan mereka dari ketertindasan yang menghinakan menuju kemulian yang membahagiakan.

Perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari melawan penjajah sebenarnya sudah dimulai pada saat menata Pesantren Tebuireng, di mana banyak rintangan, halangan dan hambatan dan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda senang melihat kaum Muslim dalam posisi terbelakang sehingga tidak dapat melakukan penlawanan terhadapnya.

Bentuk perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari ketika negaranya Indonesia dijajah Belanda adalah ketika beliau berikrar di Multazam, sewaktu melakukan haji untuk kedua kalinya. Beliau berikrar bersama teman-temannya yang bukan hanya berasal dan Indonesia, tapI juga dan Malaysia, Brunei, benua Afrika, dan Timur Tengah. Mereka

mengikrarkan diri untuk mengabdikan keilmuan- nya mereka pada kejayaan Islam dan masyarakatnya di negaranya masing-masing agar segera terlepas dan penjajah (Rifa`i: 2009, 71).

Misrawi (2010, 86) mengemukakan bahwa jihad kebangsaan yang dideklarasikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari tersebut terbukti sangat efektif dalam membakar patriotisme umat, sehingga para penjajah dapat dilenyapkan dari Bumi Pertiwi. Faktanya, para penjajah menunjukkan sikap intoleransi terhadap rakyat Indonesia. Pesantren Tebuireng merupakan salah satu sasaran tindakan represif penjajah. Pada tahun 1913, Intelijen Belanda membuat sebuah modus licik dengan cara mengirim seorang pencuri ke Tebuireng. Lalu, para santri menangkap pencuri tersebut dan memukulinya hingga tewas.

Jihad menjadi ikatan solidaritas yang mampu mengetuk setiap hati kaum muslim untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial. Konsep ini pertarna kali didengungkan pada akhir abad ke-17, ketika kerajaan Mataram dan Banten jatuh ke tangan Belanda. Kaum Muslim Nusantara telah mengenal konsep ini sejak lama, lewat buku-buku tentang Islam atau lewat pengajian-pengajian dan ceramah-ceramah di masjid. Tapi sebelum itu tidak begitu jelas apa makna jihad dan bagaimana menerapkannya. Baru setelah mereka berhadapan secara nyata dengan "*kaum kafir londo*" arti jihad menjadi jelas (Vlekke: 2011, xi).

Belanda tidak tinggal diam dan terus mencari berbagai cara untuk melakukan penindasan terhadap Kyai Hasyim. Belanda mengirimkan tentaranya dalam jumlah besar untuk menghancurkan fasilitas Pesantren Tebuireng, baik bangunan maupun kitab-kitab milik pesantren. Bahkan, kitab-kitab tersebut dibakar. Perlakuan tidak manusiawi seperti itu berlangsung hingga tahun 1940-an (Misrawi: 2010, 87). K.H. Hasyim Asy'ari dan pesantrennya terus diawasi oleh intelijen-intelijen penjajah. Bahkan, karena sikap keras beliau menyebabkan penjajah akhirnya berusaha membunuhnya dan membakar habis pesantrennya. Namun, hal itu tidak pernah menyurutkan perjuangan beliau, karena dengan segera pesantren itu dibangun kembali dan beliau masih bisa bersikap keras terhadap penjajah (Rifa`i: 2009, 71)

> K.H. Hasyim Asy'ari menjabat sebagai ketua federasi organisasi organisasi Islam, MIAI (*Majiis Islam A'la Indonesia*) pada akhir 1930-an. Beliau berperan dalam penggabungan MIAI dengan gerakan nasionalis lain yang menghasilkan federasi politik GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang menuntut Belanda agar membentuk perwakilan rakyat yang representatif (Indonesia Berparlemen) bagi rakyat pribumi. Beliau juga mengeluarkan fatwa agar umat Islam menolak wajib militer dan pemerintah Belanda dalam usahanya mempersiapkan diri menghadapi Jepang pada 1940-an, serta fatwa lain yang melarang donor darah untuk kepentingan perang Belanda (Khuluq: 2000, 7).

K.H. Hasyim Asy'ari dianggap sebagai provokator yang cukup berbahaya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sehingga, seluruh aktivitas yang dijalani Hasyim Asy'ari tidak pernah lepas dan pengawasan Belanda. Dalam situasi tersebut, Hasyim Asy'ari tetap menjalankan segala aktivitas sosial-keagamaannya dengan penuh semangat. Hasyim Asy'ari terus memberikan semangat dan motivasi kepada rakyat Indonesia untuk terus berjuang hingga tetes darah penghabisan.

Belanda mencoba mencari celah yang memungkinkan adanya peluang untuk mengendorkan semangat para pemuda yang tergabung dalam barisan para pejuang. Akan tetapi untuk rnelaksanakan upaya tersebut, Belanda sadar betul bahwa satu-satunya jalan yang harus ditempuh pertama-tama adalah membujuk aktor di balik terbentuknya barisan para pemuda yang mempunyai komitmen tinggi dalam merebut kemerdekaan. Belanda ingin untuk segera membubarkan barisan pemuda tersebut dengan terlebih dahulu membujuk aktomya. Aktor yang dimaksud tidak lain adalah Hasyim Asy'ari. Belanda berkeyakinan bahwa apabila sang aktor itu sudah berhasil dibujuk dengan berbagai cara, maka otomatis bawahannya akan mengikuti pula.

Rifa`i (2009: 120) pada masa penjajahan, beliau juga mulai membentuk barisan anak-anak muda untuk mendapat latihan ketentaraan dan memanggul senjata dengan metode baru. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan merebut kemerdekaan. Sebagai hasilnya, terbentuklah beberapa laskar. Pertama, laskar Hizbullah

untuk para pemuda dengan membawa semboyan "*Ala Inna Hizballahi Hum al-Ghalibun*" (Wahai Sesungguhnya Golongan Allah-lah Golongan yang Menang). Kedua, laskar Sabilillah untuk umumnya para kyai , lelaki, dan wanita, dengan membawa semboyan "*Waman Yujahid fi Sabilillah*," (Mereka yang Berjuang di Jalan Allah). Ketiga, laskar Mujahidin yang menyerupai pasukan maut, yang tak takut mati dan laskar ini membawa semboyan "*Walladzina Jahadu fina Lanahdiyannahum Subulana*" (Mereka Berjuang di Jalan-Ku, Aku akan Tunjukkan Mereka Jalan-Jalan-Ku).

Memahami uraian di atas, K.H. Hasyim Asy'ari merupakan tokoh perjuangan yang gigih melawan penjajahan Belanda. K.H. Hasyim Asy'ari dengan basis pesantrennya dijadikan sebagai sarana dakwah dan menggelorakan semangat jihad melawan penjajahan Belanda. Dalam masa perjuangan tersebut, K.H. Hasyim Asy'ari mengalami berbagai intimidasi dan ancaman dari pihak Belanda. Bahkan Belanda berusaha membunuhnya dan membakar habis pesantrennya. Namun demikian, perjuangan K.H Hasyim Asy'ari tidak surut, tetapi terus menggelorakan semangat jihad dan berdampak pada bangkitnya perlawanan umat Islam dan pembentukan laskar-laskar jihad, seperti Hizbullah dan Sabilillah dalam perlawanan bersenjata melawan Belanda. Peran K.H Hasyim Asy'ari dalam ikut mewujudkan Indonesia merdeka dan berdaulat secara politik tidaklah kecil. Melalui pesantren yang didirikannya, kemudian juga lewat *jam'iyah* NU, K.H. Hasyim Asy'ari menanamkan nasionalisme dan patriotisme sehingga mengobarkan api perlawanan rakyat terhadap kolonialisme yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Cengkeraman imperialisme dan hegemoni kolonial terhadap rakyat, tidak hanya terbatas pada aspek lahir seperti ekonomi, politik dan sebagainya, tetapi lebih dari itu, telah menguasai kesadaran dan rasionalitas mereka. Oleh karena itu, pendidikan dan dakwah yang digagas oleh K.H. Hasyim Asy'ari merupakan sarana yang efektif untuk mengubah kesadaran rakyat dan membangkitkan- nya dari ketertindasan. Melalui pengajaran dan fatwa-fatwanya, K.H. Hasyim Asy'ari membangkitkan kesadaran untuk melawan, dan membebaskan diri dari penjajahan, yang pada akhirnya berhasil

menggelorakan revolusi fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

C. Perlawanan K.H. Hasyim Asy'ari terhadap Jepang

Perlawanan yang ditunjukkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari terhadap kolonial Belanda juga ditunjukkan ketika Jepang menjajah Indonesia. Ketika Jepang berkuasa, umat Islam masih harus berhadapan dengan pemerintah yang zhalim, tetapi yang melihat mereka dengan cara pandang yang sangat berbeda. Begitu Jepang berhasil mengusir Belanda keluar dari Jawa, prioritas pertama mereka adalah mengontrol warga, melarang segala aktivitas politik, memadamkan setiap gejolak dan mengatur ketertiban masyarakat. Ketika mereka merasa bahwa prioritas tersebut telah tercapai, mereka mengalihkan prioritas mereka untuk memobilisasi rakyat Jawa, sehingga memperkokoh pertahanan Jepang terhadap kemungkinan serangan balasan dan tentara Sekutu yang pada akhirnya tidak terjadi (Ricklefs: 2012, 121).

K.H. Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh yang menentang perintah dan kebijakan Jepang yang harus dipatuhi oleh rakyat. Misrawi (2010: 87) mengemukakan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari menolak untuk melakukan *Seikerei*, yaitu kewajiban memberikan penghormatan dengan cara membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 07.00 sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketundukan kepada Dewa Matahari. Sikap tersebut mendapatkan respons represif dari tentara Jepang, akibatnya Kyai Hasyim serta sejumlah putra dan sahabatnya diringkus dalam penjara. Menurut Kyai Hasyim, tidak sepatutnya seorang muslim menyembah selain Allah SWT. Tidak ada kewajiban untuk menyembah manusia.

Menurut Bustami (2015: 133) pada sekitar April 1942 Jepang menahan K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Mahfudz Shiddiq dan dipenjara selama empat buIan. Mereka ditangkap karena tidak mau melakukan *Seikerei*, yakni upacara menghormat Tenno Haika dengan membungkukkan badan seperti rukuk ke arah Tokyo saat matahari terbit. Perintah ini bukan hanya ditolak oleh K.H. Hasyim Asy'ari, namun beliau juga menyerukan kepada seluruh penduduk Indonesia

terutama warga NU untuk tidak melakukannya karena dianggap sama dengan perbuatan menyekutukan Tuhan. Maka terjadilah perlawanan secara massif terutama di kalangan pesantren, dan bahkan pengurus NU perlu bertemu secara khusus untuk membahas penahanan tersebut serta membahas penentuan sikap akan upaya perlawanan terhadap Jepang. Agustus 1942 Jepang kemudian membebaskan K.H. Hasyim Asy'ari setelah menyadari bahwa tindakannya itu justru kontraproduktif dan menimbulkan keresahan yang luas terutama di kalangan ulama dan warga NU.

Pendapat serupa dikemukakan pula Bizawie (2014: 128) yang menyebut pada bulan April 1942 Rais Akbar NU, K.H. Hasyim Asy'ari, ketua *Hofdbestuur* NU, K.H. Mahfudz Shiddiq, ditangkap. Keduanya dipenjarakan Jepang selama empat bulan. Dalam kejadian ini, K.H. Hasyim Asy'ari menjalani penyiksaan di penjara Bubutan, Surabaya. Alasan dan tuduhan pihak Jepang dengan melakukan tindakan yang keras terhadap dua ulama yang sangat dihormati di kalangan IsIam tradisional itu adalah, bahwa baik K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Mahfudz Shiddiq dituduh sebagai tokoh yang mendalangi aksi perusakan pabrik gula milik Jepang di dekat Pesantren Tebuireng, Jombang. Jepang juga menangkap dan memenjarakan K.H Mahfudh Salam Pati Jawa Tengah di Penjara Ambarawa Ungaran. Bahkan kepada K.H. Zainal Mustofa Sukamanah Tasikmalaya, Jepang menangkap dan menghukum mati serta membakar pesantren dan para santrinya. K.H. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh umat Islam dan pemimpin NU telah menunjukkan perlawanan terhadap Jepang, khususnya tentang kebijakan Jepang yang bertentangan dengan ideologi Islam. Perlawanan tersebut menunjukkan bahwa akidah dan doktrin agama merupakan ranah sensitif yang mudah menjadi pemicu terhadap kebijakan otoriter penjajah. Bagi umat Islam, akidah adalah prinsip dasar dalam berhubungan dengan Allah yang tidak dapat diintervensi oleh kebijakan manusia, apalagi kebijakan penjajah yang bertindak otoriter.

Perlawanan K.H. Hasyim Asy'ari terhadap Jepang juga disebutkan oleh Bruinessen (1999: 53) yang mengatakan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari dan Kyai Machudz Shidiq dipenjara selama beberapa bulan pada tahun 1942 karena penolakan mereka terhadap *seikerei*.

Ketika mereka masih mendekam di dalam penjara, sebuah rapat para pemimpin cabang diadakan di Jakarta dan memilih pengurus pusat yang baru, dimana K.H. Hasyim Asy'ari tetap dipililih sebagai *Rais Akbar* tetapi ketua Tanfidziyah, Kyai Machfudz Siddiq, digantikan oleh Kyai Wahab Chasbullah.

Disaat K.H. Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang, tampil dan berperanlah putra sulung K.H. Hasyim Asy'ari yakni K.H. Wahid Hasyim yang dibantu K.H. Wahab Chasbullah yang menjalankan fungsi diplomasi yang piawai dan genius serta ulung dalam mengatur strategi menghadapi bengis dan kejamnya tentara penjajah. Alasan utama K.H. Hasyim As'ari disiksa dipukuli dan dipenjara oleh tentara Jepang karena beliau tidak mau melakukan *Seikerei* (menyembah dewa matahari), karena itu menyangkut soal aqidah. Informasi tentang penahanan Kyai Hasyim mulai terdengar luas sehingga menimbulkan protes dan kalangan kyai. Jepang mau tidak mau harus mendengarkan protes tersebut, khususnya dalam rangka meredam demonstrasi yang bersifat masif. Selain itu, Kyai Abdul Wahid dan Kyai Abdul Wahab Hasbullah juga berupaya melakukan lobi-lobi dengan petinggi Jepang di Jakarta agar Kyai Hasyim dibebaskan dari penjara. Upaya-upaya tersebut berhasil dan akhirnya Kyai Hasyim dibebaskan pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah 4 bulan mendekam di penjara (Misrawi: 2010, 87).

Pada masa penjajahan Jepang, K.H. Hasyim Asy'ari mengadakan perlawanan. Bentuk perlawannya berupa perjuangan nasionalisme religius K.H. Hasyim Asy'ari adalah pemberian fatwa haram dan penolakan terhadap pemaksaan *seikerei* Jepang, yaitu membungkukkan badan ke istana kaisar serupa dengan rukuk dalam shalat, untuk menghindari kemusyrikan. Sikapnya yang keras membuatnya ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama empat bulan, bahkan ada yang mengatakan kalau disiksa jemarinya. K.H. Hasyim Asy'ari menolak segala bentuk Niponnisasi, seperti menyanyikan lagu Kimigayo dan mengibarkan bendera Hinomaru. Sebaliknya, K.H. Hasyim Asy'ari secara sembunyi-sembunyi menyiapkan kader-kader Islam yang militan dengan cara menganjurkan para santri untuk masuk tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dibentuk pada 3 Oktober 1913 yang dipelopori oleh

putranya, Abdul Kholiq. Pembentukan PETA kemudian diikuti oleh terbentuknya Hizbullah pada akhir 1944 dan Barisan Sabilillah (Rifa`i: 2009, 32).

Sikap tegas K.H. Hasyim Asy'ari menyebabkan pihak Jepang marah besar sehingga Kyai Hasyim dipenjara. Kabarnya, la dipindah-pindahkan dari penjara Jombang, Mojokerto, lalu ke Bubutan, Surabaya. Perlakuan Jepang terhadap Kyai Hasyim begitu kasar, jari tangannya patah sehingga tidak bisa digerakkan. Penahanan tersebut berakibat pada terhentinya aktivitas Pesantren Tebuireng, termasuk aktivitas pendidikan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap musibah yang dialami Kyai Hasyim. Istri Kyai Hasyim, Nyai Masrurah, pun mengungsi ke Pesantren Denanyar selama suaminya berada di penjara. K.H. Hasyim Asy'ari memberi fatwa keharaman menyerupai orang kafir (penjajah Belanda) dalam berpakaian, dan pada era penjajahan Jepang, ia juga pernah ditangkap dan dipenjarakan atas fatwanya mengharamkan *Seikerei* (kewajiban membungkukkan badan menghadap ke arah timur demi menghormati kaisar Jepang sebagai titisan dewa matahari). Semuanya itu, merupakan contoh bagaimana K.H. Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama pesantren berperan menanamkan jiwa kebangsaan dan patriotik mengusir penjajah dari negeri ini.

Ketokohan K.H. Hasyim Asy'ari diakui oleh semua kalangan, bahkan pemikirannya dapat diterima oleh kalangan umat Islam dari berbagai organisasi yang sebelumnya berbeda orientasi ideologis, tetapi menginspirasi dan sekaligus diterima sebagai landasan bersikap menghadapi kekuatan imperialisme saat itu. Kredibilitas K.H. Hasyim Asy'ari merupakan perpaduan antara karakter keulamaannya yang kuat, juga komitmen kebangsaan, kepemimpinan, dan wawasan kenegaraannya yang luas sebagai rasa cintanya kepada negara. Sehingga fatwa jihad yang ia keluarkan, mencerminkan dengan jelas komitmennya yang kuat pada kemaslahatan umat Islam.

D. Segi Pedagogis

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa segi pedagogis sebagai berikut:

1. Ajaran Islam menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap manusia, dan melarang setiap bentuk penghambaan yang menjatuhkan harkat-martabat manusia. Ajaran Islam menentang setiap bentuk eksploitasi tanpa hak, terlebih lagi dengan cara pemaksaan, dan penindasan yang mengorbankan jiwa. Konsep tersebut menjiwai perjuangan umat Islam dalam melawan penjajah yang dilandasi oleh ideologi agama dan nasionalisme. Bagi umat Islam perjuangan melawan penjajah merupakan kewajiban agama dan juga kewajiban warga negara yang berpadu dalam semangat perjuangan.
2. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari menggambarkan perjuangan terhadap ketidakadilan yang telah mencederai nilai-nilai kemanusian dalam bentuk pengekangan kebebasan beragama, eksploitasi sumber daya manusia, dan penindasan. Memperjuangkan hak sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki martabat yang sama dengan bangsa lain tidaklah mudah. Dibutuhkan kesadaran nasional, persatuan dan pengorbanan untuk mengusir penjajah. Upaya tersebut telah dilakukan oleh K.H. Hasyim Asy`ari melalui pendidikan, membangkitkan kesadaran masyarakat dan mobilisasi kekuatan rakyat untuk berkonfrontasi secara fisik dengan penjajah.
3. Perjuangan melawan penjajah membutuhkan ide pemersatu, dan tokoh kharismatik yang mewakili lapisan masyarakat. K.H. Haysim Asy`ari dan tokoh-tokoh NU lain, bahu membahu bersama dengan ulama dari seluruh golongan dan tokoh-tokoh nasional untuk mengusir penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Jihad kebangsaan yang dideklarasikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari terbukti sangat efektif dalam menumbuhkan patriotisme umat, sehingga mendorong bangkitnya semangat rakyat melawan penjajah. Jihad menjadi ikatan solidaritas yang mampu mengetuk setiap hati kaum muslim untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial.
4. K.H. Hasyim Asy'ari telah membuktikan bahwa antara ke-Islaman dan ke-Indonesiaan tidak boleh dipertentangkan untuk mempertahankan keutuhan negara. Identitas berdasar agama

Islam diyakini memberikan kontribusi signifikan dalam proses pembangunan identitas keindonesiaan. Berawal dari identitas keislaman, masyarakat kepulauan Nusantara yang terpisah secara geografis, kultural, suku, kerajaan dan bahasa berhasil bersatu membentuk identitas bersama yang di kemudian hari kita sebut sebagai Indonesia. Konflik sejarah antara penjajah dan negara jajahan memaksa kedua pihak untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mencapai kemenangan. Indonesia sebagai negara baru pada saat itu dituntut untuk melakukan mobilisasi secara cepat guna mengantisipasi kedatangan Sekutu yang membonceng Belanda. Dalam proses mobilisasi tersebut dibutuhkan tokoh-tokoh kharismatik yang memiliki ide pemersatu antara semua komponen untuk melawan penjajahan. Tamplinya K.H. Hasyim Asy`ari yang memilki gagasan resolusi jihad telah membangkitkan semangat perlawanan rakyat yang dilandasi oleh keyakinan agama, dan dengan cepat mempengaruhi terbentuknya laskar-laksar jihad.

BAB IV
RESOLUSI JIHAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP USAHA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

A. Resolusi Jihad

1. Pengertian Resolusi Jihad

Arti jihad berarti sungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Dalam konteks tata bahasa Arab, kata jihad itu *shighat musyarakah*, yakni yang mempunyai arti bersama-sama. Para

ulama membagi jihad ke dalam 3 arti; jihad terhadap musuh-musuh yang nampak (*zhahir*), memerangi musuh berupa setan, dan memerangi hawa nafsu (Latief dan Muttaqin: 2015, 137).

Jihad secara etimologi berasal dan Bahasa Arab. Jihad berasal dan kata جهد (*jahada*). dalam kaidah bahasa Arab kata الجهاد (*AI-Jihaadu*) berasal dan kata جاهد (*Jaahada*) yang memiliki makna '"الجَهْد (*Al-jahdu*) artinya kesulitan atau dalam artian lain bermakna tenaga atau kemampuan (Ghofar: 2016,18).

Secara etimologi, jihad adalah *isim mashdar* dan kata *jâhada-yujâ hidu-jihâdân-mujâhadah*. Kata jihad ini merupakan derivasi dan kata *jahada-yajhadu-jahdân*. Dalam sebuah ungkapan diterangkan, "Seorang laki-laki berjihad dalam sebuah hal." Dengan kata lain, ia berarti bersungguh-sungguh (Qardhawi: 2010, 3).

Berdasarkan pendapat di atas, kata jihad secara bahasa mengandung beberapa pengertian, yaitu: memerangi musuh berupa setan, dan memerangi hawa nafsu, tenaga dan kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara bahasa, pengertian jihad tidak secara berkaitan dengan perang, tetapi mencakup makna yang lebih luas, yaitu memerangi hawa nafsu dan setan.

Menurut pengertian terminologis (istilah), *jihad* adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menangkis dan menghadapi musuh yang tidak tampak, yaitu hawa nafsu setan, dan musuh yang tampak yaitu orang kafir (El-Guyanie: 2010, 56).

Latief dan Muttaqin (2015: 137) mengemukakan secara umum, penggunaan istilah jihad dapat dikategorisasikan menjadi dua rumpun; pertama untuk menunjukkan aktivitas perang atau aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tentara dalam konteks Islam; seperti *al-Jihad, al-Qital, al-Harb, Satiyyah*, dan *Ghazwah*. Beberapa kata ini memberi banyak inspirasi perjuangan dalam konteks mempertahankan Islam dan berbagai musuh-musuh di luar Islam. Sementara rumpun kedua tetap menunjukkan pada eksistensi tentara dalam struktur ketatanegaraan. Istilah yang dipakai, antara lain; *al-Jaisy*, *al-Askariyyah*, dan *al-jund*.

Penggunaan istilah ini sesuai dengan visi yang dikembangkan, yakni visi kebangsaan dan kenegaraan.

Menurut al-Asfahani, sebagai mana dikutip oleh Umar dalam El-Guyanie (2010: 18), jihad dalam Al-Qur'an meneakup tiga hal, yakni: 1) Berjuang ungguh-sungguh melawan musuh untuk menegakkan agama Allah Swt, 2) Berjuang sungguh-sungguh melawan setan yang selalu menyebabkan munculnya kejahatan, 3) Berjuang sungguh sungguh melawan hawa nafsu yang selalu mengajak kemungkaran dan kemaksiatan.

Jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas akal berupa pemikiran dan ide, pena, aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya. Kesimpulan dan pengertian jihad berarti ketika seorang muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan di mana pun sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian jihad secara istilah berarti mengerahkan segala kemampuan untuk berjuang menghadapi musuh yang menyimpang dari ajaran Allah, baik berupa hawa nafsu setan, dan orang kafir. Pengungkapan jihad dalam ajaran Islam tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan objek lainnya, terutama dengan keimanan, hijrah, dan sabar. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa ajaran jihad merupakan ajaran penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam tingkat kegentingan yang membahayakan agama, jiwa, harta dan keselamatan umat. Pada dasarnya jihad bermakna seorang muslim mengerahkan dan mencurahkan segala kemapuannya untuk memperjuangkan dan menegak- kan Islam demi mencapai ridha Allah SWT. OIeh karena itu, kata jihad sering diiringi dengan kata *fi sabilillah* sebagai wujud bahwa jihad dilakukan oleh umat Islam harus sesuai dengan ajaran Islam supaya mendapatkan ridha Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan diatas, jihad bermakna kemampuan karena jihad menuntut kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan seseorang. Jìhad berarti kemampuan untuk menuntut sesorang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi meneapai tujuan. Oleh karena itu jihad adalah pengorbanan, seorang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai.

> Al-Maududi dalam Rohimin (9: 2006) membagi jihad menjadi dua macam: defensif dan korektif (pembaharuan). Jihad bentuk pertama adalah perang yang dilakukan untuk melindungi Islam dan para pemeluknya dan musuh-musuh luar atau kekuatan-kekuatan perusak asing di dalam *dâr al-Islam*. Sedangkan jihad bentuk kedua juga dapat dilancarkan terhadap mereka yang berkuasa secara tiranik atas kaum Muslim yang hidup di negara mereka sendiri. Bagi al-Maududi, kedua bentuk jihad inilah yang terpenting. Tetapi, sebenamya ía juga mengungkapkan jihad jenis lain, yakni jihad rohaniah, jihad untuk kebaikan pribadi dan penegakan keadilan. Penting dicatat, al-Maududi mengutuk penggunaan jihad untuk memaksa orang-orang kafir masuk Islam.

Memperhatikan wacana pemikiran Islam yang telah dikemukakan di atas, maka substansi ajaran jihad sebagai fenomena khas Islam merupakan pemaknaan yang kompleks, baik pada tahapan konsepsional, maupun implementasinya dalam kehidupan beragama. Pengertian, bentuk, objek, fungsi, dan jihad berbeda-beda. Dalam kenyataan ini, maka jihad dalam perkembangan sejarahnya dan waktu ke waktu turin mengalami pergeseran dan penekanan yang bervariasi.

Pembahasan tentang jihad bukanlah sesuatu yang baru yang pada umumnya berkaitan dengan upaya perang melawan orang-orang kafir. Ajaran jihad yang diangkat merupakan justifikasi legal untuk mempertahan kan diri dan konfrontasi senjata dengan orang-orang kafir. Ajaran jihad pada hakikatnya, adalah ajaran Islam yang mulia dan agung karena dipenuhi oleh

nilai-nilai pembelaan terhadap hak-hak kemanusian yang sering kali dilanggar oleh para penguasa yang zalim.

Ajaran jihad adalah ajaran pembebasan bagi umat manusia yang menghendaki kebenaran sejati. Hal ini karena sesuatu perbuatan dikategorikan sebagai jihad apabila semata-mata bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah dan membela kepentingan umat manusia yang mencari kebenaran. Peperangan tidak selamanya dapat dikategorikan sebagai jihad, seperti melanggar ketentuan Allah dan merugikan kepentingan umat manusia, walaupun para pelakunya menyatakannya sebagai jihad.

Jihad dalam bentuk peperangan diijinkan Allah Swt dengan syarat untuk membela diri ketika dizhalimi dan untuk membela dakwah dengan ketentuan dilakukan untuk tujuan damai bukan untuk permusuhan dan membuat kerusakan di muka bumi (Ghofar: 2016, 61).

Dalam kontek melawan penjajah, pengertian jihad lebih mengarah kepada jihad dalam artian perang, karena musuh merencanakan untuk menguasai negara dan perbendaharaannya, ingin menjajah bangsa serta memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai agama yang terlengkap, terakhir, dan memiliki ajaran yang dinamis, Islam sangat menekankan kepada pemeluknya agar memperhatikan persoalan jihad yang berhubungan dengan perang bersenjata, kemiliteran, ataupun sejenisnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar maksud jihad di dalam Al-Qur'an, terutama yang diiiingi kalimat *fi sabilillah* sesudahnya, berorientasi pada peperangan menggunakan senjata atau kemiliteran. Hal ini karena militer sangat penting untuk mempertahankan martabat bangsa dan melindungi rakyatnya dari gangguan musuh.

2. Dasar Resolusi Jihad

Menurut Rohimin (2006: ix) ajaran jihad merupakan salah satu ajaran penting yang dicintai Allah dan memiliki fungsi yang besar. Dalam Al-Qur'an ajaran ini digambarkan sebagai *tijârah* (sebuah perniagaan yang menguntungkan) yang dapat

menghasilkan pahala dan membebaskan manusia dari azab. Ajaran jihad memiliki keutamaan tersendiri bila dibandingkan dengan ajaran lainnya. Ajaran jihad yang dikonsepsikan Al-Qur'an memiliki andil besar bagi manusia, agama, dan negara.

Konsep jihad dalam konteks perang dapat dipahami dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 193 sebagai berikut:

وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 193).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa motivasi jihad didasarkan pada upaya menghilangkan fitnah, penganiayaan, dan kezaliman (*`udwan*). Dalam konteks perjuangan melawan penjajah, maka jihad dimaksudkan untuk membela hak-hak umat Islam yang teraniaya, seperti hak menjalankan agama, aktivitas ekonomi dan hak-hak lainnya yang terampas akibat penindasan. Jihad menurut Islam bukanlah sebuah kegiatan kejam yang ditujukan terhadap orang bukan Islam. Akan tetapi, jihad adalah sebuah peristiwa yang ditujukan kepada satu perjuangan melawan kejahatan.

Perang dalam Islam bukannya satu perbuatan yang membabi buta. Perang mempunyai fungsi materil dan moral, yaitu pemeliharaan diri sendiri dan pemeliharaan peraturan moral di dunia. Jihad juga didasarkan pada Hadis sebagaimana disebutkan dalam Hadis Bukhari sebagai berikut:

تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ

الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا، مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ (رواه البخاري)

Allah telah menjamin bagi seseorang yang keluar di jalan-Nya. Tidak ada yang mendorongnya untuk keluar, kecuali memang untuk berjihad di jalanku-Ku. karena iman kepada-Ku serta membenarkan Rasul-Ku (maka Aku yang menjaminnya, bagì Aku akan memasukkannya ke dalam *Jannah*, atau mengembalikannya ke tempat tinggalnya semula yang mana dia keluar darinya dengan membawa perolehan pahala atau *ghanimah*. (Bukhari dalam Al-Jauziyyah: 2001, 41).

Memahami Hadist di atas, orang berjihad karena dorongan keimanan dan membela agama Allah memperoleh jaminan surga jika mati di medan perang, dan memperoleh pahala yang besar jika kembali dalam keadaan selamat. Dalam konteks ini, jihad menjadi sarana untuk mempertahankan kemuliaan agama, yang ditandai dengan pengorbanan harta, tenaga dan jiwa. Kemuliaan jihad tersebut sebanding dengan jaminan yang diberikan Allah kepada mujahid yang ikhlas berjuang semata-mata untuk mencari ridha Allah. Perlawanan umat Islam Indonesia melawan penjajah yang merampas hak hidup dan menjalankan agama dengan leluasa merupakan bagian dari jihad yang mendapat legitimasi dari ajaran Islam. Walaupun slogan nasionalisme muncul dan mewarnai motivasi jihad, tetapi pada hakikatnya perjuangan melawan penjajah yang zhalim, terlebih lagi non muslim (Belanda) sejalan dengan konsep jihad dalam ajaran Islam.

Ibnu Qoyim dalam Qardhawi (2010: 21) menjelaskan hukum jihad sebagai berkut:

> Jihad adalah *fardhu 'ain*, baik dilakukan dengan hati, lisan, harta, atau tangan. Setiap Muslim harus melakukan salah satu jenis jihad tersebut. Jihad dengan nyawa (*al-jihâd bi al-nafs*) adalah *fardhu kifâyah*. Adapun jihad dengan harta, ada dua pendapat terkait kewajibannya, dan pendapat paling kuat adalah wajib. Sebab, di dalam Al-Quran, perintah jihad dengan harta dan nyawa adalah wajib.

Dari segi kelembagaan NU, resolusi jihad didasarkan pada pertemuan tanggal 21-22 Oktober 1945, yang dihadiri wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura di Surabaya yang menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad (perang suci). Deklarasi ini, kemudian terkenal sebagai "Resolusi Jihad". Resolusi ini dipertegas kembali dalam Muktamar NU di Purwokerto 26-29 Maret 1946 Resolusi ini disebarkan ke seluruh Jawa melalui jaringan pesantren, langgar, dan kiai. Para pemuda santri mengalir deras memasuki Laskar Hizbullah, sementara para kiai membentuk Laskar Sabilillah, karena dibakar oleh semangat jihad. Diyakini bahwa resolusi ini mempunyai peran yang besar dalam pertempuran 10 Nopember 1945 yang pecah di Surabaya (Salim: 2004, 156).

Dalam konteks perjuangan melawan penjajah, pemaknaan jihad memposisikan negara jajahan berjuang melawan penjajah yang mencakup unsur politik, militer, dan konfrontasi fisik. Hal ini sejalan dengan model jihad umat Islam di Madinah yang harus berjuang mempertahankan diri dari serangan musuh dengan pengerahan militer dan sumber daya yang ada untuk mencapai kemenangan. Oleh karena itu simbol-simbol agama sering menjadi pemersatu dan pembangkit perjuangan. Dalam kondisi teraniaya yang membahayakan agama, jiwa dan harta, ajaran Islam menyuruh umat Islam untuk menolak kezhaliman tersebut, walaupun dengan cara kekerasan. Oleh karena itu prinsip Islam untuk melakukan perlawanan tidak saja berdimensi keagamaan tapi juga berdimensi kemanusiaan. Secara riil, peperangan itu pada dasarnya membinasakan nyawa manusia, namun dalarn konteks jihad ini posisi perang yang disyariatkan adalah dalam rangka mempertahankan diri. Dengan demikian perang ditegakkan agar tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak di antara umat yang bertikai.

Keputusan resolusi jihad telah melandasi sikap NU terhadap ideologi, politik dan pemerintahan di Indonesia. Dari sini dapat diartikan bahwa pemerintahan dinilai dari

fungsionalisasinya, bukan dan norma formal dan eksistensinya, negara Islam atau bukan. Konsep yang seperti itu dalam mendudukkan pemerintahan pada posisi netral adalah inti dari pandangan rnazhab Syafi`i tentang tiga jenis daerah, d*ar al-Islam, dar al-harb dan dar as-sulh* (daerah Islam, daerah perang dan daerah damai).

3. Sebab-sebab Munculnya Resolusi Jihad 1945

Sebab-sebab munculnya Resolusi jihad tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya. Setelah melihat kemenangan Sekutu atas Jepang yang ditandai menyerahnya Jepang tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945, maka Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaan secara *de facto* tanggal l7 Agustus 1945. Keesokan harinya, Indonesia menetapkan Undang-Undang dan Pemerintahan Indonesia serta Lembaga Legislatif pada waktu itu PPKI, sehingga dinyatakan merdeka secara *de jure*. Sementara, kesepakatan Sekutu dengan Jepang adalah selama Sekutu belum berada di Indonesia kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada Jepang. Semangat kemerdekaan menguat sehingga terjadi perlawanan perjuangan hidup dan mati dalam mempertahankan kemerdekaan (Bustami: 2015, 138).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah membuka harapan rakyat Indonesia untuk dapat hidup sejajar dengan bangsa lain, terbebas dari belenggu penjajahan dan dapat mengatur nasibnya sendiri. Harapan tersebut membuat bangsa Indonesia yang baru tumbuh untuk menata sumber daya yang dimiliki agar dapat mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita perjuangan.

Kedatangan Sekutu yang memboceng NICA menjadi mementum bangkitnya semangat jihad. Seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam terdorong untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segenap tenaga, pikiran dan jiwa. Hal ini menggerakkan tokoh-tokoh Islam untuk mendeklarasikan resolusi jihad.

Pada 21-22 Oktober 1945, untuk merespons datangnya pasukan sekutu di Surabaya dan beberapa pelabuhan Iainnya di Indonesia, K.H. Hasyim Asy`ari mengumpulkan ulama dan konsul-konsul NU untuk membicarakan langkah-langkah yang diperlukan. Dalam pertemuan itu, hal penting yang dibahas adalah status hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Setelah dibahas selama dua hari, status hukum Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sah secara hukum fikih. Ketika ditanya bagaimana status hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diproklamasikan Soekarno Hatta pada 17 Agustus 1945, K.H. Hasyim Asy'ari menjawab: Statusnya sah secara fikih, karena itu umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankannya (Rifa`i: 2009, 33).

Keprihatinan terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda yang membonceng NICA dirasakan oleh pada tokoh-tokoh umat Islam, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kekhawatiran terhadap penindasan kembali oleh Belanda dan pengekangan menjalankan ibadah telah meluas di kalangan tokoh-tokoh NU yang pada umumnya berada di pedesaan, dimana rakyat di pedesaan menjadi sasaran utama eksploitasi hasil pertanian oleh Belanda. Tokoh umat Islam khawatir terhadap munculnya kembali penjajahan Belanda. Kondisi tersebut memunculkan formulasi gagasan jihad atas nama NU yang secara kelembagaan dilegitimasi melalui muktamar.

Pada Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, muncul pertanyaan dari Jombang: bagaimana hukum berperang untuk menolak musuh yang sudah menginjakkan kakinya di tanah air?, kemudian jawaban yang sekaligus menjadi keputusan Muktamar ada empat poin sebagai berikut:

1. Perang menolak penjajah dan para pembantunya adalah *wajib `ain* atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, juga anak-anak, yang semuanya berada di satu tempat yang dimasuki oleh mereka (penjajah dan pembantunya).

2. Wajib 'ain pula atas tiap-tiap jiwa yang berada dalam tempat yang jaraknya kurang dan 94 km dan tempat yang dimasuki mereka (penjajah).
3. *Wajib kifayah* atas segenap orang yang berada di tempat-tempat yang jaraknya 94 km dari tempat tersebut.
4. Jikalau jiwa-jiwa yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak mencukupi untuk melawannya, maka jiwa yang tersebut di dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup. (El-Guyanie: 2010, 61)

Kedaulatan Rakjat

60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berdjihad Fi Sabilillah.

Perang didjalan Allah oentoek menentang tiap-tiap penadjadjahan.

Partij Masjoemi sebagai badan perdjoeangan politik Oemmat Islam.

Peetoesan2 Moe'tamar Islam Indonesia

RESOLOESI

Moe'tamar Oemmat Islam Indonesia di Jogjakarta.

BARISAN SABILILLAH.

Rapat Oemoem Oemat Islam Indonesia

PESAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN PRO

Gambar 4.
Koran Kedaulatan Rakyat Tahun 1945 Memuat Tentang Resolusi Jihad

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas merupakan aset pertahanan nasional yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Pengalaman selama masa pendudukan Jepang telah melibatkan umat Islam Indonesia dalam kegiatan politik dan mempersiapkan mereka untuk melakukan perjuangan bersenjata. Pasca proklamasi kemerdekaan, muncul kesadaran tentang pentingnya mempertahankan kemerdekaan dengan segenap kekuatan yang ada. Kesadaran tersebut didorong pula oleh semangat jihad umat Islam yang diwujudkan dengan mobilisasi laskar jihad dan pertahanan rakyat.

Proses mobilisasi pemuda secara cepat dan spontan telah terjadi pada 1945, yang memberikan sumbangan penting bagi dorongan revolusioner perjuangan. Namun, barisan-

barisan Hizbullah yang telah terlatih dan berdisiplin terbukti secara militer Iebih unggul dan pasukan-pasukan gerilya non-regular. NU dan para pendukungnya memainkan peranan aktif dan radikal pada masa perjuangan, yang mungkin sulit dicocokkan dengan reputasi NU sebagai organisasi yang moderat dan kompromistis. Sepanjang dasawarsa akhir pemerintahan Belanda, NU selalu memberikan kesetiaannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Sikap ini sejalan dengan pandangan sunni tradisional bahwa sebuah pemerintahan yang memperbolehkan umat Islam menjalan kan kewajiban-kewajiban agamanya lebih baik dan pada fitnah (*chaos*) yang diakibatkan pemberontakan (Bruinessen: 1999, 57).

Belanda masih percaya bahwa mereka dapat memulihkan keadaan sebagaimana sebelum perang dan mengharapkan tokoh-tokoh umat Islam agar bersikap akomodatif sebagaimana sebelumnya. Kekalahan Jepang Jepang dalam perang dunia kedua mendorong Belanda untuk mengambil kesempatan agar dapat memulihkan kekuasaannya di Indonesia. Tindakan Belanda tersebut didorong oleh kepercayaan diri karena dukungan kekuatan Sekutu yang tergabung dalam *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA).

Tentara Inggris pertama sudah mendarat di Jakarta pada akhir September 1945, yang menduduki ibukota atas nama *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Pada pertengahan Oktober 1945, pasukan Jepang merebut kembali beberapa kota Jawa yang telah jatuh ke tangan Indonesia dan kemudian menyerahkannya kepada Inggris. Demikian juga di Surabaya, kedatangan pasukan Inggris ditunggu dengan gelisah mereka masuk pada 25 Oktober 1945. Pemerintah Republik yang telah memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 masih menahan diri dari melakukan perlawanan. Pemerintah mengharapkan adanya penyelesaian secara diplomatik dan tampaknya menerima saja ketika bendera Belanda dikibarkan lagi di Jakarta.

Pendaratan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) di Indonesia memicu kemarahan rakyat Indonesia yang tidak rela untuk dijajah kembali oleh Belanda. Umat Islam tampil terdepan dalam perjuangan menentang pendudukan kembali *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah berperan dalam mobilisasi kekuatan rakyat, sehingga terbentuk wadah perjuangan rakyat (Bruinessen: 1999, 57).

Para tokoh-tokoh NU mengadakan rapat di Surabaya pada 22 Oktober 1945 dan mengeluarkan "Resolusi Jihad" yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (*jihad*). Berjuang menentang kembalinya Tentara Sekutu termasuk Belanda) dinyatakan sebagai kewajiban setiap muslim Resolusi itu, berarti penolakan terhadap kembalinya kekuatan kolonial dan mengakui kekuasaan suatu pemerintah republik baru (Hasyim dan Ridwan: 2004, 21).

K.H. Hasyim Asy'ari terdorong untuk mengeluarkan sebuah fatwa terkenal dengan nama "Resolusi Jihad" pada tanggal 22 Oktober 1945. Sebuah kebulatan tekad yang isinya mewajibkan kepada seluruh umat Islam baik pria maupun wanita mengangkat senjata melawan kolonialisme dan imperialisme yang mengancam keselamatan negara Republik Indonesia (Farih: 2016, 255).

Berdasarkan kutipan di atas, resolusi jihad dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945, sebelum terjadinya perang 10 November 1945 di Surabaya. Munculnya resolusi jihad tersebut dorongan dari wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya yang menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad. Resolusi jihad merupakan respon tokoh-tokoh NU terhadap perlunya mobilisa- si dan persiapan rakyat untuk menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Kondisi penduduk Surabaya semakin menuju kepada kesatuan semangat juang pada akhir bulan September dan Oktober 1945. Para pejuang di Surabaya memiliki kesamaan pandang bahwa kemerdekaan yang batu

saja diperoleh mendapat ancaman oleh Belanda yang membonceng Sekutu. Kesamaan tekad ini yang membuat mereka terkondisikan daIam satu sikap bulat yakni akan menempuh cara apapun untuk mempertahankan kemerdekaan, walaupun secara militer kalah dari kekuatan Inggris dan Sekutu.

B. Fatwa Jihad K.H. Hasyim Asy'ari

Fatwa jihad K.H. Hasyim Asy'ari menunjukkan perhatian besar terhadap kepentingan situasi sehingga dibutuhkan fatwa untuk melegitamasi konfrontasi fisik dari sisi ajaran Islam. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum resolusi jihad, umat Islam bersikap apatis terhadap penjajahan, namun situasi dan kondisi saat itu membutuhkan fatwa sebagai penguat dan sandaran untuk berjihad.

"Resolusi Jihad" meminta pemerintah republik mendeklarasikan Perang Suci. Resolusi ini nampaknya merupakan pengakuan legitimasi bagi pemerintah dan sekaligus kritik tidak langsung terhadap sikap pasifnya (Bruinessen: 1999, 60).

Resolusi jihad merupakan respon terhadap sikap pasif pemerintah dalam masa-masa transisi pendudukan Jepang kepada Sekutu. Pemerintahan Indonesia belum sepenuhnya berjalan efektif pasca proklamasi kemerdekaan, dan belum dapat menkonsolidasikan kekuatan militer sebagaimana layaknya bangsa yang berdualat. Namun demikian, umat Islam khususnya tokoh-tokoh NU meyakini dari sudut pandang agama (*fiqh siyasah*) bahwa pemerintahan yang terbentuk hasil proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pemerintahan yang sah, dan wajib dipertahankan walaupun harus melalui konfrontasi bersenjata. Dalam pandangan NU, sejak proklamasi kemerdekaan, Pemerintah RI adalah pemerintah yang sah sesuai hukum Islam, dan oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa negeri Indonesia adalah negeri Islam. Oleh karena itu, usaha kaum penjajah untuk merampas kemerdekaan itu adalah usaha yang harus dilawan atas nama *jihad fi sabilillah*.

Jaringan pesantren dan tokoh-tokoh NU terutama yang berada di pedesaan, secara masif berkontribusi dalam sosialisasi

fatwa jihad. Kesadaran umat Islam yang sudah terbentuk menjadi lebih kuat, sehingga memobilisasi kekuatan rakyat menjadi lebih mudah. Terbentuknya laskar jihad seperti Sabilillah dan Hizbullah membuktikan peran resolusi jihad dalam membangkitkan semangat perjuangan umat Islam.

Adapun bunyi resolusi jihad yang difatwakan oleh K.H. Hasyim Asy`ari sebagaimana dikutip oleh Rifa`i (2009: 74) adalah sebagai berikut:

1. Kemerdekaan Indonesia yang relah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan.
2. Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun jiwa.
3. Musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan Sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali bangsa Indonesia setelah Jepang ditaklukkan.
4. Umat Islam, khususnya warga NU, harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali.
5. Kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer (sama jaraknya dengan *qashar*, di mana meringkas shalat boleh ditunaikan oleh Muslim santri).
6. Mereka yang berada di luar radius itu mempunyai tanggung jawab mendukung saudara-saudara Muslim mereka yang tengah berjuang dalam radius tersebut.

Memahami isi resolusi jihad di atas, dapat dikemukakan bahwa fatwa jihad yang dikeluarkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari didasari oleh cara berfikir seorang ahli fiqh yang mencerminkan penguasaan terhadap metode penggalian hukum serta penguasaan konteks kesejarahan dimana rumusan hukum yang dihasilkannya tersebut diterapkan. K.H. Hasyim Asy'ari tidak sekedar mengambil referensi hasil ijtihad ulama klasik, tetapi lebih dan itu, mengeksplorasi sumber-sumber otentik ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks kesejarahannya.

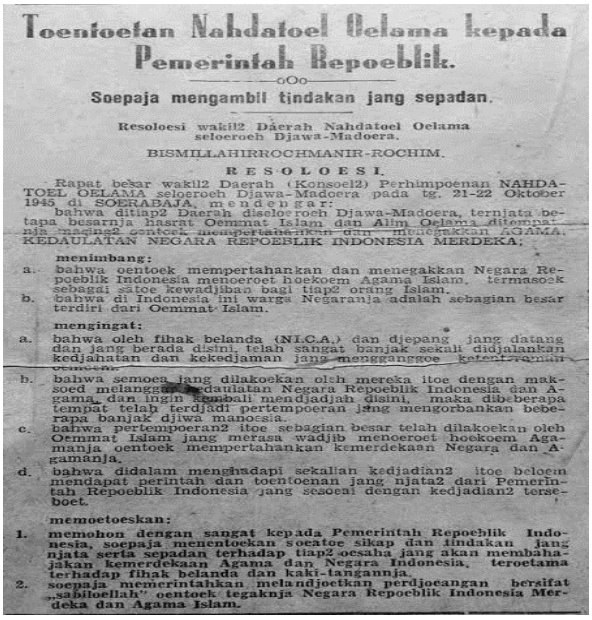

Toentoetan Nahdatoel Oelama kepada Pemerintah Repoeblik.

oOo

Soepaja mengambil tindakan jang sepadan.

Resoloesi wakil2 Daerah Nahdatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera.

BISMILLAHIRROCHMANIR-ROCHIM.

R E S O L O E S I.

Rapat besar wakil2 Daerah (Konsoel2) Perhimpoenan NAHDATOEL OELAMA seloeroeh Djawa-Madoera pada tg. 21-22 Oktober 1945 di SOERABAJA, m e n d e n g a r:

bahwa ditiap2 Daerah diseloeroeh Djawa-Madoera, ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan Alim Oelama ditempatnja masing2 soentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA;

menimbang:

a. bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menoeroet hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai sätoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.
b. bahwa di Indonesia ini warga Negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam.

mengingat:

a. bahwa oleh fihak belanda (NICA) dan djepang jang datang dan jang berada disini, telah sangat banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang mengganggoe ketentraman oemoem.
b. bahwa semoea jang dilakoekan olh mereka itoe dengan maksoed melanggar kedaulatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah disini, maka dibeberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia.
c. bahwa pertempoeran2 itoe sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan kemerdekaan Negara dan Agamanja.
d. bahwa didalam menghadapi sekalian kedjadian2 itoe beloem mendapat perintah dan toentoenan jang njata2 dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang seseoai dengan kedjadian2 tersebut.

memoetoeskan:

1. **memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia, soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap tiap2 oesaha jang akan membahajakan kemerdekaan Agama dan Negara Indonesia, teroetama terhadap fihak belanda dan kaki-tangannja.**
2. **soepaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat „sabiloellah" oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.**

Gambar 5.
Isi Resolusi Jihad yang dimuat Oleh Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 26 Oktober 1945

Fatwa K.H. Hasyim dinyatakan bahwa sebelum rapat yang dihadiri oleh seluruh konsul NU se-Jawa dan Madura tanggal 21-22 Oktober 1945 didahuli oleh penjelasan K.H. Hasyim Asy'ari tentang kewajiban mempertahankan republik adalah kewajiban agama bagi semua orang Islam (*fardhu 'ain*). Hasil rapat itu mengimplementasikan isi fatwa yang hanya dapat diketahui secara tertulis sebagaimana yang dinyatakan daIam *Kedaulatan Rakjat*, Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 1945 tertulis "*Toentoetan Nahdlatoel Oelama kepada Pemerintah Repoeblik Soepaja mengambil tindakan jang sepadan Resoloesi*" (Bustami: 2015, 149).

Isi pokok resolusi jihad K.H. Hasyim Asy'ari adalah kewajiban mempertahankan republik adalah kewajiban agama bagi semua orang Islam (*fardhu 'ain*). Fatwa tersebut mengandung arti bahwa tidak ada alasan bagi setiap muslim yang sedang tidak ada *udzur syar`i* untuk menghindari kewajiban jihad. Setiap muslim yang sudah dewasa dan berada dalam radius kurang dari jarak shalat *qhasar*, diwajibkan untuk berjihad dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, walaupun dengan senjata yang seadanya.

Kondisi Indonesia setelah berhasil mempertahankan diri sebagai negara rnerdeka dan berdaulat, NU mengeluarkan statemen politik yang dikenal dengan Resolusi Jihad. Resolusi jihad ini dikumandangkan pada tangal 22 Oktober 1945. dan dikukuhkan dalam Muktamar XVI NU di Purwokerto tanggal 26-29 Maret 1946. Resolusi jihad melawan penjajah hukumnya adalah *fardhu 'ain*. Hal tersebut menegaskan sikap NU untuk membela kernerdekaan dan upaya kolonial yang akan merebut kembali kemerdekaan Indonesia (Ghofar: 2016, 155).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa fatwa resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya tuntutan NU kepada Pemerintah Republik supaya mengambil tindakan yang sepadan. Tuntutan itu dinyatakan tentang Resolusi Nahdlatul Ulama memuat tentang keputusan: Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki-tangannya dan supaya memerintahkan meIanjutkan perjuangan bersifat *sabilillah* untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Rumusan tersebut bertajuk Tuntutan Nahdlatul Ulama kepada Pemerintah soepaya mengambil tindakan yang sepadan yang selanjutnya dikenal dengan Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945 sebelum 10 November 1945.

Keluarnya Resolusi Jihad tidak terlepas dari pandangan K.H. Hasyim Asy'ari mengenai Islam dan kenegaraan. Dalam pandangan KH. Hasyim Asy'ari, mempertahankan eksistensi NKRI dari segala hal yang mengancamnya wajib dilakukan oleh umat Islam, bukan semata-mata atas nama nasionalisme, namun untuk keberlangsungan kehidupan umat Islam yang berdiam di negara tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pidatonya yang disampaikan pada Muktamar NU ke-XVI di Purwekorto 26-29 Maret 1946. K.H. Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa tidak akan tercapai kemuliaan Islam dan kebangkitan syariatnya di dalam negeri-negeri jajahan. Dengan kata lain, syariat Islam tidak akan bisa dilaksanakan di negeri yang terjajah.

C. Implikasi Resolusi Jihad K.H. Hasyim Asy'ari

Keberhasilan perjuangan pada dasarnya tidak dapat dilihat hanya dari kekuatan militer dan senjata secara fisik, tetapi juga semangat perjuangan yang menggerakkan perlawanan. Dalam konteks ini resolusi jihad K.H. Hasyim Asy'ari sangat berpengaruh pada moral perjuangan Umat Islam. K.H. Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi psikis para pejuang, sehingga memperteguh pendirian untuk menjalankan resolusi jihad yang telah difatwakan.

> Resolusi jihad tidak hanya sebagai pengobar semangat ulama-santri, tapi juga bertujuan mempengaruhi pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin rnenggagalkan kemerdekaan. Banyak terjadi pertempuran-pertempuran yang melibatkan para Kyai dan santri yang tcrgabung dalam laskar *Hizbullah* dan *Sabilillah*. Di saat tentara negara belum efektif terutama jalur komandonya, laskarnya ulama santri tclah sigap menghadapi berbagai ancaman yang akan terjadi. Bahkan konsolidasi dan jalur komando laskar *Hizbullah* dengan dukungan struktur NU dan Masyumi begitu massif hingga ke pedesaan. Padahal Presiden Sukarno mengeluarkan dan menandatangani maklumat tentang pembentukan tentara nasional yang dinamakan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945, dan masih menitikberatkan fungsi kearnanan. Karenanya, fungsi pertahanan acapkali dilakukan oleh kesatuan kesatuan laskar di berbagai daerah. Hizbullah merupakan kesatuan laskar yang cukup solid dan telah memiliki anggota yang cukup banyak. Di bawah bendera Masyurmi, semua ormas Islam telah membentuk laskar-laskar Hizbullah di daerahnya masing-masing (Hamid: 2017, 126).

Berdasarkan uraian di atas, resolusi jihad berdampak besar terhadap bangkitnya semangat pemuda untuk melawan Belanda. Gelora semangat tersebut dibuktikan dengan banyaknya pemuda yang berbondong-bondong untuk ikut dalam perlawanan bersenjata. Semangat jihad telah menggerakkan para pemuda yang belum pernah sama sekali mengangkat senjata untuk ikut berperang. Tekad mengusir penjajah yang disertai dengan

kesadaran tentang wajibnya jihad telah memperteguh mental mereka, sehingga terpanggil secara sukarela untuk ikut berperang.

Resolusi jihad memiliki dampak signifikan terhadap konsolidasi kekuatan bersenjata non reguler, di bawah naungan laskar jihad seperti Sabilillah dan Hizbullah. Dalam kondisi militer suatu negara yang belum terbentuk secara solid, maka unsur-unsur kekuatan non reguler yang berintikan barisan pejuang Islam, setidaknya dapat mengisi kekosongan peran militer, terlebih lagi dalam situasi upaya pendudukan kembali oleh Belanda.

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas merupakan kekuatan inti perjuangan melawan penjajah. Tampilnya tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Hasyim Asy`ari telah memberi suntikan moral bagi semangat perjuangan rakyat. Dengan segala keterbatasan yang ada, terutama dari segi persenjataan militer, maka resolusi jihad mengambil peran sebagai senjata moral melawan ketidakadilan.

Dampak resolusi jihad terhadap bangkitnya semangat umat Islam melawan pendudukan Sekutu dikemukakan oleh Bruinessen (1999: 60) sebagai berikut:

> Tidak dapat diingkari, "resolusi jihad" berdampak besar di Jawa Timur. Pasukan-pasukan non-reguler yang bernama Sabilillah rupanya dibentuk sebagai respon Iangsung atas resolusi ini. Namanya langsung merujuk kepada "perang suci". Pada 10 Nopember, dua minggu setelah kedatangan pasukan Inggris di Surabaya. Sebuah pemberontakan massa pecah, dimana banyak pengikut NU yang terlibat aktif. Banyak di antara pejuang muda yang mengenakan jimat yang diberikan kiai desa kepada mereka. Bung Tomo, yang menggerakkan massa ke dalam perjuangan melalui pidato radionya, mungkin tidak pernah menjadi santri, tetapi diketahui meminta nasihat kepada Kiai Hasjim Asy'ari.'

Bustami (2015: 177) mengemukakan pengaruh resolusi jihad terhadap rakyat Kebumen sebagaimana informasi dari koran Merdeka pada 23 Oktober 1945 dengan judul *Mosi Rakjat Moeslimin Keboemen Berjoeang Soenggoeh- soenggoeh di djalan Allah oentoek Mempertahankan Repoeblik Indonesia*.

Lebih lanjut Bustami (2015: 178) mengemukakan resolusi jihad berdampak nyata pada pasukan reguler, terutama pada pasukan non reguler Nahdliyyin yang terlatih. NU mempunyai Hizbullah (*Kaikyo Seinen Teishinta*) yang terlatih sejak tanggal 13 Desember 1944. Hizbullah memiliki Barisan Berani Mati (*Jibakutal*) tanggal 8 Desember 1944 dan Barisan Pelopor (*Suishinta*) tanggal 1 Nopember 1944. Sementara, MIAI (Majelis Islam 'Ala lndonesia) Surabaya dipimpin oleh K.H. Thohir Bakri dan Anwar Zain. Anggota Hizbullah diikutsertakan pelatihan di Cisarua tanggal 12 Februari-14 Maret 1945. Mereka yang terekrut ada!ah: Surabaya (Moestaqin Zain, M. Moehadjir), Mojokerto (Moeljadi, A. Qosim), Gresik (Rodi As'ad, M. Ghozali), Sidoarjo (Moh. Farchan, Djawani), Jombang (Sa'doellah, Hasyim Lathif) dengan pelatih Jepang Yanagawa. Pelatihan itu diberi sambutan oleh Zainul Arifin (Pimpinan Pusat Hizbullah) dan Ketua Muda (K.H. Wahid Hasyim).

Dampak resolusi jihad terhadap perjuangan juga telah melahirkan slogan-slogan perjuangan melawan penjajah, seperti yang diciptakan oleh K.H. Wahab Hasullah sebagai berikut:

يَا لَلْوَطَن يَا لَلْوَطَن يَا لَلْوَطَن حُبُّ الْوَطَن مِنَ الْإِيْمَان

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْحِرْمَان اِنْهَضُوْا أَهْلَ الْوَطَن

إِنْدُونَيْسِيَا بِلَادِيْ أَنْتَ عُنْوَانُ الْفَخَامَا

كُلُّ مَنْ يَأْتِيْكَ يَوْمَا طَامِحًا يَلْقَ حِمَامَا

Pusaka hati wahai tanah airku
Cintaku dalam imanku
Jangan halangkan nasibmu
Bangkítlah, hai bangsaku
Indonesia negeriku
Engkau panji martabatku
Siapa datang mengancammu
Kan binasa dibawah dulimu (Bizawie: 2014,143).

Gema resolusi jihad bergelora seiring dengan slogan-slogan perjuangan. Secara mental rakyat Indonesia sudah berketetapan untuk melawan penjajahan kembali Belanda, walaupun dengan persenjataan seadanya. Petikan lagu perjuangan di atas menggambarkan semangat perjuangan umat Islam yang dilandasi oleh keimanan dan kecintaan terhadap tanah air. Lagu tersebut mengandung pesan kebanggaan terhadap martabat negara, dan kerelaan untuk melindunginya dari ancaman musuh.

Resolusi jihad kemudian tersebar luas dikumandangkan. oleh Bung Tomo dengan mengucapkan takbir *Allahu Akbar* melalui Radio ketika memberi wejangan kepada para pejuang di Markas Kiai Blauran. Para Kiai dan utusannya terus membanjiri Surabaya dengan mendirikan markas di rumah K.H. Yasin di Blauran Gang IV/ 24 Surabaya sehingga dikenal dengan sebutan Markas Kiai. Para santri dan umat Islam berjuang dengan dukungan fatwa K.H. Hasyim Asy'ari (Tebuireng) yaltu: Bagi sekalian orang Islam, yang dewasa untuk berjuang melawan musuh yang akan menjajah Indonesia kembali, hukumnya adalah *fardhu 'ain*. Fatwa selanjutnya adaIah mati di medan perang dalam rangka memerangi musuh umat Islam adalah mati syahid dan orang yang mati seperti itu akan masuk surga.

> Resolusi Jihad menjadi pegangan bagi kalangan Islam dalam melakukan perjuangan menghadapi NICA-Belanda dan pasukan Inggris. Konsul-konsul yang hadir dalam pertemuan di Bubutan Surabaya memiliki tugas dan amanah untuk menyebarkan resolusi ini kepada umat Islam di daerahnya masing-masing. Salinan keputusan Resolusi Jihad ini juga dikirimkan kepada Presiden Sukarno, pimpinan Angkatan Perang Indonesia, dan kepada Markas Tinggi Hizbullah dan Fisabilillah (Bizawie: 2014, 208).

Seruan jihad yang dikumandangkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari diikuti ribuan kiai dan santri untuk melawan penjajah Belanda. Seruan yang terkenal dengan Resolusi Jihad ini berisi tiga hal penting: pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan

Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Seruan ini terbukti ampuh untuk menggerakkan semangat perjuangan bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Madura.

Sejarah membuktikan bahwa resolusi jihad benar-benar menjadi faktor penentu berlanjut atau tidaknya kemerdekaan Indonesia. Artinya, dampak nyata dan resolusi jihad adalah kemerdekaan Indonesia itu sendiri, yang sampai sekarang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara dampak bagi internal NU adalah banyaknya santri-santri yang kemudian direkrut menjadi tentara nasional. Selain itu juga, banyak kiai yang mendapatkan gelar pahlawan nasional dan pemerintah (El-Guyanie: 2010, 120).

Harian *Ra`jat* tanggal 14 Nopember 1945 sebagaimana dikutip Bustami (2015: 181) memberitakan kondisi perjuangan para kiai sebagai dampak resolusi jihad sebagai berikut:

> *Kijahi alim oelama dari berbagai wilajah telah membandjiri Soerabaja bersedia mati demi bangsanja. Mereka jang mengalir teroes meneroes ke Soerabaja itoe telah teken mati. Mereka bersedia berkoerban oentoek kedaulatan negara dan bangsanja. Mereka telah menjerahkan diri pada Toehan. Allah Hoe Akbar. Mati sjahid. Kijahi-Kijahi sekailan rakjat Indonesia dimoelai kata Kijahi Mashoed dari Radio Pemberontak Soerabaja. Berangkatlah ke Soerabaja'*

Kondisi Surabaya yang heroik menyatu dengan semangat jihad yang kuat, dan kerelaan berkorban demi bangsa, negara dan agama. Ulama dan seluruh lapisan rakyat bahu membahu mempertahankan kota Surabaya yang dibuktikan dengan terjadinya perang 10 November 1945. Surabaya menjadi saksi perjuangan umat Islam dan seluruh lapisan masyarakat yang tidak rela dijajah kembali. Dampak dari Resolusi Jihad luar biasa. Pergolakan awal di Surabaya berlangsung dengan begitu heroik dan sengit sehìngga membuat pasukan Inggris kewalahan. Selain itu kekuatan para pejuang yang sudah sangat solid dan padu kemudian mendapatkan

tambahan dengan hadirnya badan-badan perjuangan baik dari kalangan Islam dari luar kota Surabaya yang datang ke kota ini untuk bersama-sama menghadapi Inggris.

> Surabaya menjadi medan pertemuan yang cukup menghentakkan pihak sekutu. Surabaya menjadi *melting pot* laskar Hizbullah dari berbagai daerah. Dengan berbekal fatwa jihad yang diteguhkan resolusi jihad, para pejuang pantang mundur menolak kedatangrn kolonial. Resolusi Jihad tersebut menyeru seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam Untuk membela NKRI. Pertempuran 10 November 1945 meletus, laskar ulama santri dan berbadai daerah berada di garda depan pertempuran. Resolusi jihad juga membahana di Semarang dan sekitarnya, bahkan telah mengiringi keherhasilan dalam Perang Sabil Palagan Ambarawa. Para laskar ulama santri juga terus melakukan petempuran mempertahankan daerahnya masing-masing termasuk di tanah Pasundan dan di luar Jawa (Bizawie: 2016, 28).

Salim (2004: 156) menjelaskan hasil perbincangan dengan Kiai Moenasir, Komandan Batalyon Laskar Hizbullah Mojokerto pasca keluarnya resolusi jihad. Menurut Moenasir, setelah resolusi itu minat pemuda untuk ikut serta dalam perang meningkat tajam. Menjelang hari-hari meletusnya Perang 10 November 1945, truk yang mengangkut anggota laskar Hizbullah dari Mojokerto yang berada di bawah komandonya beberapa kali tertunda berangkat karena terlalu penuh para pemuda yang ingin ikut ke medan perang. Berulang kali para pimpinan pemuda Hizbullah membujuk dan memberi pengertian agar sebagian mereka turun dan menunggu giliran truk berikutnya, namun permintaan ini ditolak karena para pemuda itu khawatir sama sekali tidak terangkut Selain alasan terlalu penuh sehingga membahayakan. Menurut Moenasir, alasan mendasar lainnya adalah kebanyakan para pemuda itu betul-betul bermodal semangat, tanpa pengetahuan perang sama sekali, bahkan banyak di antara mereka yang belum pemah sama sekali memegang senjata.

Tanggal 23 Oktober 1945 di tengah kesibukan berlatih rnenembak dan mempersiapkan penyambutan kedatangan Sekutu

serta membincang Seruan jihad *fi sabilillah* yang disampaikan K.H. Hasyim Asy'ari, penduduk Kota Surabaya hangat membincang tentang bakal terjadinya perang besar di Surabaya melawan bala tentara Inggris dan Belanda yang akan datang atas nama Sekutu (Sunyoto: 2017, 154).

Pendaratan tentara Sekutu di Surabaya menyebabkan kewaspadaan yang tinggi terhadap penjajahan kembali. Kemerdekaan yang belum lama diproklamirkan menjadi alasan tersendiri terhadap setiap pendarataan tentara asing, terutama kemungkinan dimanfaatkan oleh Belanda dengan membonceng NICA. Dalam kondisi tersebut, resolusi jihad telah memainkan peran penting membentuk semangat pejuangan.

> Ketika dua minggu setelah Inggris mendarat di Surabaya pertempuran Surabaya pecah. Peran serta Nahdliyyin dalam pertempuran tidak sedikit dengan mengenakan jimat yang diberikan oleh Kiai desa kepada pejuang. Bahkan, Bung Tomo yang menggerakkan massa yang tidak pernah menjadi santri tetapi dia meminta nasehat kepada K.H. Hasyim Asy'ari (Bustami: 178).

Perang 10 November 1945 menjadi salah satu pembuktian implikasi resolusi jihad terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dari segi perbandingan militer, perang 10 November 1945 menampilkan dua kekuatan militer yang tidak seimbang. Kekuatan militer Sekutu (Inggris) sebagai pemenang perang dunia kedua, jelas tidak sebanding dengan kekuatan rakyat Surabaya yang pada umumnya menggunakan senjata hasil rampasan dari Jepang. Selebihnya menggunakan senjata seadanya, bahkan dengan bambu runcing sekalipun. Kondisi tersebut layak dicermati adanya faktor lain yang membangkitkan semangat perlawanan, di tengah ketidak seimbangan. Dalam hal ini, kondisi kota Surabaya yang banyak dihuni oleh para kyai dan santri juga menjadi determinan bangkitnya perjuangan. Selain itu, jarak kota Surabaya yang tidak jauh dari kota-kota lain yang dihuni banyak pesantren memudahkan moblisasi kekuatan jihad umat Islam.

> Setiap umat Islam wajib membela Tanah Air. Bahkan, haram hukumnya mundur ketika berhadapan dengan penjajah dalam radius 94 km. Jarak ini disesuaikan dengan dibolehkannya qashar shalat. Di luar radius itu dianggap *fardlu kifayah* (kewajiban kolektif). Fatwa jihad yang ditulis dengan huruf pegon' itu kemudian digelorakan Bung Tomo melalui radio. Maka, warga Surabaya dan masyarakat Jawa Tiinur yang keberagamaannya kuat dan mayoritas NU itu terbakar semangatnya. Ribuan badan santri dan berbagai daerah mengalir ke Surabaya. Perang tak terelakkan sampai akhirnya Jenderal Mallaby tewas di tempat (Nurhuda: 2008, 22).

Peran kyai dan tokoh-tokoh di pedesaan menjadi faktor penentu keberhasilan sosialisasi resolusi jihad yang memerintahkan bahwa jika musuh memasuki negeri Islam dan mendudukinya, maka bagi penduduk negeri tersebut berkewajiban untuk memeranginya. Jika penduduk negeri tersebut tidak punya kemampuan untuk membelanya, maka kewajiban untuk berperang tersebut berlaku bagi seluruh ummat Islam sampai musuh terusir kembali ke negeri mereka. Jika penduduk negeri tersebut punya kemampuan untuk membela, kewajiban untuk berjihad sebagai *fardlu kifayah* tetap tidak gugur bagi segenap umat Islam selama musuh masih berada di negeri Islam.

Dampak resolusi jihad bukan hanya terasa di Surabaya yang ditandai dengan meletusnya perang 10 November 1945, tetapi juga menjalar ke kota-kota lain di pulau Jawa, seperti Semarang, Bandung dan Jakarta. Sesuai himbauan dari pemerintah pusat di Jakarta, kedatangan pasukan Inggris mendapatkan sambutan yang baik dan para pemimpin di Semarang. Bahkan pihak Indonesia bersedia mengadakan perundingan yang ditujukan untuk membantu misi pasukan Inggris dalam rangka menjalankan misi AFNEI-nya. Meskipun demikian, kesediaan berunding yang dilakukan oleh para pimpinan Republik ini tidak didasarkan kepada sikap percaya sepenuhnya kepada Inggris. Sikap seperti ini terutama ditunjukkan oleh perwakilan pemuda pejuang yang juga turut disertakan dalam perundingan tersebut.

> Inggris cukup berhati-hati karena mengetahui betapa gigihnya para pejuang Republik di Semarang ketika menghadapi pertempuran lima hari melawan Jepang dan pertempuran di Surabaya. Untuk mengantisipasi tidak terjadinya seperti pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Jenderal Bethel melakukan pidato radio pada keesokan harinya, 11 November 1945, dengan menyatakan bahwa pasukan lnggris yang dipimpinnya di Semarang hanya akan membatasi diri pada penanganan dan tugas mengurusi para tawanan perang serta perlucutan senjata Jepang (Bizawie: 2014, 241).

Dalam perundingan antara pihak Sekutu dengan pemerintah RI didapatkan kesepakatan: bahwa kedatangan pasukan Inggris tidak dalam kapasitas untuk ikut terlibat dan mengatur urusan politik, pemerintahan, dan pekerjaan; dan penjagaan keamanan kota diserahkan kepada Polisi Republik Indonesia sebagai pengganti dan polisi Jepang yang sebelumnya masih terdapat di beberapa tempat di dalam kota.

Situasi yang berlangsung di Jawa Tengah memang tidak sepanas sebagaimana yang terjadi di Surabaya. Namun demikian, serangkaian pergolakan dalam upaya mengambil alih kekuasaan dan persenjataan dan Jepang, di beberapa kota juga terjadi bentrokan-bentrokan. Pertempuran besar di Ambarawa merupakan mata rantai dan rangkaian kejadian yang berlangsung di Semarang yang dimulai dan bentrokan dengan pasukan Jepang dan pendaratan pasukan Inggris.

Setelah Inggris mendarat di Semarang, mereka bergerak ke Magelang. Untuk menjamin kelangsungan hubungan pasukan-pasukannya di kedua kota itu Inggris mengerahkan pesawat-pesawat RAF untuk melakukan pengawalan udara dan terkadang melakukan pemboman di sepanjang jalan raya yang menghubungkan dua kota ini.

> Tindakan Inggris terhadap Magelang mengundang reaksi dan tentara Republik dan kesatuan perjuangan daerah lain untuk datang membantu. Mereka datang dari Banyumas, Kedu, Yogyakarta dan sekitarnya. Mereka juga terus melakukan penggalangan dan mengutuk tindakan pasukan Inggnis dan Jepang. A.H. Nasution mencatat sebanyak 50.000 Laskar

> Sabilillah di Karesiden Kedu mengeluarkan sikap tidak bisa menerima tindakan pasukan Inggris itu dan bersiap untuk terjun ke medan tempur untuk menghadapinya (Bizawie: 2014, 246).

Inggris memutuskan untuk membatalkan menguasai Magelang dan mengundurkan diri ke Semarang, karena terbatasnya jumlah pasukan yang dimiliki dengan tanpa memberitahu kepada perwakilan Indonesia. Keputusan mundur dan Magelang ini sengaja diambil karena Inggris merasa kurang yakin dengan kekuatannya, terlebih mereka juga mengetahui pihak Republik di Magelang dan sekitarnya telah terkonsolidasi untuk melakukan pertempuran. Luasnya area kota Magelang dan kurang idealnya kekuatan yang dimiliki telah menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Inggris. Untuk itu mereka mengundurkan diri dan mengalihkan kekuatannya ke Ambarawa.

Menurut El-Guyanie (2010: 100), ada dua implikasi resolusi jihad terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia sebagai berikut:

> Pertama, dampak politik. Lahirnya Resolusi Jihad, secara politik meneguhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa (*Nation state*) yang merdeka dan segala bentuk penjajahan. Meski setelah prokiamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia berdarah-darah untuk menghadapi masuknya tentara Sekutu, agresi militer Belanda pertama dan kedua.
>
> Kedua dampak militer. Resolusi Jihad, dengan tampilnya laskar Hizbullah dan Sabilillah, berkontribusi besar melahirkan tentara nasional. Tanpa laskar-laskar tersebut, yang terkomando dalam resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan, rekruitmen tentara nasional akan mengaalami kesulitan.

Resolusi jihad dari segi militer memberi dampak signifikan terhadap pembentukan laskar-laskar jihad terutama menjelang perang 10 November 1945. Walaupun kedahsyatan perang tersebut tidak diprediksi sebelumnya, tetapi kewaspadaan dan antisipasi penjajahan kembali telah memobilisasi gerakan pejuang sehingga dengan cepat memunculkan laskar-laskar jihad. Belum

terbentuknya komando tentara nasional, juga menjadi faktor efektivitas resolusi jihad dalam membangkitkan semangat perjuangan. Rakyat melihat bahwa dalam kondisi negara yang belum siap berperang secara militer, maka tanggung jawab perjuangan, tidak hanya dibebankan kepada tentara, tetapi kepada seluruh warga negara.

Dengan Iahirnya resolusi jihad semangat umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan semakin terbakar. Peristiwa heroik 10 November 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan tidak terlepas dari semangat Resolusi Jihad yang dicetuskan di markas NU, Bubutan Surabaya. Kiranya kegigihan perjuangan Kiai Hasyim tersebut cukup menjadi alasan untuk memberi penghargaan kepada K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam Keppres nomor 249 tahun 1964 (Bustami: 2015,167).

K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad dengan substansi penolakan kembalinya kekuasan kolonial dan mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang baru merdeka sesual dengan hukum Islam. Peran K.H. Hasyim Asy'ari dalam perspektif sejarah menunjukkan kontribusi K.H. Hasyim Asy'ari dalam perjuangan menegakkan keadilan, kebenaran, dan *amar makruf nahi munkar*.

Munculnya resolusi jihad mempertimbangkan banyak aspek. Status Indonesia yang memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Maka pada saat status Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh dan kemudian terjadi pendudukan atasnya, apalagi oleh mereka yang beragama non Islam, maka hal ini dianggap sebagai upaya melakukan perebutan atas hak-hak umat Islam yang dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan dan hak-hak ibadahnya sebagai umat muslim. Maka di sinilah kemudian muncul pernyataan Indonesia sebagai *darul Harb* yang tentunya harus dilakukan upaya peperangan untuk merebut kembali kemerdekaannya.

Bagi K.H. Hasyim Asy'ari dan NU, baik Belanda maupun Jepang bukan lagi pemegang kekuasaan yang sah. Kedatangan Belanda yang membonceng kekuatan sekutu, dipandang sebagal

agresi yang menentang kekuasaan muslim yang sah, yaitu pemerintahan Republik Indonesia. Maka, tidak ada pilihan lain bagi NU selain berada di belakang Republik dan mengusir tentara sekutu. Dalam pandangan K.H. Hasyim Asy'ari dan NU, sejak proklamasi kemerdekaan, Pemerintah RI adalah pemerintah yang sah sesuai hukum Islam, dan oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa negeri Indonesia adalah negeri Islam. OIeh karena itu, usaha untuk merampas kemerdekaan itu adalah usaha yang harus dilawan menurut titah Islam. Di sinilah, idiom keagamaan berupa *jihad fi sabillliah* melawan kembalinya kekuatan penjajah menemukan relevansi konseptualnya.

D. Segi Pedagogis

1. Ajaran Islam menganjurkan jihad dalam konteks perjuangan membela kebenaran, mempertahankan hak hidup, martabat dan harga diri bangsa. Dalam perspektif sejarah, penjajahan di Indonesia telah merampas hak rakyat Indonesia untuk dapat hidup secara merdeka dan bermartabat. Penjajahan juga telah mengekang kebebasan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini merupakan bentuk kezhaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga upaya menghilangkan kezhaliman tersebut menjadi momentum bangkitnya semangat jihad umat Islam.
2. Resolusi jihad yang digagas oleh K.H. Hasyim Asy'ari mengandung nilai-nilai moral dan semangat kebangsaan, terlebih lagi dari aspek perjuangan melawan kebatilan dan kezhaliman yang diajarkan syariat Islam. Dari segi moral, resolusi jihad mengandung pesan luhur tentang kemuliaan martabat manusia yang tidak selayaknya ditindas dan dirampas hak hidupnya. Sedangkan dari segi kebangsaan, resolusi jihad membuktikan nasionalisme K.H. Hasyim Asy'ari dan NU dalam perjuangan melawan kolonial yang dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap nasib umat Islam.
3. Resolusi jihad menunjukkan pentingnya kepedulian umat Islam terhadap nasib bangsa Indonesia. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam harus tampil terdepan untuk berjuang dan

berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Jika umat Islam tidak mengisi peran tersebut, maka dikhawatirkan peran tersebut diambil alih oleh kelompok lain yang belum tentu memperjuangkan aspirasi umat Islam.

4. Resolusi jihad mengandung spirit keagamaan dan nasionalisme yang patut diteladani dan dijadikan pelajaran oleh generasi penerus bangsa. Umat Islam telah berkorban banyak untuk kemerdekaan Indonesia, dengan gugurnya ribuan *syuhada* dari pejuang Islam. Oleh karena itu implikasi resolusi jihad selayaknya tidak berhenti dalam perspektif sejarah masa lalu, tetapi hendaknya menjadi penggugah semangat perjuangan mengisi kemerdekaan. Substansi pesan resolusi jihad pada dasarnya menolak kebatilan dan ketidak adilan, sehingga umat Islam memiliki kewajiban meneruskan amanat tersebut dalam konteks dan ranah perjuangan yang berbeda.
5. Resolusi jihad yang dideklarasikan tokoh-tokoh umat Islam pada masa perjuangan kemerdekaan, seharusnya dijadikan pelajaran bagi generasi bangsa saat ini untuk mengisi kemerdekaan dan membulatkan tekad menjaga negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Generasi bangsa saat ini berhutang jasa pada para pahlawan, yang bahkan gugur sebelum dapat merasakan indahnya kemerdekaan. Resolusi jihad masa perjuangan jangan sampai menjadi sia-sia akibat kegagalan mengurus negara dan keserakahan segelintir anak bangsa yang lupa terhadap sejarah bangsanya.

Substansi resolusi jihad pada dasarnya belum berakhir. Bangsa Indonesia masih harus berjuang melawan ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain untuk mengisi subtansi tersebut di berbagai bidang, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi, maupun kesejahteraan rakyat. Resolusi jihad seharusnya diingat kembali sebagai momentum perjuangan yang tidak berhenti, untuk generasi bangsa saat ini dan yang akan datang, dengan cara cinta terhadap bangsanya sendiri, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme sehingga mampu bersaing dengan negara lainnya.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pengkajian, pembahasan serta analisis yang mendalam, dan sistematis tentang K.H. Hasyim Asy`ari dan resolusi jihad dalam usaha mempertahankan kemerdekaan tahun 1945, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Simpulan Historis

a. Munculnya resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari 1945 tidak dapat dipisahkan dari kedatangan Sekutu yang memboceng NICA. Hal ini menggerakkan tokoh-tokoh Islam untuk mendeklarasikan resolusi jihad. Tokoh-tokoh NU mengadakan rapat di Surabaya pada 22 Oktober 1945 dan mengeluarkan "Resolusi jihad" yang menyatakan bahwa perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (jihad).
b. Isi pokok resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari yakni kewajiban mempertahankan kemerdekaan republik yang merupakan kewajiban agama bagi semua orang Islam (*fardlu 'ain*). Fatwa tersebut mengandung arti bahwa tidak ada alasan bagi setiap muslim yang sedang tidak ada *udzur syar`i* untuk menghindari kewajiban jihad. Setiap muslim yang sudah dewasa dan berada dalam radius kurang dari jarak shalat qhasar, diwajibkan untuk berjihad dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya, walaupun dengan senjata yang seadanya
c. Implikasi resolusi jihad K.H. Hasyim Asy`ari, secara politik meneguhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara bangsa (*Nation state*) yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Adapun secara militer resolusi jihad berkontribusi besar melahirkan tentara nasional yang lahir dari laskar-laskar Sabilillah dan Hizbullah. Tanpa laskar-laskar tersebut, yang terkomando dalam resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan, rekruitmen tentara nasional akan mengalami kesulitan.

2. Simpulan Pedagogis

a. Ajaran Islam menganjurkan jihad dalam konteks perjuangan membela kebenaran, mempertahankan hak hidup, martabat dan harga diri bangsa. Dalam perspektif sejarah, penjajahan di Indonesia telah merampas hak rakyat Indonesia untuk dapat hidup secara merdeka dan bermartabat. Penjajahan juga telah mengekang kebebasan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini merupakan bentuk kezhaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga upaya menghilangkan kezhaliman tersebut menjadi momentum bangkitnya semangat jihad umat Islam.
b. Resolusi jihad yang digagas oleh K.H Hasyim Asy'ari mengandung nilai-nilai moral dan semangat kebangsaan, terlebih lagi dari aspek perjuangan melawan kebatilan dan kezhaliman yang diajarkan syariat Islam. Dari segi moral, resolusi jihad mengandung pesan luhur tentang kemuliaan martabat manusia yang tidak selayaknya ditindas dan dirampas hak hidupnya. Sedangkan dari segi kebangsaan, resolusi jihad membuktikan nasionalisme K.H. Hasyim Asy'ari dan NU dalam perjuangan melawan kolonial yang dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap nasib umat Islam.
c. Resolusi jihad menunjukkan pentingnya kepedulian umat Islam terhadap nasib bangsa Indonesia. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam harus tampil terdepan untuk berjuang dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Jika umat Islam tidak mengisi peran tersebut, maka dikhawatirkan peran tersebut diambil alih oleh kelompok lain yang belum tentu memperjuangkan aspirasi umat Islam.

B. Saran

Berdasarkan simpulan historis dan pedagogis di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Implikasi resolusi jihad selayaknya tidak berhenti dalam perspektif sejarah masa lalu, tetapi hendaknya menjadi penggugah semangat perjuangan mengisi kemerdekaan. Substansi pesan resolusi jihad pada dasarnya menolak kebatilan dan ketidakadilan, sehingga umat Islam memiliki kewajiban

meneruskan amanat tersebut dalam konteks dan ranah perjuangan yang berbeda.

2. Resolusi jihad yang dideklarasikan tokoh-tokoh umat Islam pada masa perjuangan kemerdekaan, seharusnya dijadikan pelajaran bagi generasi bangsa saat ini untuk mengisi kemerdekaan dan membulatkan tekad menjaga negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Generasi bangsa saat ini berhutang jasa pada para pahlawan, yang bahkan gugur sebelum dapat merasakan indahnya kemerdekaan. Resolusi jihad masa perjuangan jangan sampai menjadi sia-sia akibat kegagalan mengurus negara dan keserakahan segelintir anak bangsa yang lupa terhadap sejarah bangsanya.
3. Substansi resolusi jihad pada dasarnya belum berakhir. Bangsa Indonesia masih harus berjuang melawan ketertinggalan dengan bangsa-bangsa lain di berbagai bidang, baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi, maupun kesejahteraan rakyat. Resolusi jihad seharusnya diingat kembali sebagai momentum perjuangan yang tidak berhenti, untuk generasi bangsa saat ini dan yang akan datang. Dengan cara mencintai bangsanya sendiri, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga negara Indonesia mampu bersaing dengan negara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Iimu

Ahmad Tafsir, 2014. Jurnal Mihrab, *Pondok Pesantren,* Vol. II. No. 4

A. Halim, dkk. 2005. *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Ali, Abdullah. 2011. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ali, Moh. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: LkiS

Al-Jauzziyah, Ibnu Qoyyim. 2001. *Jihad Sepanjang Zaman*. Solo: Pustaka Arafah

Amin, Samsul Munir. 2008. *Karomah Para Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Anri. 2013. *Nilai-nilai Kepahlawanan*. Edisi 64/Juli-Desember/20I3

Al-Anshori, M. Junaedi. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: Mitra Aksara Panaitan

Bizawie, Zainul Milal. 2014. *Laskar ulama - Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Pustaka Compass

----------. 2016. *Masterpiece Islam Nusantara Sanad Dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945*). Jakarta: Pustaka Compass

Bruinessen, Martin Van. 1999. *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS

Bustami, Abdul Latif. 2015 *Resolusi Jihad "Perjuangan Ulama: dan Menegakkan Agama Hingga Negara*". Jombang: Pustaka Tebuireng

Dacholfany, M. Ihsan. 2015. *Pendidikan Karakter, Belajar Ala Pesantren Gontor*. Tangerang: Wafi Media Tama

Daliman, A. 2012. *Metode Penelitian Sejarah.* Yogyakarta: Ombak

Depdikbud. Tanpa tahun. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Timur*. Departemen P dan K

El-Guyanie, Gugun. 2010. *Resolusi Jihad Paling syar'i*. Yogyakarta: LkiS

Farih, Amin. 2016. Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November 2016, 251-284

Fata, Ahmad Khoirul. 2014. Kontekstualisasi Pemikiran K.H. Hasyim Asy`ari tentang Persatuan Umat Islam, *Jurnal Miqot* Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014

Ghofar, Muhammad Azizul. 2016. *Jihad Fil Pancasila*. Yogyakarta: Garudhawaca

Hamid, Abdulloh. 2017. *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren (Pelajar dan Santri dalam Era IT dan Cyber Culture).* Surabaya: Imtiyaz

Hamidi, Jazim dan Lutfi Mustafa. 2010. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya.* Jakarta: Pustaka Gramedia

Handayani, Titik. 2008. Kebangkitan Nasional dan Pembangunan Manusia: Sebuah Catatan Kritis. Jakarta: *Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* (LIPI) Jilid XXXIV, NO. 2

Hartono, Margono. 2011. *KH. Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontemporer*. Media Akademika, Vol. 26, No. 3, Juli 2011

Hasyim, Ahmad dan Ridwan, Nur Kholik. 2004. *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan*. Yogyakarta: LkiS

Ihromi, T.O. 1990. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia

Iramdhan. 2017. *Paham Nasionalisme dan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia Dari Tahun 1900-1942*. Sosio-E-Kons, Vol. 9 No. 1 April 2017, hal. 46-53

Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Lathiful, Khuluq. 2008. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. Yogyakrta: LkiS

Latief, Hilman dan Muttaqin, Zaenal. 2015. *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, Dan Filantropi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta

Latif, Yudi. 2013. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Gramedia

Listina, Ria. 2011. *Biografi Pahlawan Kusuma Bangsa*. Jakarta: Sarana Bangun Pustaka

Misrawi, Zuhairi. 2010. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*. Jakarta: Kompas

Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS

Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, Jilid 1. Yogyakarta: LkiS

Muttaqin, dkk: 2011. *Sejarah Pergerakan Nasional*, Bandung: Humaniora

Nia'm, Syamsun. 2011. *Wasiat Tarekat Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI

Noer, Deliar. 1955. *Pengantar ke Pemikiran Politik I*. Medan: Dwipa

Nurhuda. 2008. *Pergulatan Membela Yang Benar, Biografi Matori Abdul* Djalil. Jakarta: Kompas

Palmos, Frank. 2016. *Surabaya 1945 Sakral Tanahku*. Jakarta: Yayasan Obor

Qardhawi, Yusuf. 2010. *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Momentual Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Bandung: Mizan Pustaka

Ricklefs, M.C. 2012. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi Di Jawa dan Penentangnya Dari 1930 Sampai Sekarang*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka

Rifa`i, Muhammad. 2009. *KH. Hasyim Asy'ari Biografi singkat 1871-1947*. Yogyakarta: Garasi

Rohimin, 2006. *Jihad Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga

Saebani, Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia

Salim, Hairus. 2004. *Kelompok Paramiliter*, Yogyakarta: LkiS

Sularto, St. dan Yunarti, D. Rini. 2010. *Konflik Dibalik Proklamasi BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas

Sunyoto, Agus. 2017. *Fatwa Dan Resolusi Jihad Sejarah Perang Rakyat Semesta Di Surabaya 10 November 1945*. Jakarta: Lesbumi PBNU

Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

Suryanegara, Ahmad Mansur. 2015. *Api Sejarah Jilid II.* Bandung: Surya Dinasti

Sutrisno, Mudji dan Putranto. Hendar. 2004. *Hermeneutika Pasca Kolonial Soal Identitas.* Yogyakarta: Kanisius

Umar, Nasaruddin. 2014. *Rethingking Pesantren*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Universitas Muhammdiyah Metro. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro UMM

Vlekke, Bernard H.M. 2011. *Nusantara Sejarah Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Yuliah, Siti. 2012. *Resolusi Jihad Kyai Haji Hasyim Asy'ari (Fatwa Jihad Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan Implikasinya Dalam Perang 10 November 1945 Di Surabaya).* Disertasi Tidak Diterbitkan. Cirebon: Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin IAIN Syekh Nurjati

Yusrianto. 2014. *Pemikiran Politik dan Perjuangan KH. M. Hasyim Asy'ari Melawan Kolonialisme.* Disertasi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor

DAFTAR INDEKS

A

AFNEI, 100

B

BPUPKI, 43, 44, 111
Budi Utomo, 20, 28, 29, 30, 32, 35

D

Dokuritsu Junbi Coosakai, 43

H

Hasyim Asy'ari, ii, iii, iv, v, vi, viii, ix, 10, 12, 14, 15, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 107, 110, 111, 112
Hindia Belanda, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 63, 64
Hizbullah, v, 10, 11, 12, 16, 69, 73, 82, 86, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 102, 106

I

Indische Partij, 30, 31, 32
Indonesia, ii, iii, iv, v, vi, vii, ix, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112
Islam, vi, viii, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

J

jihad, v, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 49, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

K

kolonial, v, vii, ix, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 51, 65, 66, 67, 69, 70, 75, 87, 91, 97, 103, 104, 107
kolonialis, 19
kolonialisme, 14, 17, 19, 20, 28, 34, 69, 87
Kyai, 14, 17, 18, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 63, 66, 67, 70, 72, 73, 92, 112

M

MIAI, 34, 40, 68, 94
Muhammadiyah, vii, 31, 37, 87

N

Nahdlatul Ulama, ix, 10, 15, 50, 61, 63, 65, 84, 91, 110
Nasionalisme, 20, 34, 110, 111
NICA, 11, 12, 14, 16, 84, 86, 87, 88, 96, 98, 106

R

Resolusi Jihad, ii, iii, iv, v, vi, ix, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 76, 80, 82, 83, 87, 88, 91, 92, 96, 97, 102, 109, 111, 112

S

santri, v, vi, vii, 11, 12, 18, 19, 51, 54, 56, 58, 59, 66, 67, 73, 82, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 99
Sarekat Islam, 30, 31
Sekolah Dokter Jawa, 30

Sekutu, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 70, 75, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 94, 98, 99, 100, 102, 106
STOVIA, 30
Surabaya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 48, 62, 63, 71, 73, 82, 84, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 110, 111, 112

U

ulama, v, vi, vii, 10, 17, 18, 19, 36, 37, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 74, 76, 84, 90, 92, 97, 109

W

Wahid Hasyim, 44, 72, 94

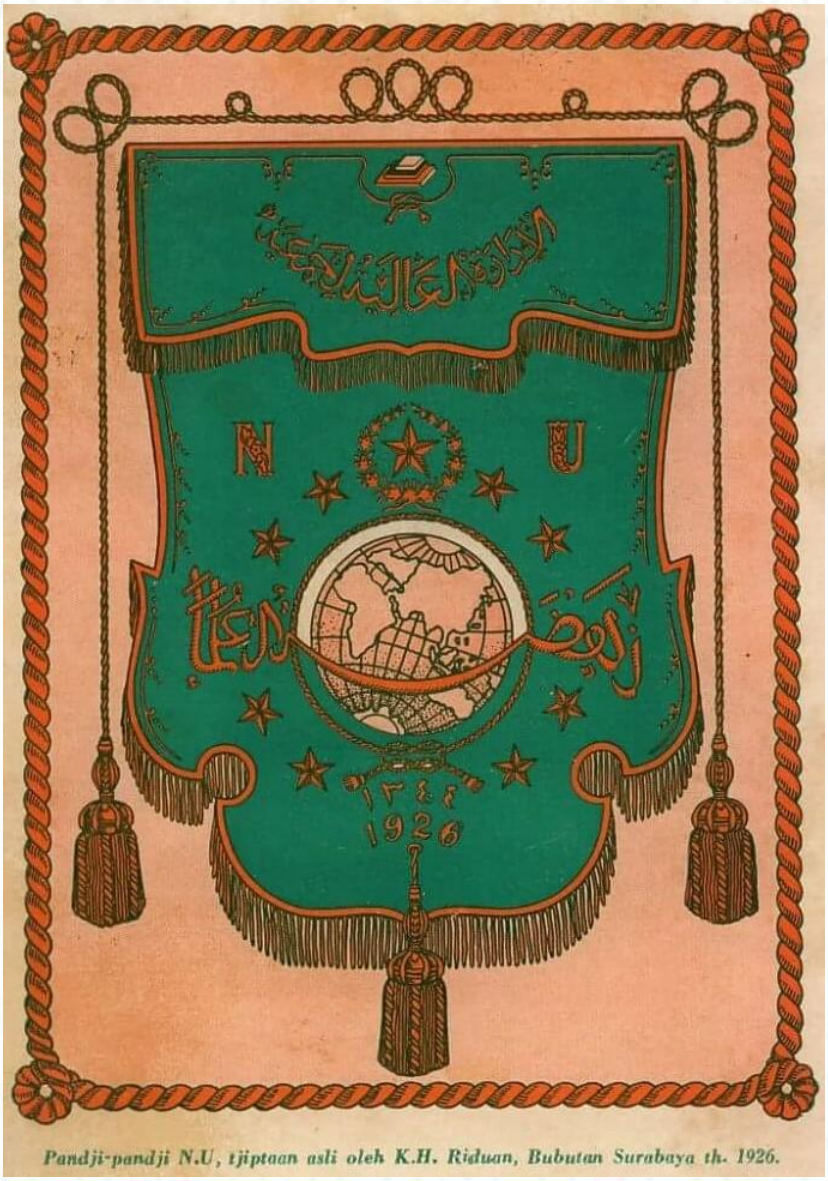

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.